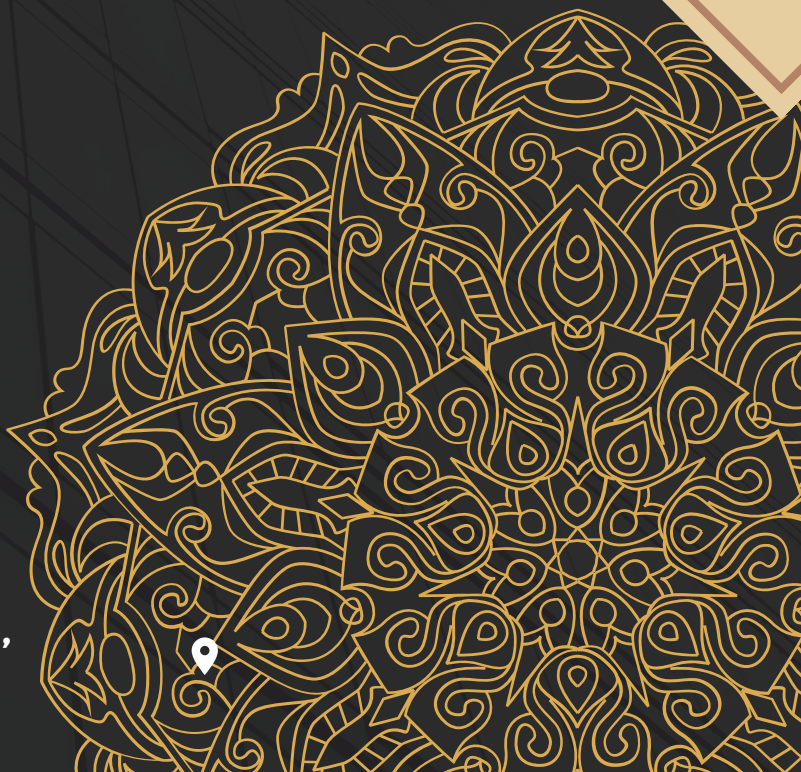




PERUBAHAN RKPD

2024

PEMERINTAH KOTA BONTANG
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah





SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja pemerintah daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan pendapatan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (triwulan dua) Tahun 2024;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 12 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 12 Juli 2024
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 19

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	- 1 -
1.1 Latar Belakang.....	- 1 -
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	- 2 -
1.3 Hubungan Antar Dokumen	- 4 -
1.4 Maksud Dan Tujuan	- 5 -
1.5 Sistematika Dokumen	- 5 -
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023	- 7 -
2.1 Evaluasi Capaian Misi Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	- 7 -
2.2 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024	- 13 -
2.2.1 Evaluasi konsistensi jumlah program RKPD terhadap APBD Kota Bontang Triwulan II tahun 2024.	- 13 -
2.2.2 Evaluasi konsistensi jumlah kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Bontang triwulan II Tahun 2024	- 14 -
2.2.3 Evaluasi Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024.....	- 16 -
2.2.4 Capaian kinerja RKPD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024	- 17 -
2.2.5 Hasil Pelaksanaan RKPD Per Perangkat Daerah Triwulan II Tahun. 2024.....	- 21 -
2.3 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Triwulan II tahun 2024	- 47 -
2.4 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024	- 47 -
2.5 Tindak Lanjut	- 48 -
2.6 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024.	- 48 -
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	- 49 -
3.1 PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH.....	- 49 -
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	- 50 -
3.1.2 Investasi.....	- 53 -
3.1.3 Inflasi.....	- 54 -
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024	- 55 -
3.1.5 Peluang dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024	- 56 -
3.2 PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	- 56 -
3.2.1 Perubahan Pendapatan Daerah.....	- 57 -
3.2.2 Perubahan Belanja Daerah	- 58 -
3.2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah	- 60 -
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	- 64 -
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	- 64 -
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah	- 68 -
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	- 81 -
BAB VI PENUTUP	- 190 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Status Capaian Indikator terhadap target RPJMD - 7 -

Tabel 2. 2 Status Capaian Indikator terhadap target RKPD - 7 -

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Tujuan Dan Sasaran Terhadap Target Akhir RPJMD
2021-2026 Berdasarkan Misi Daerah Kota Bontang - 8 -

Tabel 2. 4 Konsistensi Jumlah Program RKPD Terhadap APBD Triwulan II Tahun 2024
..... - 13 -

Tabel 2. 5 Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Bontang Triwulan II
Tahun 2024 - 15 -

Tabel 2. 6 Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Bontang
Triwulan II Tahun 2024 - 16 -

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Sesuai Urusan Triwulan II Tahun 2024..... - 17 -

Tabel 2. 8 Hasil Pelaksanaan RKPD Menurut Perangkat Daerah Triwulan II Tahun
2024 - 21 -

Tabel 2. 9 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Bontang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2024 - 23 -

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut.
Lapangan Usaha di Kota Bontang tahun 2019-2023 - 50 -

Tabel 3. 2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023..... - 51 -

Tabel 3. 3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran
di Kota Bontang Tahun 2019-2023 - 52 -

Tabel 3. 4 Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 - 58 -

Tabel 3. 5 Rencana Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bontang..... - 59 -

Tabel 3. 6 Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota
Bontang Tahun 2024..... - 60 -

Tabel 3. 7 Rencana Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun
2024 - 60 -

Tabel 3. 8 Rencana Anggaran Pada Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 - 61 -

Tabel 4. 1 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD
Tahun 2024 - 66 -

Tabel 4. 2 Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bontang dengan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun dan Prioritas Nasional Tahun 2024 - 72 -

Tabel 4. 3 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Provinsi
Kalimantan Timur dan Kota Bontang dalam Perubahan RKPD Kota Bontang
Tahun 2024 - 73 -

Tabel 4. 4 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Bontang Tahun 2024 ... - 74 -

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Pagu Perangkat Daerah pada RKPD Perubahan 2024 - 81 -

Tabel 5. 2 Rencana Kerja RKPD Perubahan 2024 - 83 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan..... - 4 -

Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2018-2023 - 50 -

Gambar 3. 2 Grafik Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kota Bontang berdasarkan harga Konstan Tahun 2019-2023 - 52 -

Gambar 3. 3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Bontang Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah) - 53 -

Gambar 3. 4 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Kota Bontang Tahun 2019-2023 (dalam Juta US\$) - 53 -

Gambar 3. 5 Jumlah Proyek Investasi PMDN dan PMA di Kota Bontang Tahun 2019-2023 - 54 -

Gambar 3. 6 Tingkat Inflasi year on year Provinsi Kalimantan Timur Bulan Mei 2024 - 55 -

Gambar 4. 1 Visi dan Misi Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021-2026..... - 65 -

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan perencanaan dalam sebuah tata laksana pembangunan daerah merupakan bagian dari proses dinamis yang perlu dilakukan sehubungan dengan adanya parameter dan variable-variabel strategis yang tidak sesuai dengan asumsi dan kondisi yang diharapkan. Parameter dan variable-variabel dimaksud dapat merupakan kondisi eksternal maupun internal yang harus direspon dengan melakukan perubahan dan penyesuaian dalam lingkup kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam lingkup eksternal, perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional dapat menjadi faktor yang menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian ataupun perubahan perencanaan pembangunan. Sedangkan dalam lingkup internal sesuai dengan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Perubahan RKPD tahun 2024 juga diperlukan untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran RPJMD, khususnya terhadap sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya mengingat bahwa RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Perubahan RKPD tahun 2024 merupakan bagian dalam rangka meningkatkan konsistensi dan kesesuaian antara proses penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran. Oleh karena itu Perubahan RKPD tahun 2024 akan menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun 2024. Sedangkan bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2024, Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 melalui Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, maka beberapa kondisi yang menyebabkan perlunya perubahan RKPD tahun 2023 antara lain:

1. Penyesuaian target pendapatan daerah di tahun 2024, baik sehubungan dengan adanya potensi realisasi pendapatan daerah yang lebih tinggi, maupun dalam rangka mengadministrasikan pendapatan transfer yang

belum dimasukkan dalam Struktur Pendapatan dalam RKPD Induk tahun 2024 yakni, pendapatan transfer khusus atau DAK dan pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2024 yang baru ditetapkan setelah Penetapan Perda APBD Kota Bontang Tahun 2024.

2. Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; dan
3. Penyesuaian target realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi setelah hasil audit BPK.

Dengan adanya penyesuaian pada sisi pendapatan implikasinya adalah perlunya penyesuaian pada target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Namun demikian, perubahan/penyesuaian yang perlu dilakukan tersebut tetap memperhatikan pencapaian target kinerja sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bontang tahun 2024 dilaksanakan dengan sepenuhnya memperhatikan berbagai ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan-perundangan terkait baik dalam lingkup nasional maupun daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6633);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 24);
 18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021– 2026 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 57);
 19. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 14);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,

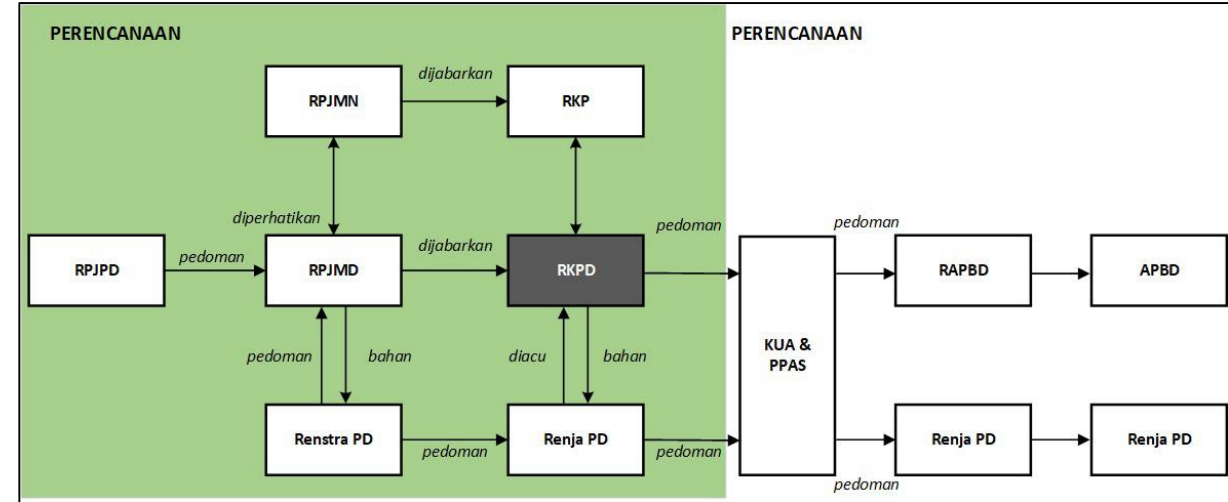
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan perencanaan pembangunan tahunan dalam RKPD tahun 2024 menjadi bagian dalam rangka penjabaran kebijakan perencanaan yang secara hirarki lebih tinggi dan lebih makro yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang secara umum memuat arah kebijakan pembangunan dengan penetapan visi, misi, arah dan sasaran pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun. Perencanaan Jangka Panjang ini selanjutnya menjadi acuan dan dijabarkan dalam perumusan visi dan misi pembangunan lima tahunan RPJMD. Dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD yang dalam proses penyusunannya dilakukan penyelarasan dengan prioritas dan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP. Dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam RKPD diimplementasikan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus mengacu pada RKPD. Sebagai tahapan penghubung antara proses perencanaan dan proses penganggaran, Kesepakatan KUA-PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan RKA-PD dan menjadi bahan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bontang.

Berdasarkan keseluruhan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai sistem penyelenggaraan pembangunan daerah, penyusunan RKPD sangat diperlukan sebagai salah satu instrumen untuk memastikan terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu Undang-undang Nomo 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengatur bagaimana relevansi dan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut ditunjukkan Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan

Adanya keterkaitan dan konsistensi yang jelas antar dokumen perencanaan merupakan bagian penting dalam rangka meningkatkan

akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bontang telah sepenuhnya menggunakan aplikasi SIPD yang telah mengintegrasikan keseluruhan tahapan perencanaan dan penganggaran hingga penetapan APBD.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Kota Bontang tahun 2024 adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan tahun 2023 dengan penyusunan penganggaran tahun 2024 dan menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran RPJMD, serta dalam rangka menjamin sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara ringkas tujuan dari Perubahan RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b) memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2024;
- c) memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.
- d) Menyediakan acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah tahun 2024.

1.5 Sistematika Dokumen

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2023 dilaksanakan dengan sistematika sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang gambaran umum penyusunan dokumen perubahan RKPD, mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Menjelaskan tentang gambaran hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II termasuk isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang capaian kondisi ekonomi tahun 2022 dan perkiraan tahun 2024 antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kota Bontang yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat

daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II.
EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pada pelaksanaan RKPD tahun 2024, hasil evaluasi hingga triwulan II merupakan salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya penyesuaian atau perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian indikator digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Status Capaian Indikator terhadap target RPJMD

Skala	Status Capaian Indikator
≥100%	Telah Tercapai (T)
75,01%-99,99%	Akan Tercapai (AT)
≤75,00%	Perlu Perhatian/Upaya Keras (PU)

Tabel 2. 2 Status Capaian Indikator terhadap target RKPD

Skala	Status Capaian Indikator
≥90%	Sangat Tinggi (ST)
90% - ≥75%	Tinggi (T)
75% - ≥65%	Sedang (S)
65% - ≥50%	Rendah (R)
≤50%	Sangat Rendah (SR)

2.1 Evaluasi Capaian Misi Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian misi daerah berdasarkan capaian indikator kinerja tujuan dan capaian indikator kinerja sasaran menunjukkan sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dan konsisten dalam mendukung Visi Misi Kepala Daerah. Pengukuran indikator tujuan dan sasaran ini menggunakan realisasi pada tahun 2023.

Adapun pengukuran indikator tujuan dan sasaran berdasarkan misi daerah dapat dijabarkan secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Tujuan Dan Sasaran Terhadap Target Akhir RPJMD 2021-2026 Berdasarkan Misi Daerah Kota Bontang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target RKPD 2024	Realisasi TW IV Tahun 2024	Capaian Terhadap RKPD 2024	Status Capaian*
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan									
T1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, amanah dan bertanggung jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah				79	N/A	0	Perlu Upaya Keras
			S.1	Meningknya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks reformasi birokrasi	BB (70,41)	BB (71,21)*	100%	Tercapai
					Nilai LPPD	Tinggi (4,00)	Sedang (3,379)*	84,48%	Akan Tercapai
					Opini BPK	WTP	WTP*	100%	Tercapai
		Indeks Kepemimpinan Daerah				79	N/A*	0	Perlu Upaya Keras
			S.2	Meningkatnya Kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	7	7*	100%	Tercapai
Persetase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum	100%				100%*	100%	Tercapai		
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup									
T2	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)				69,69	65,49*	93,97%	Akan Tercapai
			S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks kualitas perkotaan	72,98	64,16*	87,91	Akan Tercapai
			S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,41	66,81*	100%	Tercapai

		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target RKPD 2024	Realisasi TW IV Tahun 2024	Capaian Terhadap RKPD 2024	Status Capaian*
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup									
T3	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks gini				0,3	0,299*	100%	Tercapai
			S.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Non Migas	5,3	4,41*	83,21%	Akan Tercapai
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia									
T4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				81	81,56*	100%	Tercapai
			S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13,54	13,43*	99,19%	Akan Tercapai
					Rata-rata lama sekolah	11,64	10,92*	93,81%	Akan Tercapai
					Usia Harapan Hidup	74,56	74,81*	100%	Tercapai
			S.7	Meniningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,5	7,74*	100%	Tercapai
			S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka Kemiskinan	3,90	4,11*	94,89%	Akan Tercapai

*) Angka pengukuran tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa 12 indikator tujuan dan sasaran RPJMD telah tercapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, 7 indikator sasaran RPJMD akan tercapai dan 1 indikator tujuan perlu upaya keras untuk bisa tercapai. Penjelasan atas indikator tujuan dan sasaran yang masih belum tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Harmoni, Bersih, Adil, Amanah Dan Bertanggung Jawab

Pada tujuan 1 (satu) terdapat 1 (satu) indikator yakni Indeks Kepemimpinan Daerah yang belum tersedia nilai hasil pengukurannya. Hal ini terkait dengan belum adanya hasil pengukuran resmi yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, oleh karena itu pencapaian indikator ini hingga tahun 2023 belum dapat di ukur. Tujuan 1 (satu) ini memiliki 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran yaitu:

1) Sasaran 1: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel Dan Paritisipatif

Sasaran strategis ini merupakan bagian dari upaya mendukung tercapainya MISI PERTAMA sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2026 yaitu Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan. Penjelasan terhadap capaian indikator pada Sasaran I adalah sebagai berikut:

a) Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2023 berhasil memperoleh nilai 71,21 (BB) yang terdiri dari nilai RB General 62,98 dan nilai RB Tematik 8,23. Dari hasil evaluasi bahwa kedua komponen tersebut masih memerlukan peningkatan dan langkah tindak lanjut hasil dari rekomendasi yang telah diberikan. Namun secara keseluruhan komponen menghasilkan IRB dengan kualifikasi BB telah melampaui target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang meraih indeks 65,38. Jadi jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2021-2026, capaian IRB ditahun 2023 telah berada diatas target, yaitu sebesar 2,8 poin. Bahkan capaian ini telah melebihi target ditahun 2024.

b. Nilai LPPD

Nilai LPPD merupakan hasil evaluasi LPPD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang hasil EPPD secara nasional tahun 2022, maka Pemerintah Kota Bontang menempati urutan ke-21 dari 93 pemerintah kota yang dinilai. Capaian LPPD Pemerintah Kota Bontang jika dibandingkan dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta capaian LPPD Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan capaian tertinggi ke 2 (dua) dari 10 Kabupaten/Kota yang ada. Namun masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Timur (3,5178) dengan gap yang cukup kecil sekitar 0,14 poin.

c. Opini BPK

Berdasarkan LHP BPK RI Nomor:1717/LHP/XIX.SMD/5/2023 tanggal 4 Mei 2023 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bontang tahun anggaran 2022 mendapatkan opini WTP. Perolehan ini adalah ke 9 (sembilan) kali Opini WTP diterima oleh Pemerintah Kota Bontang

2) Sasaran 2: Meningkatkan kondusifitas wilayah

Kondusifitas wilayah merupakan sasaran kedua dalam upaya mewujudkan misi Kota Bontang yang HARMONI melalaui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan. Sasaran ini memiliki dua indikator yaitu jumlah konflik dan

persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum. Penjelasan terhadap capaian indikator pada Sasaran 2 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Konflik

Tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) konflik yang terjadi dari 8 (delapan) target jumlah konflik yang akan terjadi. Sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 100%. Walau capaian telah mencapai 100% tetap perlu upaya deteksi dini dan pencegahan dini terhadap potensi keamanan dan ketertiban umum pada lapisan masyarakat. Untuk perlu adanya upaya meningkatkan efektifitas koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah, instansi vertikal dan unsur terkait, serta mengoptimalkan kinerja dan peran forum-forum kemitraan sebagai upaya preventif dalam mengatasi timbulnya potensi konflik di masyarakat.

b. Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum

Pemerintah Kota Bontang menetapkan indikator persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum sebagai salah satu alat ukur keberhasilan dalam menjaga kondusifitas wilayah. Pada tahun 2023 capaian indikator ini telah terealisasi sebesar 100%. Keberhasilan terhadap capaian dari indikator ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat, pelaksanaan monitoring dan patroli wilayah secara rutin di 15 kelurahan serta adanya patroli gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polres, Dishub serta Perangkat Daerah lain yang terkait.

2. Tujuan 2: Mewujudkan Pembangunan Perkotaan Yang Layak Huni, Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan

Pada tujuan 2 (dua) ini merupakan upaya pencapaian misi Kota Bontang yang kedua yaitu Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budayan dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup. Tujuan 2 (dua) ini terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Maju Tangguh

Indikator Sasaran 3 adalah Indeks Kualitas Perkotaan. Indeks Kualitas Perkotaan diukur melalui 2 komponen, yaitu Indeks kualitas infrastruktur yang diukur melalui 10 parameter dan Indeks Ketahanan Daerah yang diukur melalui 71 indikator kapasitas daerah dalam 7 prioritas penanggulangan bencana yang disusun oleh BNPB. Hasil pengukuran kedua indeks ini, pada tahun 2023 diperoleh indeks kualitas perkotaan dengan nilai 64,16 yang merupakan rata-rata dari indeks infrastruktur dan indeks ketahanan daerah. Salah satu penyebab belum maksimalnya capaian ini antara lain karena belum optimalnya pendataan rumah yang terlayani air minum, belum optimalnya pemanfaatan tempat pengolahan sampah, kompleksnya permasalahan banjir di hulu maupun hilir yang diindikasikan dengan masih terjadinya banjir lokal, banjir rob dan banjir kiriman.

2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang Yang Lestari

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam satu wilayah. IKLH Kota Bontang dihitung dengan mengabungkan nilai komposit tersebut dan mendapatkan nilai 66,81 dari target 65,87 dengan capaian 100%.

3. Tujuan 3: Mewujudkan Inklusivitas Dan Keseimbangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Ekonomi Lokal Dan Keragaman Sosial Budaya Masyarakat

Pada indikator tujuan 3 adalah indeks gini. Gini ratio Kota Bontang Tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 0,299 berada dibawah Kabupaten Kutai Barat sebesar 0,277. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS, perekonomian Kota Bontang tahun 2023 berdasarkan PDRB sebesar Rp.68,11 triliun, selebihnya Rp.44,10 triliun adalah kontribusi dari sektor non migas. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2023 mencapai 4,16% dan sebesar 4,41% adalah laju pertumbuhan ekonomi non migas Kota Bontang. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian di tahun 2023 untuk indikator ini masih di bawah target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 5,36% dengan tingkat capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi non migas sebesar 82%.

4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Sejahtera

Pada tujuan 4 (empat) terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Bontang secara umum menunjukkan peningkatan dalam priode 6 tahun terakhir, hal ini dapat dilihat pada nilai IPM tahun 2019 sebesar 79,86 meningkat menjadi 81,63 pada tahun 2023. Capaian IPM tahun 2023 berada diatas IPM Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 78,20. Nilai IPM Kota Bontang merupakan tertinggi ketiga di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Samarinda sebesar 82,61 dan Kota Balikpapan sebesar 82,03. Pada tujuan 3 (tiga) memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran yaitu:

1) Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas

Peningkatan mutu layanan bidang pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang penting dalam rangka peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada sasaran ini terdiri dari 3 indikator sasaran yaitu Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Usia Harapan Hidup. Indikator ini merupakan alat ukur dibidang pendidikan dan dibidang kesehatan. Penjelasan terhadap capaian indikator pada Sasaran 6 adalah sebagai berikut:

a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik bahwa angka HLS Kota Bontang pada tahun 2023 adalah 13,43. Angka tersebut menggambarkan bahwa anak-anak Kota Bontang memiliki harapan menempuh pendidikan selama 13 tahun atau hingga diploma I. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran tahun 2023 untuk Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) telah memenuhi target. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Berdasarkan data dari BPS bahwa RLS Kota Bontang tahun 2023 mencapai angka 10,92. Angka tersebut menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang yang berusia 25 tahun keatas di tahun 2023 telah menyelesaikan pendidikan formalnya selama 10,92 tahun atau setara dengan kelas 11 sekolah menengah. Capaian sasaran ini masih dibawah target yaitu sebesar 10,98 dengan tingkat capaian indikator sebesar 99,45% atau kurang 0,06%. Informasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

c. Usia Harapan Hidup

Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh BPS bahwa UHH Kota Bontang pada tahun 2023 adalah sebesar 74,81. Angka tersebut menggambarkan bahwa rata-rata bayi yang lahir dan hidup di Kota

Bontang pada tahun 2023 usia harapan hidupnya adalah mencapai 74,81 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa target UHH telah melampaui target, dari target yang ditetapkan sebesar 74,73, dengan tingkat capaian sebesar 100%.

2) Meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing

Pada sasaran ini terdapat satu indikator sasaran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Menurut hasil data yang dipublikasikan, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bontang pada tahun 2023 adalah sebesar 7,74. Angka tersebut menggambarkan bahwa 7,74 persen angkatan kerja atau penduduk dengan usia kerja yang tidak sekolah dan mengurus rumah tangga di Kota Bontang belum mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2023 ini untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka telah melampaui target yang ditetapkan, dari target sebesar 8,70 dengan tingkat capain sebesar 100%.

3) Meningkatkan pemberdayaan sosial

Dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Bontang relatif mengalami penurunan, sebesar 0,43 persen poin menjadi 4,11. Namun hal ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,03. Namun penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di Kota Bontang yang hidup di atas garis kemiskinan. Penduduk yang sebelumnya di bawah kemiskinan yang kemudian karena ekonominya membaik maka terangkat ke atas garis kemiskinan.

2.2 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan bertujuan menjamin konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, evaluasi dilakukan dengan penilaian untuk mengetahui realisasi antara RKPD dengan capaian yang dilaksanakan melalui APBD Kota Bontang. Berikut adalah hasil analisis evaluasi yang membandingkan program hingga sub kegiatan yang terdapat apda RKPD Kota Bontang tahun 2024 dengan APBD tahun 2024 dan juga membandingkan kesesuaian anara program RKPD dengan RPJMD.

2.2.1 Evaluasi konsistensi jumlah program RKPD terhadap APBD Kota Bontang Triwulan II tahun 2024.

Pada tahun 2024 diperoleh tingkat konsistensi jumlah program RKPD yang dilaksanakan pada APBD sampai dengan triwulan II sebesar 100% dengan deskripsi konsistensi program sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Konsistensi Jumlah Program RKPD Terhadap APBD Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program Tahun 2024 Triwulan II				Tingkat konsistensi program RKPD terhadap APBD (%)	Interpretasi konsistensi jumlah program
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	7	7	0	100%	Konsisten
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0	100%	Konsisten
3	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	4	4	4	0	100%	Konsisten
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	11	11	11	0	100%	Konsisten
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10	10	10	0	100%	Konsisten
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0	100%	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program Tahun 2024 Triwulan II				Tingkat konsistensi program RKPd terhadap APBD (%)	Interpretasi konsistensi jumlah program
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai		
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0	100%	Konsisten
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	2	0	100%	Konsisten
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6	6	6	0	100%	Konsisten
10	Dinas Ketenagakerjaan	4	4	4	0	100%	Konsisten
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	10	10	10	0	100%	Konsisten
12	Dinas Lingkungan Hidup	9	9	9	0	100%	Konsisten
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0	100%	Konsisten
14	Dinas Perhubungan	3	3	3	0	100%	Konsisten
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	0	100%	Konsisten
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	17	17	17	0	100%	Konsisten
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0	100%	Konsisten
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	8	8	8	0	100%	Konsisten
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	5	0	100%	Konsisten
20	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	12	12	12	0	100%	Konsisten
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	4	4	4	0	100%	Konsisten
22	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	0	100%	Konsisten
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	0	100%	Konsisten
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	0	100%	Konsisten
25	Inspektorat Daerah	3	3	3	0	100%	Konsisten
26	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	100%	Konsisten
27	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	100%	Konsisten
28	Kecamatan Bontang Utara	5	5	5	0	100%	Konsisten
29	Kecamatan Bontang Selatan	5	5	5	0	100%	Konsisten
30	Kecamatan Bontang Barat	5	5	5	0	100%	Konsisten
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0	100%	Konsisten
Total		174	174	174	0		

Jumlah keseluruhan program yang terdapat pada RKPD ke APBD semuanya konsistensi, tidak terdapat program yang di laksanakan pada APBD tidak di rencanakan di RKPD.

2.2.2 Evaluasi konsistensi jumlah kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Bontang triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II tahun 2024, tingkat konsistensi jumlah kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Bontang mencapai 100%, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Bontang
Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II				Tingkat Konsistensi Kegiatan RKPD Terhadap APBD (%)	Interpretasi Konsistensi Jumlah Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19	19	19	0	100%	Konsisten
2	Dinas Kesehatan	23	23	23	0	100%	Konsisten
3	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	12	12	12	0	100%	Konsisten
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	23	23	23	0	100%	Konsisten
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19	19	19	0	100%	Konsisten
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9	9	9	0	100%	Konsisten
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	10	0	100%	Konsisten
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11	11	11	0	100%	Konsisten
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	13	13	13	0	100%	Konsisten
10	Dinas Ketenagakerjaan	14	14	14	0	100%	Konsisten
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	24	24	24	0	100%	Konsisten
12	Dinas Lingkungan Hidup	16	16	16	0	100%	Konsisten
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	12	12	0	100%	Konsisten
14	Dinas Perhubungan	15	15	15	0	100%	Konsisten
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	12	12	0	100%	Konsisten
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	26	26	26	0	100%	Konsisten
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	12	12	0	100%	Konsisten
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	19	19	19	0	100%	Konsisten
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15	15	15	0	100%	Konsisten
20	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	27	27	27	0	100%	Konsisten
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	15	15	15	0	100%	Konsisten
22	Badan Pendapatan Daerah	8	8	8	0	100%	Konsisten
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	14	14	0	100%	Konsisten
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	13	13	0	100%	Konsisten
25	Inspektorat Daerah	10	10	10	0	100%	Konsisten
26	Sekretariat Daerah	19	19	19	0	100%	Konsisten
27	Sekretariat DPRD	17	17	17	0	100%	Konsisten
28	Kecamatan Bontang Utara	15	15	15	0	100%	Konsisten
29	Kecamatan Bontang Selatan	15	15	15	0	100%	Konsisten
30	Kecamatan Bontang Barat	14	14	14	0	100%	Konsisten
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	12	12	0	100%	Konsisten
Total		483	483	483	0	100%	Konsisten

Jumlah keseluruhan Kegiatan yang terdapat pada RKPD ke APBD semuanya konsistensi, tidak terdapat Kegiatan yang di laksanakan pada APBD tidak di rencanakan di RKPD.

2.2.3 Evaluasi Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024

Tingkat konsistensi sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam RKPD dan APBD Tahun 2024 secara keseluruh semuanya konsistensi, tidak ada sub kegiatan yang tidak direncanakan dalam RKPD tetapi dilaksanakan pada APBD, secara keseluruh semua sub kegiatan 100% terencana dalam RKPD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II				Tingkat konsistensi Sub Kegiatan RKPD terhadap APBD (%)	Interpretasi konsistensi jumlah Sub Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	177	177	177	0	100%	Konsisten
2	Dinas Kesehatan	187	187	187	0	100%	Konsisten
3	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	24	24	24	0	100%	Konsisten
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	73	73	73	0	100%	Konsisten
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	41	41	41	0	100%	Konsisten
6	Satuan Polisi Pamong Praja	27	27	27	0	100%	Konsisten
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	24	24	0	100%	Konsisten
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	30	30	30	0	100%	Konsisten
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	60	60	60	0	100%	Konsisten
10	Dinas Ketenagakerjaan	27	27	27	0	100%	Konsisten
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	66	66	66	0	100%	Konsisten
12	Dinas Lingkungan Hidup	48	48	48	0	100%	Konsisten
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	26	26	0	100%	Konsisten
14	Dinas Perhubungan	40	40	40	0	100%	Konsisten
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	36	36	36	0	100%	Konsisten
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	51	51	51	0	100%	Konsisten
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30	30	30	0	100%	Konsisten
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	43	43	43	0	100%	Konsisten
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40	40	40	0	100%	Konsisten
20	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	47	47	47	0	100%	Konsisten
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	61	61	61	0	100%	Konsisten
22	Badan Pendapatan Daerah	33	33	33	0	100%	Konsisten
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	83	83	83	0	100%	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Tahun 2024 Triwulan II				Tingkat konsistensi Sub Kegiatan RKPD terhadap APBD (%)	Interpretasi konsistensi jumlah Sub Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai		
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38	38	38	0	100%	Konsisten
25	Inspektorat Daerah	29	29	29	0	100%	Konsisten
26	Sekretariat Daerah	53	53	53	0	100%	Konsisten
27	Sekretariat DPRD	62	62	62	0	100%	Konsisten
28	Kecamatan Bontang Utara	137	137	137	0	100%	Konsisten
29	Kecamatan Bontang Selatan	135	135	135	0	100%	Konsisten
30	Kecamatan Bontang Barat	78	78	78	0	100%	Konsisten
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24	24	24	0	100%	Konsisten
Total		1830	1830	1830	0	100%	Konsisten

2.2.4 Capaian kinerja RKPD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja program sesuai perurusan pada RKPD Kota Bontang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Sesuai Urusan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah			Pagu Anggaran PD	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran PD			Status Predikat	
		Pro gram	Kegi atan	Sub Kegiat an		Realisasi	%	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.01	URUSAN PENDIDIKAN	5	15	170	470.595.679.190	107.553.176.285	22,85	60,00	SR	ST
1.02	URUSAN KESEHATAN	9	35	211	441.124.761.180	80.074.333.139	18,15	0,09	SR	SR
1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	23	73	599.558.753.403	42.063.512.502	7,02	66,17	SR	ST
1.04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5	14	35	99.102.349.186	11.166.496.039	11,27	16,67	SR	SR
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	30	81	67.388.440.257	32.278.451.305	47,90	44,45	T	S
1.06	URUSAN SOSIAL	5	12	54	22.745.447.523	8.612.667.777	37,87	16,67	S	SR
	Jumlah	41	129	624	1.700.515.430.739	281.748.637.047	16,57	34,01	SR	R
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07	URUSAN TENAGA KERJA	4	14	27	27.666.123.193	8.901.944.251	32,18	37,25	R	S
2.08	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	16	26	17.357.813.640	6.931.719.146	39,93	37,50	S	S
2.09	URUSAN PANGAN	4	12	24	29.276.749.246	11.111.110.460	37,95	30,00	S	R
2.10	URUSAN PERTANAHAN	5	5	6	1.418.076.599	174.241.179	12,29	3,33	SR	SR
2.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	9	16	48	61.697.455.319	14.446.099.898	23,41	-	SR	SR

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah			Pagu Anggaran PD	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran PD			Status Predikat	
		Pro gram	Kegi atan	Sub Kegiat an		Realisasi	%	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
2.12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	12	26	16.733.787.016	7.310.703.456	43,69	66,67	S	ST
2.13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1	6	2.963.563.228	1.008.523.950	34,03	-	R	SR
2.14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	8	40	7.063.704.418	2.060.582.155	29,17	0,17	R	SR
2.15	URUSAN PERHUBUNGAN	3	15	40	39.218.139.396	7.900.506.454	20,15	25,00	SR	SR
2.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	9	30	37.470.860.812	6.943.827.560	18,53	25,00	SR	SR
2.17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8	15	32	48.050.276.569	13.051.916.908	27,16	23,52	R	SR
2.18	URUSAN PENANAMAN MODAL	6	12	30	17.303.590.152	6.443.952.118	37,24	23,62	S	SR
2.19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	14	33	66.614.594.963	11.470.763.606	17,22	27,06	SR	R
2.20	URUSAN STATISTIK	2	2	4	395.417.566	106.729.241	26,99	21,14	R	SR
2.21	PERSANDIAN	1	1	2	550.567.500	43.943.133	7,98	10,65	SR	SR
2.22	URUSAN KEBUDAYAAN	2	4	7	26.913.008.892	915.111.359	3,40	-	SR	SR
2.23	URUSAN PERPUSTAKAAN	2	8	28	22.612.596.350	8.413.461.212	37,21	33,33	S	R
2.24	URUSAN KEARSIPAN	3	7	12	2.083.872.639	66.614.000	3,20	14,92	SR	SR
	Jumlah	72	171	421	425.390.197.498	107.301.750.086	25,22	21,06	SR	SR
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.25	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	6	11	5.668.589.163	530.281.374	9,35	17,02	SR	SR
3.26	URUSAN PARIWISATA	4	5	10	20.469.453.099	1.857.917.988	9,08	16.488,83	SR	ST
3.27	URUSAN PERTANIAN	5	9	12	5.402.657.887	1.328.717.923	24,59	33,33	SR	R
3.30	URUSAN PERDAGANGAN	6	8	11	5.348.972.374	534.786.766	10,00	12,50	SR	SR
3.31	URUSAN PERINDUSTRIAN	3	3	8	5.739.310.003	1.956.338.136	34,09	0,41	R	SR
	Jumlah	21	31	52	42.628.982.526	6.208.042.187	14,56	4.137,92	SR	ST
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	53	151.110.280.870	51.038.090.483	33,78	-	R	SR
4.02	SEKRETARIAT DPRD	2	17	62	92.209.016.553	31.849.572.052	34,54	-	R	SR
	Jumlah	5	36	115	243.319.297.423	82.887.662.535	34,07	-	R	SR
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	PERENCANAAN	3	12	52	21.503.201.336	6.701.352.623	31,16	59,25	R	ST
5.02	KEUANGAN	5	22	116	59.954.609.631	17.752.559.652	29,61	62,70	R	ST
5.03	KEPEGAWAIAN	2	11	36	21.555.703.139	7.477.740.694	34,69	66,67	R	ST
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	2	5.247.652.051	2.980.514.825	56,80	12,80	ST	SR
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	3	9	3.301.430.117	102.501.694	3,10	19,64	SR	SR
	Jumlah	12	50	215	111.562.596.274	35.014.669.488	31,39	44,21	R	S
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	29	22.327.174.113	9.121.256.646	40,85	45,83	S	S
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN	15	44	346	252.309.008.556	77.500.928.823	30,72	25,71	R	SR
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	24	40.536.029.617	18.090.811.846	44,63	28,57	S	R

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah			Pagu Anggaran PD	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran PD			Status Predikat	
		Pro gram	Kegi atan	Sub Kegiat an		Realisasi	%	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
J U M L A H		175	483	1.826	2.838.588.716.746	617.873.758.658	21,77	542,16	SR	ST

Dari hasil rekapitulasi kinerja per Urusan dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 per urusan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang berisi 6 urusan secara keseluruhan terdapat 42 program, 114 kegiatan dan 435 sub kegiatan yang menunjang urusan ini. Dimana pagu untuk urusan tersebut sebesar Rp685.723.641.782,- dan terealisasi sebesar Rp284.722.827.427,- atau sebesar 41,52% dengan predikat sedang. Adapun realisasi kinerja untuk urusan ini sebesar 35,68 persen dengan status rendah.
2. Capaian Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berisi 18 urusan secara keseluruhan terdapat 72 program, 171 kegiatan dan 421 sub kegiatan yang menunjang urusan ini. Dimana pagu untuk urusan tersebut sebesar Rp425.390.197.498,- dan terealisasi sebesar Rp107.301.750.086,- atau sebesar 25,22% dengan predikat sangat rendah. Adapun realisasi kinerja untuk urusan ini sebesar 21,06 persen dengan status sangat rendah.
3. Capaian Urusan Pemerintahan Pilihan yang berisi 5 urusan secara keseluruhan terdapat 21 program, 31 kegiatan dan 52 sub kegiatan yang menunjang urusan ini. Dimana pagu untuk urusan tersebut sebesar Rp42.628.982.526,- dan terealisasi sebesar Rp6.208.042.187,- atau sebesar 14,56% dengan predikat sangat rendah. Adapun realisasi kinerja untuk urusan ini sebesar 21,06 persen dengan status Sedang.
4. Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang berisi 2 urusan secara keseluruhan terdapat 5 program, 36 kegiatan dan 115 sub kegiatan yang menunjang urusan ini. Dimana pagu untuk urusan tersebut sebesar Rp243.319.297.423,- dan terealisasi sebesar Rp82.887.662.535,- atau sebesar 34,07 persen dengan predikat rendah.
5. Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang berisi 5 urusan secara keseluruhan terdapat 12 program, 50 kegiatan dan 132 sub kegiatan yang menunjang urusan ini. Dimana pagu untuk urusan tersebut sebesar Rp111.562.596.273,- dan terealisasi sebesar Rp35.014.669.488,- atau sebesar 31,39% dengan predikat rendah. Adapun realisasi kinerja untuk urusan ini sebesar 44,21persen dengan status Sedang.
6. Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang berisi 1 urusan secara keseluruhan terdapat 3 program, 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang menunjang urusan ini. Dimana pagu untuk urusan tersebut sebesar Rp22.327.174.113,- dan terealisasi sebesar Rp9.121.256.646,- atau sebesar 40,85 persen dengan predikat sedang. Adapun realisasi kinerja untuk urusan ini sebesar 45.83 persen dengan status Sedang.
7. Capaian Unsur Kewilayahan yang berisi 1 urusan secara keseluruhan terdapat 15 program, 44 kegiatan dan 346 sub kegiatan yang

dilaksanakan oleh 3 Kecamatan. Dimana pagu untuk urusan tersebut sebesar Rp252.309.008.556,- dan terealisasi sebesar Rp77.500.928.8223,- atau sebesar 30,72 persen dengan predikat Rendah. Adapun realisasi kinerja untuk urusan ini sebesar 25,71persen dengan sangat rendah.

8. Capaian Unsur Pemerintahan Umum yang berisi 1 urusan secara keseluruhan terdapat 6 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang menunjang urusan ini. Dimana pagu untuk urusan tersebut sebesar Rp40.536.029.617,- dan terealisasi sebesar Rp18.090.811.846,- atau sebesar 44,63 persen dengan predikat sedang. Adapun realisasi kinerja untuk urusan ini sebesar 28,57 persen dengan status Rendah.

2.2.5 Hasil Pelaksanaan RKPD Per Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RKPD tahun 2024, maka dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD 2024 sampai dengan triwulan II untuk melihat capaian hasil pelaksanaan RKPD 2024. Adapun capaian hasil pelaksanaan RKPD tahun 2024 menurut Perangkat Daerah adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Hasil Pelaksanaan RKPD Menurut Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah			Pagu Anggaran PD	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran PD			Status Predikat	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Realisasi	%	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	19	177	497.508.688.082	108.468.287.644	21,80	33,40	SR	R
2	Dinas Kesehatan	5	23	187	264.908.580.359	60.110.734.100	22,69	7,45	SR	SR
3	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	4	12	24	176.216.180.821	19.963.599.039	11,33	4,90	SR	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	11	23	73	599.558.753.403	42.063.512.502	7,02	20,31	SR	SR
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10	19	41	100.520.425.785	11.340.737.218	11,28	35,35	SR	R
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	9	27	18.613.853.555	6.955.694.426	37,37	39,27	S	S
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	24	13.384.560.818	4.599.566.222	34,36	45,56	R	S
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	11	30	35.390.025.884	20.723.190.657	58,56	39,71	ST	S
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6	13	60	25.709.010.751	9.621.191.727	37,42	52,43	S	T
10	Dinas Ketenagakerjaan	4	14	27	27.666.123.193	8.901.944.251	32,18	51,31	R	T
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	10	24	66	24.421.518.058	8.992.301.301	36,82	49,65	S	T
12	Dinas Lingkungan Hidup	9	16	48	61.697.455.319	14.446.099.898	23,41	12,15	SR	SR
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	12	26	16.733.787.016	7.310.703.456	43,69	55,45	S	T
14	Dinas Perhubungan	3	15	40	39.218.139.396	7.900.506.454	20,15	23,59	SR	SR
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	12	36	38.416.845.878	7.094.499.934	18,47	37,78	SR	S
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	17	26	51	59.138.558.946	15.543.041.810	26,28	54,74	R	T
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	30	17.303.590.152	6.443.952.118	37,24	47,51	S	T
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	8	19	43	87.084.048.062	13.328.681.594	15,31	55,21	SR	T
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	15	40	24.696.468.989	8.480.075.212	34,34	44,33	R	S
20	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	12	27	47	40.347.996.296	12.970.109.757	32,15	53,31	R	T
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	4	15	61	24.804.631.453	6.803.854.317	27,43	54,25	R	T
22	Badan Pendapatan Daerah	2	8	33	20.431.372.343	6.010.220.254	29,42	38,22	R	S

No	Perangkat Daerah	Jumlah			Pagu Anggaran PD	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran PD			Status Predikat	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Realisasi	%	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	83	39.523.237.288	11.742.339.398	29,71	43,08	R	S
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	13	38	26.803.355.190	10.458.255.519	39,02	46,36	S	T
25	Inspektorat Daerah	3	10	29	22.327.174.113	9.121.256.646	40,85	63,24	S	ST
26	Sekretariat Daerah	3	19	53	151.110.280.870	51.038.090.483	33,78	29,31	R	R
27	Sekretariat DPRD	2	17	62	92.209.016.553	31.849.572.052	34,54	39,84	R	S
28	Kecamatan Bontang Utara	5	15	137	102.864.869.879	36.196.017.002	35,19	81,57	R	ST
29	Kecamatan Bontang Selatan	5	15	135	105.891.240.961	27.697.529.757	26,16	53,43	R	T
30	Kecamatan Bontang Barat	5	14	78	46.868.573.506	14.201.688.314	30,30	55,02	R	T
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	24	40.536.029.617	18.090.811.846	44,63	50,29	S	T
J U M L A H		175	483	1.830	2.841.904.392.536	618.468.064.908	21,76	42,52	SR	S

Capaian indikator kinerja program/kegiatan menurut Perangkat Daerah pada triwulan 2 diukur dengan menggunakan kriteria interval di bawah 50% sampai dengan di atas 100%. Capaian kinerja berstatus Sangat Tinggi (ST) adalah yang capaian kinerja mencapai $56\% \geq 100\%$, capaian kinerja berstatus Tinggi (T) adalah yang capaian kinerja mencapai $46\% \geq 55\%$, capaian kinerja berstatus sedang (S) adalah yang capaian kinerja mencapai $36\% \geq 45\%$, capaian kinerja berstatus rendah (R) adalah yang capaian kinerja mencapai $26\% \geq 35\%$ dan capaian kinerja berstatus sangat rendah (SR) adalah yang capaian kinerja mencapai $\leq 25\%$.

Dari 31 Perangkat Daerah Kota Bontang termasuk RSUD sebagai unit pada Dinas Kesehatan predikat capaian keuangannya terdiri dari yang berstatus Sangat Tinggi 2 Perangkat Daerah, status tinggi 13, status sedang 8 Perangkat daerah, status Rendah 3 Perangkat Daerah dan terdapat 4 Perangkat Daerah yang berstatus Sangat Rendah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup. Adapun status predikat capaian kinerja dari 31 Perangkat Daerah secara keseluruhan yang memiliki predikat Sedang. Sehingga dapat dikatakan semua Perangkat Daerah di Kota Bontang kinerjanya sudah sangat baik. Sehingga status realisasi kinerja sampai dengan triwulan II mencapai 42,52 persen dengan status Sedang.

Dari hasil rekapitulasi realisasi keuangan triwulan II per Perangkat Darah dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2024 capaian realisasi keuangan pelaksanaan RKPD mencapai Rp681.468.064.908,- atau 21,76 persen dengan status Sedang. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
								I			II									
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
BIDANG KEBUDAYAAN																				
PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian budaya	100	%	11.290.526.328	-	%	23.287.214.06 5	-	%	322.805.000	-	%	295.531.359	-	%	618.336.35 9	100	11.908.862.6 87	100,00	297,7 2
PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan penyelenggar aan kegiatan kesenian	100	%	3.106.008.172	-	%	3.625.794.827	-	%	-	-	%	-	-	%	-	100	3.106.008.17 2	100,00	443,7 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemuenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DINKES)	100,00	%	67.909.893.711	-	-	178.604.927.7 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	67.909.893.7 11	100,00	116,1 5
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	13,48	per 1000 Kelahir an Hidup	40.113.465.747	8,00	per 1000 Kelahir an Hidup	80.362.231.75 5	1	per 1000 Kelahir an Hidup	33.750.000	-	per 1000 Kelahir an Hidup	90.352.330	1,00	per 1000 Kelahir an Hidup	124.102.33 0	14	40.237.568.0 77	15,24	46,22
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin (Dinkes)	100	%	1.679.953.367	1,00	%	3.127.156.801	-	%	-	-	%	-	-	%	-	100	1.679.953.36 7	100,00	487,9 3
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	97,08	%	340.942.378	-	%	774.620.134	-	%	-	-	%	-	-	%	-	97	340.942.378	97,08	63,25

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)		
							I			II										
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	67	%	691.449.999	-	%	2.039.643.886	-	%	-	-	%	-	-	%	-	67	691.449.999	148,89	83,81
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	86,34	%	79.403.433.839	-	%	39.382.511.367	-	%	-	-	-	658.177.200	-	%	658.177.200	86	80.061.611.039	86,34	61,59
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		11	per 1000 kelahir an hidup	149.521.989.199	-	per 1000 kelahir an hidup	134.781.991.952	-	per 1000 kelahir an hidup	-	-	-	-	-	per 1000 kelahir an hidup	-	11	149.521.989.199	12,97	2269,07
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin	100	%	1.790.126.877	-	%	1.751.961.000	-	%	667.528.798	-	-	-	-	%	667.528.798	100	2.457.655.675	100,00	713,81
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik,	100	%	420.080.000	-	%	299.716.502	-	%	-	-	-	-	-	%	-	100	420.080.000	222,22	50,92

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
						I				II										
						2	3	5			6			7				8		
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
	Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	25.290.003.528	100,00	%	30.899.033.239	-	%	4.662.662.396	%	%	6.649.055.899	-	%	11.311.718.295	100	36.601.721.823	100,00	165,70
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas unit air tanah / air baku	79,56	%	74.584.717.144	100,00	%	213.987.330.957	-	%	1.599.723.111	80	%	13.841.427.626	79,56	%	15.441.150.737	159	90.025.867.881	182,90	529,56
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase penduduk berakses air minum layak	85,72	%	16.293.966.995	84,00	%	33.408.257.526	-	%	56.910.480	86	%	91.390.401	85,72	%	148.300.881	171	16.442.267.876	204,12	164,42
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	41,88	%	785.233.500	38,00	%	1.754.560.000	-	%	-	42	%	8.050.000	41,88	%	8.050.000	84	793.283.500	135,09	158,66
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,02	%	3.717.965.559	96,50	%	6.815.436.139	-	%	143.415.364	96	%	305.013.252	96,02	%	448.428.616	192	4.166.394.175	199,00	96,89

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)			
						I			II											
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	97,92	%	28.669.229.572	95,00	%	27.035.744.550	-	%	-	98	%	189.055.205	97,92	%	189.055.205	196	28.858.284.777	210,53	108,58
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	57,35	%	68.312.767.614	60,81	%	132.492.719.082	7,00	%	385.225.328	57	%	1.872.481.888	64,35	%	2.257.707.216	122	70.570.474.830	172,65	180,49
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Persentase sempadan sungai yang tertata	15,61	%	527.738.079	15,46	%	198.259.000	-	%	-	15,61	%	-	15,61	%	-	31	527.738.079	201,91	17,59
PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Persentase Drainase Jalan Dalam Kondisi Mantap	88,46	%	103.639.808.995	90,02	%	146.097.515.944	-	%	188.406.707	88	%	9.534.011.555	88,46	%	9.722.418.262	177	113.362.227.257	196,53	239,23
PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	80,42	%	1.803.441.770	86,78	%	4.669.986.982	50,00	%	643.300.016	80	%	1.788.152.361	130,42	%	2.431.452.377	211	4.234.894.147	258,70	587,14
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	94,17	%	1.104.821.596	94,17	%	2.199.909.984	-	%	80.416.973	94	%	24.813.940	94,17	%	105.230.913	188	1.210.052.509	211,15	121,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	56,64	%	13.451.348.472	100,00	%	18.124.837.848	100,00	%	4.642.923.422	100	%	2.410.624.895	100,00	%	7.053.548.317	157	20.504.896.789	156,64	160,28
PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN	Persentase Fasilitasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/ko ta	100,00	%	190.943.000	25,00	%	9.455.190.994	-	%	932.284.118	-	-	1.457.877.565	-	%	2.390.161.683	100	2.581.104.683	400,00	258,11

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
								I			II									
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	68,42	%	6.505.012.346	40,49	%	8.764.426.420	-	%	52.983.002	-	%	202.279.750	-	%	255.262.752	68	6.760.275.098	94,95	132,30
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	0,79	%	886.460.500	2,59	%	731.100.000	-	%	-	-	%	-	-	%	-	1	886.460.500	30,50	88,65
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	94,76	%	60.234.565.691	93,22	%	1.857.671.000	-	%	614.815.755	-	%	852.707.532	-	%	1.467.523.287	95	61.702.088.978	101,65	516,20
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	66,67	-	277.962.332	100,00	%	586.391.884	10,00	%	46.652.650	10	%	30.883.810	20,00		77.536.460	87	355.498.792	86,67	54,69
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembanguna n yang diselesaikan	100,00	-	1.767.982.553	75,00	%	156.165.900	-	%	6.422.276	-	%	33.234.304	-		39.656.580	100	1.807.639.133	133,33	301,27
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	100,00	-	274.102.461	30,00	%	130.124.900	-	%	17.402.176	-	%	10.699.904	-		28.102.080	100	302.204.541	333,33	464,93
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas APL yang diberikan izin penguasaan	100,00	-	32.310.000	75,00	%	116.202.900	-	%	6.422.276	-	-	22.523.783	-		28.946.059	100	61.256.059	133,33	55,69
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik	100,00	-	361.506.604	10,00	%	60.598.313.939	-	%	-	-	%	-	-		-	100	361.506.604	1000,00	723,01

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
								I			II									
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol PP)	100,00	%	14.793.839.547	100,00	%	16.162.877.36 2	100	%	3.383.095.410	100	%	2.880.833.16 7	100,00	%	6.263.928.5 77	200	21.057.768.1 24	200,00	183,7 5
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	%	963.436.078	100,00	%	2.450.976.193	100	%	198.252.160	100	%	493.513.689	100,00	%	691.765.84 9	200	1.655.201.92 7	200,00	22,30
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (BPBD)	100,00	%	6.911.915.416	-	%	10.921.749.17 8	-	%	2.540.787.986	-	%	-	-	%	2.540.787.9 86	100	9.452.703.40 2	100,00	154,4 4
PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA	persentase pemenuhan SPM bidang penanggulan gan bencana	68,03	%	1.602.890.875	0,21	%	2.462.811.640	0	%	931.597.685	-	%	-	0,09	%	931.597.68 5	68	2.534.488.56 0	68,11	104,9 3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (DPKP)	100,00	%	20.814.214.012	100,00	%	31.177.647.98 5	100,00	%	6.044.358.791	100	%	11.727.641.3 52	100,00	%	17.772.000. 143	200	38.586.214.1 55	200,00	255,4 7
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Layanan Penyelamata n dan Evakuasi Korban Kebakaran	95,50	%	18.706.617.796	100,00	%	4.212.377.899	100,00	%	1.114.422.026	100	%	1.920.261.78 8	100,00	%	3.034.683.8 14	196	21.741.301.6 10	195,50	440,6 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	13.937.948.882	100,00	%	17.727.483.87 0	100,00	%	2.627.298.696,00	100, 00	%	4.135.161.61 4,00	100,00	%	6.762.460.3 10	200	20.700.409.1 92	200,00	176,2 8
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100,00	Persen	1.150.584.880	-	Persen	224.021.888	-	Persen	-	-	Persen	40.666.903,0 0	-	Persen	40.666.903	100	1.191.251.78 3	100,00	540,2 5

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)			
						I			II											
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa n Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100,00	%	3.696.182.908	-	%	2.803.312.052	-	%	373.355.178,00	-	%	762.167.218,00	-	%	1.135.522.396	100	4.831.705.304	100,00	174,62
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa n Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	100,00	%	2.574.886.203	-	%	1.557.692.244	-	%	219.095.369,00	-	%	114.173.686,00	-	%	333.269.055	100	2.908.155.258	100,00	439,58
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100,00	%	701.149.524	-	%	432.937.469	-	%	10.259.826,00	-	%	75.065.647,00	-	%	85.325.473	100	786.474.997	100,00	158,30
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK dan LAK yang aktif	100,00	%	2.715.677.620	-	%	2.963.563.228	-	%	388.981.223,00	-	%	619.542.727,00	-	%	1.008.523.950	100	3.724.201.570	100,00	689,31
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	10.485.544.901	100,00	%	13.821.556.344	100	%	3.488.755.458	100	%	2.730.607.357	100,00	%	6.219.362.815	200	16.704.907.716	200,00	208,03
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase produktifitas tenaga kerja; Persentase pencari kerja yang dilatih	14,13	%	8.039.956.966	4,82	%	5.101.174.649	-	%	-	14,84	%	12.950.000	14,84	%	12.950.000	29	8.052.906.966	28,97	323,02

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
						I				II										
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	28,35	%	318.407.825	21,00	%	349.002.480	46,53	%	-	24,09	%	40.900.000	70,62	%	40.900.000	99	359.307.825	482,78	89,83
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	2,33	%	2.978.141.329	5,32	%	8.394.389.720	-	%	778.528.800	0,81	%	1.850.202.636	0,81	%	2.628.731.436	3	5.606.872.765	59,09	1768,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	9.938.613.509	-	%	13.401.577.118	-	%	2.194.166.295	-	-	-	-	%	2.194.166.295	100	12.132.779.804	100,00	159,59
PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	98,68	%	758.860.985	0,02	%	1.077.924.194	0,02	%	338.539.550	-	-	190.986.380	0,02	%	529.525.930	99	1.288.386.915	206,48	239,24
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100,00	%	405.005.365	100,00	%	1.019.650.329	100,00	%	24.571.469	-	-	373.001.669	100,00	%	397.573.138	200	802.578.503	200,00	239,43
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajara n Keluarga	100,00	%	318.046.774	70,00	%	235.985.911	-	%	3.675.000	-	-	15.606.557	-	%	19.281.557	100	337.328.331	166,67	137,37
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak terpadu	100,00	%	179.586.184	100,00	%	55.797.846	100,00	%	-	-	-	10.127.338	100,00	%	10.127.338	200	189.713.522	200,00	344,93
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kota Layak Anak	100,00	%	297.816.810	-	%	406.490.086	-	%	27.773.010	-	-	10.541.200	-	%	38.314.210	100	336.131.020	#VALUE!	266,69
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100,00	%	423.166.666	100,00	%	1.160.388.156	100,00	%	150.316.263	-	-	64.758.920	100,00	%	215.075.183	200	638.241.849	200,00	283,66
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	100,00	%	1.045.445.827	1,90	%	1.335.482.371	0,67	%	395.945.696	-	-	146.339.685	0,67	%	542.285.381	101	1.587.731.208	5298,42	870,04

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
								I			II									
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase peserta KB aktif	99,61	%	2.275.206.712	71,00	%	3.572.753.115	-	%	408.420.678	-	-	-	-	%	408.420.678	100	2.683.627.390	140,30	3652,32
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaa n kelompok kegiatan bangga kencana	97,16	%	2.005.102.780	75,00	%	2.155.468.932	-	%	215.074.100	-	-	400.654.396	-	%	615.728.496	97	2.620.831.276	126,18	256,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DKP3)	100,00	%	21.670.657.556 ,00	100,00	%	27.126.712.558,00	100,00	%	4.670.583.926	100	%	6.035.005.716	100,00	%	10.705.589.642	200	32.376.247.198	200,00	284,96
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi) ; Ketersediaan Energi dan Protein	89,80	Nilai	1.508.048.305,00	89,00	Nilai	1.878.398.904,00	-	Nilai	89.772.393	-	Nilai	261.094.300	-	Nilai	350.866.693	90	1.858.914.998	100,90	117,10
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00	%	62.917.879,00	100,00	%	136.199.621,00	25,00	%	-	25	%	2.025.800	25,00	%	2.025.800	125	64.943.679	125,00	39,36
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	100,00	%	843.251.111,00	100,00	%	135.438.163,00	25,00	%	-	25	%	45.632.325	25,00	%	45.632.325	125	888.883.436	125,00	387,03
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	21.915,80	Ton	3.523.899.320,00	21.511,00	Ton	2.133.917.805,00	5.489,40	Ton	277.916.375	3.529	Ton	109.514.848	9.018,82	Ton	387.431.223	30.935	3.911.330.543	147,98	355,58
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3.562,23	Ton	1.412.831.781,00	3.300,00	Ton	2.221.675.629,00	862,50	Ton	54.058.951	-	Ton	75.680.500	862,50	Ton	129.739.451	4.425	1.542.571.232	134,08	102,84
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	22,00	%	1.244.201.555,00	100,00	%	1.312.995.729,00	-	%	-	-	%	13.110.700	-	%	13.110.700	22	1.257.312.255	75,86	628,66

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)			
						I			II											
						2	3	5			6			7						8
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	60,00	%	2.042.044.490, 00	100,00	%	1.771.730.163 ,00	25,00	%	-	25	%	307.161.900	50,00	%	307.161.90 0	110	2.349.206.39 0	137,50	160,5 2
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N PRASARANA PERTANIAN	Persentse pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100,00	%	492.624.650,00	100,00	%	584.145.854,0 0	25,00	%	12.421.450	25	%	8.762.300	50,00	%	21.183.750	150	513.808.400	150,00	73,40
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	100,00	%	1.057.749.122, 00	100	%	1.531.631.889	25	%	7.236.575	25	%	618.428.967	-	%	625.665.54 2	100	1.683.414.66 4	100,00	258,9 9
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	100,00	%	93.524.488,00	100,00	%	106.654.693,0 0	25,00	%	-	25	%	3.791.200	50,00	%	3.791.200	150	97.315.688	150,00	58,98
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	100,00	%	1.618.771.335, 00	100,00	%	1.408.495.288 ,00	25,00	%	125.055.319	25	%	245.860.212	50,00	%	370.915.53 1	150	1.989.686.86 6	150,00	516,8 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	100,00	%	19.827.412.965 ,00	100,00	%	25.888.374.51 4,00	-	%	4.364.197.203	-	%	2.825.833.44 2	-	%	7.190.030.6 45	100	27.017.443.6 10	100,00	187,1 2
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	99,41	%	510.245.850,00	91,00	%	942.244.443,0 0	-	%	2.301.200	-	%	229.020.400	-	%	231.321.60 0	99	741.567.450	150,62	49,60
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Kehati	55,00	%	14.757.392.348 ,00	76,00	%	15.237.516.72 3,00	-	%	1.425.851.588	-	%	1.169.336.53 8	-	%	2.595.188.1 26	55	17.352.580.4 74	85,52	135,5 7

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)			
						I			II											
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	100,00	%	19.058.000,00	100,00	%	10.119.809,00	-	%	-	-	%	-	-	%	-	100	19.058.000	100,00	1121,06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	96,15	%	720.000,00	96,00	%	40.413.274,00	-	%	-	-	%	-	-	%	-	96	720.000	801,25	0,53
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	20,00	%	120.833.701,00	60,00	%	382.025.534,00	-	%	-	-	%	8.930.000	-	%	8.930.000	20	129.763.701	33,33	33,70
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	100,00	%	492.438.994,00	100,00	%	239.022.656,00	-	%	-	-	%	-	-	%	-	100	492.438.994	166,67	724,17
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan pengaduan	100,00	%	20.690.000,00	100,00	%	26.291.500,00	-	%	-	-	%	-	-	%	-	100	20.690.000	166,67	27,59
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	30,11	%	33.182.085.882,00	28,00	%	18.931.446.866,00	-	%	2.326.812.825	-	%	2.044.875.438	-	%	4.371.688.263	30	37.553.774.145	30,41	214,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	9.806.472.745,00	100,00	-	12.963.021.314,00	100,00	-	2.447.002.673	-	-	-	100,00	-	2.447.002.673	200	12.253.475.418	200,00	135,81
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan KTP	100,00	%	1.792.657.854,00	100,00	-	802.567.415,00	100,00	-	374.629.996	-	-	-	100,00	-	374.629.996	200	2.167.287.850	200,00	416,26

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
								I			II									
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran ; Rasio bayi berakte kelahiran ; Rasio pasangan berakte nikah	100,00	%	2.833.628.302,00	-	-	1.528.016.226,00	-	-	572.722.460	-	-	-	-	-	572.722.460	100	3.406.350.762	100,00	1251,18
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan inforamsi Adminduk	100,00	%	1.091.409.980,00	100,00	-	1.436.092.741,00	100,00	-	110.913.782	-	-	-	100,00	-	110.913.782	200	1.202.323.762	200,00	966,71
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyampaian data profil kependuduka n	100,00	%	14.640.000,00	100,00	-	4.089.320,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	200	14.640.000	200,00	24,20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	15.907.676.401,00	100,00	%	19.010.636.882,00	100,00	%	5.504.315.520	100	%	-	100,00	%	5.504.315,520	200	21.411.991,921	200,00	171,01
PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	cakupan penyelenggar aan lalu lintas dan angkutan jalan	98,23	%	20.451.619.505,00	-	%	19.929.979.329,00	-	%	1.202.681.867	-	%	-	-	%	1.202.681.867	98	21.654.301.372	98,23	263,13
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	cakupan pengelolaan pelayaran	100,00	%	100.369.000,00	-	%	248.284.950,00	-	%	-	-	%	-	-	%	-	100	100.369.000	100,00	82,54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	10.392.963.415	100,00	%	16.209.433.670	100	%	5.117.741.668	100	%	-	100,0	%	5.117.741,668	200	15.510.705,083	200,00	140,14

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
						I				II										
						2	3	5		6		7								8
		K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ko ta	47,89	% 9.304.214.764	48,00	% 7.612.510.520	-	% 382.305.443	-	% 382.305.443	-	% 382.305.443	-	% 382.305.443	-	% 382.305.443	48	9.686.520.207	99,98	550,90	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diselenggara kan Secara Online dan Terintegrasi	60,00	% 11.870.034.630	41,00	% 13.648.916.622	-	% 322.119.306	-	% 322.119.306	-	% 322.119.306	-	% 322.119.306	-	% 322.119.306	60	12.192.153.936	157,89	129,79	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		-	- -	100,00	% 177.505.368	25,00	% 44.319.600	-	% 44.319.600	-	% 44.319.600	-	% 44.319.600	25,00	% 44.319.600	25	44.319.600	25,00	#DIV/0!	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunaka n data statistik dalam menyusun perencanaan pembanguna n daerah	100,00	% 347.428.197	100,00	% 217.912.198	6,00	% 13.066.050	32	% 13.066.050	-	% 13.066.050	-	% 13.066.050	38,43	% 13.066.050	138	360.494.247	138,43	164,83	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	36,90	% 439.125.350	62,02	% 550.567.500	-	% 21.068.300	21	% 21.068.300	-	% 21.068.300	-	% 21.068.300	21,30	% 21.068.300	58	460.193.650	75,08	212,40	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)						
						I			II											
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	28.235.824.240	100,00	%	37.383.906.211	100,00	%	##### ####	100,00	%	3.915.083.391,00	100,00	%	12.140.574.144	200	40.376.398.384	200,00	203,26
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	-	-	-	61,00	%	19.952.116	-	%	-	9,00	%	-	9,00	%	-	9	-	45,59	0,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	47,00	%	36.819.245	82,05	%	23.550.741	-	%	-	-	%	-	-	%	-	47	36.819.245	523,97	138,90
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatanny a	66,60	%	60.883.300	54,29	%	511.253.632	-	%	-	-	%	10.517.200,00	-	%	10.517.200	67	71.400.500	888,00	515,56
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N	Persentase kapasitas SDM koperasi	51,12	%	720.342.400	75,00	%	816.627.210	-	%	-	-	%	223.962.880,00	-	%	223.962.880	51	944.305.280	265,83	525,24
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	-	-	-	7,50	-	2.664.000	0,08	-	-	0,08	-	-	0,16	-	-	0	-	2,18	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan usaha	3,57	%	618.937.896	2,92	%	5.534.432.160	102,00	%	-	-	%	480.727.140,00	102,00	%	480.727.140	106	1.099.665.036	31050,00	363,53
PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	2,06	%	5.978.234.750	0,50	%	3.757.890.499	-	%	-	0,50	%	196.135.544,00	0,50	%	196.135.544	3	6.174.370.294	512,00	598,87
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi	-	%	58.253.300	-	-	45.100.211	-	-	-	-	-	21.402.000,00	-	-	21.402.000	-	79.655.300	0,00	35,35

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
								I			II									
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
	regulasi perjinan																			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	100,00	%	9.784.350.760	100,00	-	3.430.297.395	25,00	-	-	25,00	-	-	50,00	-	-	150	9.784.350.760	150,00	130,46
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting	100,00	%	615.015.374	100,00	-	503.001.856	25,00	-	-	25,00	-	226.221.200,00	50,00	-	226.221.2000	150	841.236.574	150,00	171,68
PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas	0,50	%	1.641.504.815	0,5	-	566.893.260	-	-	-	-	-	95.732.130,00	-	-	95.732.130	1	1.737.236.945	100,00	405,42
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	69,83	%	935.083.957	51,00	%	191.848.836	-	%	-	-	%	138.571.436,00	-	%	138.571.436	70	1.073.655.393	109,11	565,31
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	-	-	-	100,00	-	611.830.816	%	-	-	-	-	52.860.000,00	-	-	52.860.000	-	52.860.000	0,00	5,75
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pesentase IKM yang menerapkan sistem managemen produk	5,58	%	5.084.432.786	1,52	%	5.571.159.446	-	%	1.276.787.100,00	0,73	%	654.935.836,00	0,73	%	1.931.722.936	6	7.016.155.722	631,00	2672,82
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	0,47	%	562.489.283	2,00	%	119.778.581	-	%	4.503.600,00	-	%	20.111.600,00	-	%	24.615.200	0	587.104.483	23,50	335,49
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang memanfaatka n SIINAS	0,74	%	964.455.601	2,28	-	48.371.976	0,76	-	-	0,14	-	-	0,90	-	-	2	964.455.601	298,18	964,46

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
								I			II									
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	94,92	%	11.271.337.053	100,00	%	12.416.610.969	100	%	2.488.224.975	100	%	3.091.183.005	100,00	%	5.579.407.980	195	16.850.745.033	194,92	164,85
PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	100,00	%	447.003.200	##### ###	Rp	769.163.060	##### ###	Rp	24.944.945	-	Rp	158.683.795	##### ###	Rp	183.628.740	##### ###	630.631.940	##### ###	174,93
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	285,00	Investo r	1.946.302.078	97,00	Investo r	1.907.916.273	-	Investo r	36.765.300	-	Investo r	30.216.800	-	Investo r	66.982.100	285	2.013.284.178	14250,00	390,93
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	97,49	-	1.131.364.868	88,31	Poin	506.451.304	NA	Poin	2.412.100	NA	Poin	57.256.974	-	Poin	59.669.074	97	1.191.033.942	109,17	289,09
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	87,65	%	789.042.498	44,44	%	821.308.525	-	%	54.869.750	-	%	73.226.850	-	%	128.096.600	88	917.139.098	175,30	445,21
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data perizinan	100,00	%	2.279.468.842	100,00	%	882.140.021	25	%	38.114.562	25	%	420.379.412	50,00	%	458.493.974	150	2.737.962.816	150,00	886,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan daerah	100	%	18.411.635.148	100,00	%	19.686.139.479	100,00	%	4.421.289.334	100	%	2.066.315.917	100,00	%	6.487.605.251	200	24.899.240.399	200,00	204,11
PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pembinaan dan pengembang an kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	100	%	5.036.479.064	100,00	%	6.220.725.078	-	%	957.552.365	35	%	667.871.416	35,00	%	1.625.423.781	135	6.661.902.845	135,00	190,34

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)			
						I			II											
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlit yang berprestasi	62,51	%	36.078.713.142	47,00	%	38.433.064.51 6	-	%	974.826.901	0	%	1.805.687.69 8	0,30	%	2.780.514.5 99	63	38.859.227.7 41	134,58	431,7 7
PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembang an organisasi kepramukaan	100	%	2.314.179.994	100,00	%	2.274.665.890	-	%	57.963.600	-	%	519.256.375	-	%	577.219.97 5	100	2.891.399.96 9	100,00	2389, 59
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	75	%	2.460.024.990	88,00	%	15.959.235.10 8	-	%	20.780.240	74	%	9.561.910	74,00	%	30.342.150	149	2.490.367.14 0	186,25	33,20
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	346647	orang	4.129.136.377	386.636	orang	2.488.425.628	52.175	orang	87.596.692	30.1 32	orang	370.971.000	82.307	orang	458.567.69 2	428.954	4.587.704.06 9	110,37	218,4 6
PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembang an dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	0,4	%	650.664.185	0,40	%	60.725.000	-	%	-	0	%	44.963.426	0,14	%	44.963.426	1	695.627.611	108,00	77,29
PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	40	%	2.000.430.297	70,00	%	1.961.067.363	63,00	%	1.293.355.693	-	%	30.689.027	63,00	%	1.324.044.7 20	103	3.324.475.01 7	171,67	132,9 8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemuahan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	11.799.690.315	100,00	%	15.027.175.05 2	-	%	3.659.821.471	100	%	4.182.663.12 7	100,00	%	7.842.484.5 98	200	19.642.174.9 13	200,00	233,3 7
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka perpusda	79462	Orang	1.884.512.317	42.350,00	Orang	7.585.421.298	-	Orang	194.203.137	-	Orang	-	-	Orang	194.203.13 7	79.462	2.078.715.45 4	187,63	98,11
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	76,67	%	1.527.527.532	100,00	%	1.940.787.361	-	%	66.614.000	40	%	-	40,00	%	66.614.000	117	1.594.141.53 2	116,67	265,6 9

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)			
						I			II											
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamata n arsip	16,67	%	20.237.000	16,67	%	101.536.339	-	%	-	13	%	-	13,00	%	-	30	20.237.000	59,34	26,98
PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Daftar arsip dan SOP arsip	20	%	1.820.000	20,00	%	41.548.939	-	%	-	6,67	%	-	6,67	%	-	27	1.820.000	133,33	2,43
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	88,20	%	103.023.814.24 0,00	88,20	%	93.046.886.17 5,00	-	%	27.057.014.163	-	-	-	-	%	27.057.014. 163	88	130.080.828. 403	101,38	187,8 2
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan ; Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraa n rakyat	100,00	persen	53.668.348.847 ,00	100,00	%	53.863.115.98 1,00	-	%	8.775.555.523	-	-	-	-	%	8.775.555.5 23	100	62.443.904.3 70	100,00	150,7 3
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomia n ; Presentase implementasi kebijakan bidang pembanguna n	100,00	persen	4.472.304.596, 00	100,00	%	4.200.278.714 ,00	-	%	900.018.180	-	-	-	-	%	900.018.18 0	100	5.372.322.77 6	100,00	346,3 6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	99,55	%	58.807.233.698	100,00	%	62.291.617.77 3	-	%	9.218.943.407	-	%	15.896.975.8 45	-	%	25.115.919. 252	100	83.923.152.9 50	99,55	181,5 5

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)			
						I			II											
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan layanan tugas fungsi anggaran	100,00	%	23.330.197.633	100,00	%	29.917.398.78 0	-	%	2.474.259.600	-	%	4.259.393.20 0	-	%	6.733.652.8 00	100	30.063.850.4 33	100,00	126,1 3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	14.131.911.601 ,00	100,00	%	14.336.964.14 3,00	100,00	%	2.747.743.273	100	%	3.121.381.11 2	100,00	%	5.869.124.3 85	200	20.001.035.9 86	200,00	182,2 4
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembanguna n daerah	84,00	%	2.383.107.912, 00	86,00	%	3.988.372.165 ,00	21,50	%	308.403.199	22	%	106.017.961	43,00	%	414.421.16 0	127	2.797.529.07 2	147,67	288,8 6
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggara n	92,00	%	2.308.800.232, 00	94,00	%	3.177.865.028 ,00	-	%	85.944.862	94	%	331.862.216	94,00	%	417.807.07 8	186	2.726.607.31 0	197,87	768,3 3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	17.845.026.028 ,00	100	%	17.301.161.49 3,00	100,00	%	2.022.645.054	100	%	3.657.975.41 3	100,00	%	5.680.620.4 67	200	23.525.646.4 95	200,00	159,9 7
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD terhadap APBD	113,23	%	5.897.878.468, 00	100,00	%	3.130.210.850 ,00	14,14	%	63.471.787	25	%	-	38,92	%	63.471.787	152	5.961.350.25 5	987,35	217,5 2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (BPKAD)	100,00	%	18.492.352.647	100,00	%	21.748.485.28 1	100,00	%	3.663.483.023	100	%	4.671.030.23 2	100,00	%	8.334.513.2 55	200	26.826.865.9 02	200,00	182,6 8
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat kesesuaian tahapan penyusunan APBD	100,00	-	8.710.015.974	100,00	%	14.963.829.93 8	100,00	%	882.359.559	100	%	1.257.915.33 9	100,00	%	2.140.274.8 98	200	10.850.290.8 72	200,00	172,2 5

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)			
						I				II												
2	3	5			6			7								8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	100,00	%	3.505.956.139	100,00	%	2.810.922.069	100,00	%	203.436.651	100	%	1.064.114.594	100,00	%	1.267.551.245	200	4.773.507.384	200,00	159,75		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	12.645.713.756	100,00	%	18.259.880.715	100	%	3.339.561.848	100	%	3.194.432.975	100,00	%	6.533.994.823	200	19.179.708.579	200,00	175,98		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Berkinerja minimal bernilai baik	100,00	%	3.242.779.787	97,00	%	3.295.822.424	-	%	-	100	%	116.670.000	100,00	%	116.670.000	200	3.359.449.787	1333,33	106,58		
PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun	100,00	%	6.061.590.220	30,00	%	5.247.652.051	20	%	1.236.010.076	6	%	1.518.130.049	25,60	%	2.754.140.125	126	8.815.730.345	339,46	288,07		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	0	13.172.751.313	100	Persen	19.437.844.355	100,00	Persen	4.252.564.889,	100,00	Persen	4.085.414.171,00	100,00		8.337.979.060	200,00	21.510.730.373	200,00	221,76		
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	cakupan pengawasan penyelenggar aan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	100	0	1.150.068.372	75,00	Persen	1.765.526.200	25,00	Persen	112.325.181,00	16,67	Persen	291.123.912,00	41,67		403.449.093	141,67	1.553.517.465	188,89	205,96		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan ; Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampinga n	100	0	1.271.600.647	100,00	Persen	1.123.803.558	25,00	Persen	4.413.300,00	16,67	Persen	375.415.193,00	41,67		379.828.493	141,67	1.651.429.140	141,67	296,19		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
								I			II									
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	28.041.362.065	100,00	%	47.681.518.27 0	100,00	%	-	100	%	-	100,00	%	-	200	28.041.362.0 65	200,00	115,5 4
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggar aan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	96	%	1.607.177.077	-	%	3.718.113.091	60,52	%	-	-	%	-	60,52	%	-	157	1.607.177.07 7	161,36	27,41
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaa n masyarakat	100	%	650617442	-	%	48.470.033.83 9	22,77	%	-	-	%	-	22,77	%	-	123	650.617.442	122,77	4,04
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100	%	309.426.600	-	%	1.998.452.066	49,45	%	-	-	%	-	49,45	%	-	149	309.426.600	149,45	80,99
PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggar aan pemerintah umum (kec bontang utara)	100	%	228.692.000	-	%	996.752.613	-	%	-	-	%	-	-	%	-	100	228.692.000	100,00	192,8 2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	27.776.075.861	100	%	46.060.567.00 3	100,00	%	11.859.368.115	100	%	-	100,00	%	11.859.368. 115	200	39.635.443.9 76	200,00	171,1 0
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan koordinasi penyelenggar aan pemerintah umum (kec bontang selatan)	96,00	%	1.233.503.668	97	%	9.142.581.104	-	%	2.214.004.138	-	%	-	-	%	2.214.004.1 38	96	3.447.507.80 6	98,97	48,47
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaa n masyarakat.	100,00	%	1.733.299.042	100	%	48.364.321.23 4	-	%	2.210.188.159	-	%	-	-	%	2.210.188.1 59	100	3.943.487.20 1	100,00	24,19

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)		Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)			
						I			II											
2	3	5			6			7						8			9 = 5 + 8		10 = 9 / 4 x 100%	
		K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang selatan)	100,00	%	49.482.000	100	%	203.769.120	-	%	34.000.000	-	%	-	-	%	34.000.000	100	83.482.000	100,00	44,31
PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggar aan pemerintah umum	100,00	%	246.603.000	100	%	2.120.002.500	-	%	236.208.800	-	%	-	-	%	236.208.800	100	482.811.800	100,00	272,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	%	18.058.641.762	100,00	%	24.877.198.586	100,00	%	6.615.214.478	100	%	6.254.940.234	100,00	%	12.870.154.712	200	30.928.796.474	200,00	167,94
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggar aan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100,00	%	1.723.301.971	100,00	%	2.766.189.386	10,00	%	1.424.844.928	-	%	139.527.881	10,00	%	1.564.372.809	110	3.287.674.780	113,40	83,09
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaa n masyarakat	100,00	%	1.176.344.348	100,00	-	18.655.936.420	10,00	-	1.143.558.925	-	-	1.175.543.415	10,00	-	2.319.102.340	110	3.495.446.688	110,00	45,99
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang barat)	100,00	%	320.751.350	100,00	-	356.146.848	10,00	-	24.830.000	-	-	46.172.000	10,00	-	71.002.000	110	391.753.350	110,00	356,57
PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggar aan pemerintah umum (kec bontang barat)	100,00	%	166.071.665	100,00	%	213.102.266	-	%	54.181.500	-	%	83.723.278	-	%	137.904.778	100	303.976.443	100,00	351,38

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bontang sampai dengan RKPD kota Bontang Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun berjalan yang dievaluasi (APBD 2024)			Realisasi Triwulan						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Bontang Tahun yang dievaluasi (tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Bontang s/d tahun 2021- 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Bontang sampai dengan Tahun 2024 (%)	
								I			II									
								2	3	5			6			7				
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	8.120.298.161	100,00	%	9.545.829.479			2.215.828.986	100	%	1.207.822.024	100,00	%	3.423.651.010	200	11.543.949.171	200,00	143,31
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	presentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	50	%	8.637.536.091	50,00	%	8.727.026.151	-	%	3.142.806.260	-	%	-	-	%	3.142.806.260	50	11.780.342.351	79,37	2161,53
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	57	%	40.418.452.611	75,00	%	14.377.688.016	-	%	4.895.957.000	-	%	6.995.301.600	-	%	11.891.258.600	57	52.309.711.211	79,17	205,14
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN	Presentase terhadap Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	57	%	3.682.390.015	57,00	%	4.895.837.383	-	%	921.761.840	-	%	463.631.634	-	%	1.385.393.474	57	5.067.783.489	66,28	2739,34
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80	%	707.990.622	80,00	%	561.013.662	-	%	-	-	%	10.988.701	-	%	10.988.701	80	718.979.323	86,02	145,25
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perensentas e penanganan konflik	100	%	3.191.773.916	100,00	%	2.428.634.926	100,00	%	44.652.041	100	%	565.168.430	100,00	%	609.820.471	200	3.801.594.387	200,00	484,28

2.3 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Triwulan II tahun 2024

Secara umum, faktor-faktor dominan dirasakan perangkat daerah yang mendorong keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penetapan target kinerja Renstra/Renja yang bersifat terukur secara kuantitatif, sehingga memudahkan dalam menghitung capaian kinerja;
2. Telah diterapkannya SIPD sehingga memungkinkan efektifitas dan konsistensi perumusan kebijakan pemerintah daerah.
3. Kualitas SDM yang memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
4. Kota Bontang sebagai kota kecil memiliki fasilitas perkotaan relatif lengkap, sehingga memudahkan mobilisasi maupun distribusi barang dan jasa. Hal ini sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Anggaran yang disahkan di awal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat.
6. Terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan tersebut
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
8. Dukungan pembiayaan program dan kegiatan dari Pemerintah Provinsi melalui BANKEU sangat membantu percepatan pencapaian target kinerja, khususnya pada prioritas pengendalian banjir/genangan air.

2.4 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024

Secara umum, faktor-faktor yang dominan dirasakan perangkat daerah dalam menghambat pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Beberapa capaian program belum terlihat disebabkan karena pelaksanaannya baru dikerjakan di triwulan 3 atau pelaksanaannya masih berjalan.
2. Masih relatif lambatnya proses-proses pengadaan barang dan jasa, khususnya bagi sejumlah kegiatan strategis dan prioritas berdampak pada rendahnya realisasi kinerja dan keuangannya.
3. Penentuan target yang belum dapat mengantisipasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian di tahun perencanaan (target yang terlalu tinggi atau target yang terlalu rendah)
4. Beberapa perangkat daerah masih kurang optimal dalam penyediaan data, terlebih terkait data indikator kinerja.
5. Perbedaan satuan indikator yang ditargetkan dengan satuan realisasi yang dihitung (misalnya satuan indikator persen, tetapi satuan realisasinya miliar)
6. Kurang maksimalnya penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dimasing-masing Perangkat Daerah;
7. Terbatasnya jumlah SDM aparatur yang memiliki komitmen, kapasitas, kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan;
8. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja yang kurang tepat waktu.

2.5 Tindak Lanjut

Berdasarkan faktor pendorong dan penghambat sebagaimana telah dikemukakan di atas maka diperlukan rekomendasi tindakan yang perlu diperhatikan oleh Perangkat Daerah agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan berikutnya dapat lebih optimal guna mendorong tercapainya target kinerja dan daya serap anggaran. Selanjutnya pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) diharapkan dapat mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan tahunan daerah. Selanjutnya disampaikan tindak lanjut sebagai bahan rekomendasi tindakan perbaikan atau penyempurnaan pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen dengan jadwal kegiatan yang telah disusun sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya;
2. Tetap menjada konsistensi program dan kegiatan perangkat daerah, khususnya yang bersifat strategis/prioritas dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah terhadap RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta APBD lingkup Pemerintah Kota Bontang
3. Kepala Perangkat Daerah perlu melakukan pemantauan yang lebih intensif terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai jadwal dengan baik sehingga dapat melaporkan realisasi secara periodik dengan tertib administrasi
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan juklak juknis kegiatan yang bersumber dari DAK maupun Bankeu provinsi.
5. Penyampaian administrasi keuangan agar tepat waktu sehingga memperlancar proses pencairan keuangan.

2.6 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Bontang Triwulan II Tahun 2024

1. Masing-masing perangkat daerah agar segera mencermati hasil evaluasi sehingga dapat mengidentifikasi kendala dan permasalahan selama pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pada triwulan selanjutnya realisasi bisa sesuai target;
2. Perlu dilakukan penyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan proses penyerapan anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang secara fisik sudah dilaksanakan tetapi penyerapan keuangan baru sebagian dilaksanakan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

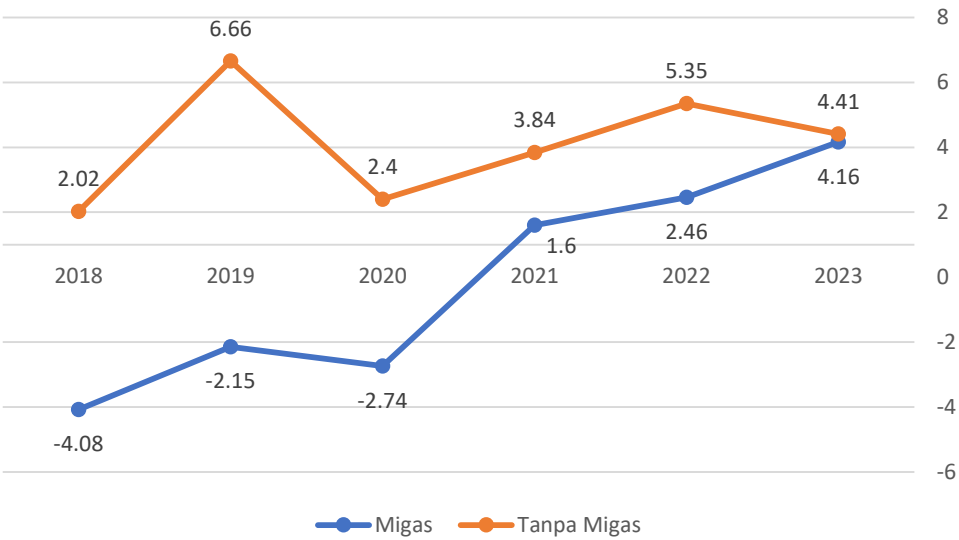
Memasuki triwulan I tahun 2024, situasi perekonomian nasional menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I tahun 2024 mencapai 5,11 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,05 persen (yoy). Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q). Perkembangan ini didorong oleh dampak positif pelaksanaan Pemilu 2024 dan hari libur nasional terkait dengan Hari Besar Keagamaan Nasional. Investasi tumbuh baik, terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Ke depan, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,7%-5,5% didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I tahun 2024 mencapai Rp 5.288,3 triliun dan PDB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp 3.112,9 triliun. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen.

Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, hingga triwulan I tahun 2024, perekonomian Kalimantan Timur menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur meningkat menjadi 7,26 persen (yoy) dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan PDRB tertinggi menurut lapangan usaha didominasi oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 17,44% (yoy). Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, maka lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 39,57%. lalu disusul Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,40 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,46 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor merupakan komponen dengan kontribusi tertinggi terhadap ekonomi, yaitu sebesar 113,63 persen. lalu disusul komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 34,84% dan Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 17,28 persen. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen LNPRT sebesar 18,12% (yoy). Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kalimantan Timur triwulan I tahun 2024 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 208,15 triliun, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 139,02 triliun.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada level kabupaten/Kota BPS tidak melakukan pengukuran per triwulan. Pengukuran pada setiap triwulan hanya dilakukan pada tingkat nasional dan provinsi. Dengan demikian, untuk melihat proyeksi ekonomi Kota Bontang sampai dengan triwulan I mengacu pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur triwulan I tahun 2024. Adapun pertumbuhan ekonomi Kota Bontang masih mengacu pada data tahun 2023.

Kondisi ekonomi makro Kota Bontang di tahun 2023 menunjukkan kinerja yang semakin membaik, dengan laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,16 persen. Tren pertumbuhan ekonomi positif tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang bertahan di angka 5 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Kota Bontang, 2023
Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2018-2023

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi dengan migas terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kota Bontang mengalami penurunan sebesar 0,94 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 2.1. Pertumbuhan PDRB Kota Bontang berdasarkan harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontang tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,51	3,50	2,27	2,28	1,57
B	Pertambangan dan Pengalihan	-18,18	-10,77	-10,32	-11,21	-5,93
C	Industri Pengolahan	-3,55	-3,77	1,63	1,64	3,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,92	12,32	-2,14	3,89	17,41
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,16	1,86	4,36	4,96	4,89
F	Konstruksi	5,75	0,03	0,12	8,15	6,71

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	Perdagangan Besar dan Eceran	4,20	3,73	0,65	5,81	5,51
H	Transportasi	3,39	3,14	3,30	8,25	3,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,72	-1,41	1,51	8,25	9,27
J	Informasi dan Konstruksi	3,05	5,60	5,92	5,38	6,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,43	3,45	2,44	10,12	10,19
L	Real estate	4,32	3,45	2,44	10,12	2,81
M, N	Jasa Perusahaan	3,06	-1,72	1,65	5,23	6,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,38	-3,18	1,01	6,12	2,53
P	Jasa Pendidikan	4,97	5,28	2,24	2,32	5,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,48	17,65	14,16	4,23	5,48
RSTU	Jasa lainnya	5,93	-1,02	1,08	6,35	5,65
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-2,15	-2,74	1,601	2,46	4,16

Sumber: BPS Kota Bontang, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, diikuti Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan.

Struktur perekonomian Kota Bontang menurut Lapangan Usaha hingga tahun 2022 masih tetap didominaasi oleh Industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 78,72 persen. Namun demikian peran Lapangan Industri Pengolahan ini menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, hal ini dipengaruhi oleh turunnya harga minyak dunia dan produksi pengilangan migas yang semakin menurun akibat berkurangnya pasokan gas dari sumur-sumur gas di Kalimantan Timur. Lapangan Usaha dengan peran relatif besar selanjutnya adalah Konstruksi sebesar 7,04 persen, dan Perdagangan sebesar 3,32 persen.

Jika dilihat dari distribusi PDRB, lapangan usaha Industri Pengeolahan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, diikuti dengan lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Adapun distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kota Bontang Tahun 2019 – 2023

NO	Kategori/ Sub Kategori	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2019-2023 (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,15	1,25	1,23	1,17	1,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,48	0,51	0,51	0,37
C	Industri Pengolahan	80,63	79,28	79,42	78,73	78,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,38	6,69	6,49	7,04	7,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,07	3,40	3,30	3,32	3,39
H	Transportasi dan Pergudangan	1,43	1,58	1,66	1,80	1,85

NO	Kategori/ Sub Kategori	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2019-2023 (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,59	0,57	0,58	0,62
J	Informasi dan Komunikasi	0,78	0,86	0,87	0,85	0,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,77	0,83	0,84	0,92	0,98
L	Real Estate	0,45	0,50	0,50	0,47	0,46
M	Jasa Perusahaan	0,46	0,50	0,50	0,53	0,56
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,43	1,45	1,41	1,37	1,30
O	Jasa Pendidikan	1,07	1,21	1,21	1,23	1,23
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,92	1,03	1,01	1,01
Q	Jasa Lainnya	0,40	0,42	0,41	0,41	0,42
TOTAL DISTRIBUSI PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kota Bontang Dalam Angka Tahun 2024

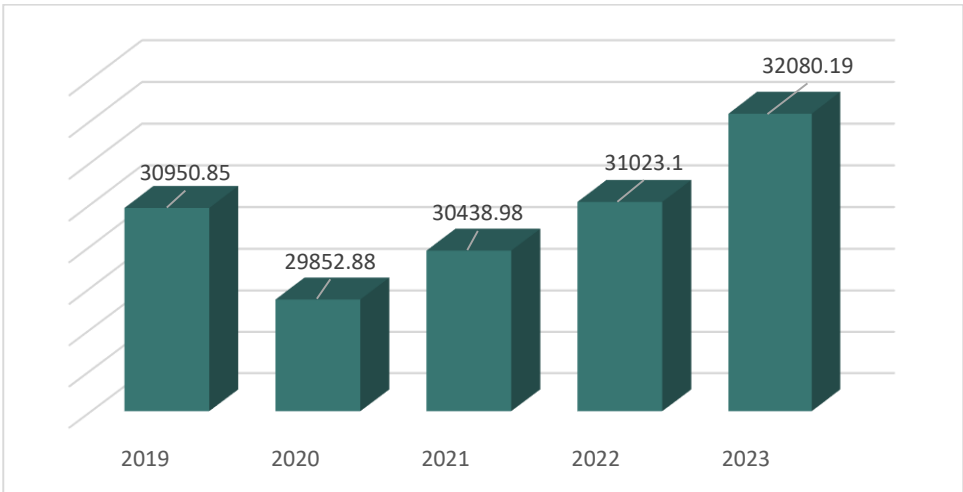
Menurut jenis pengeluaran maka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Bontang dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3. 3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bontang Tahun 2019-2023

NO	Kategori/ Sub Kategori	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2019-2023 (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,05	10,92	10,68	10,35	10,40
C	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,54	0,56	0,55	0,5	0,56
D	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,75	1,86	1,91	1,93	2,34
E	Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,52	13,29	13,72	13,99	14,53
F	Perubahan Inventori	0,05	0,05	0,02	0,02	-0,01
G	Net Ekspor Barang dan Jasa	75,10	73,31	73,11	73,15	72,18
TOTAL DISTRIBUSI PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kota Bontang Dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi paling besar dari PDRB berdasarkan Pengeluaran disumbang dari Net ekspor barang dan Jasa sebesar >70% dari total PDRB. Adapun nilai net ekspor barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut ini.



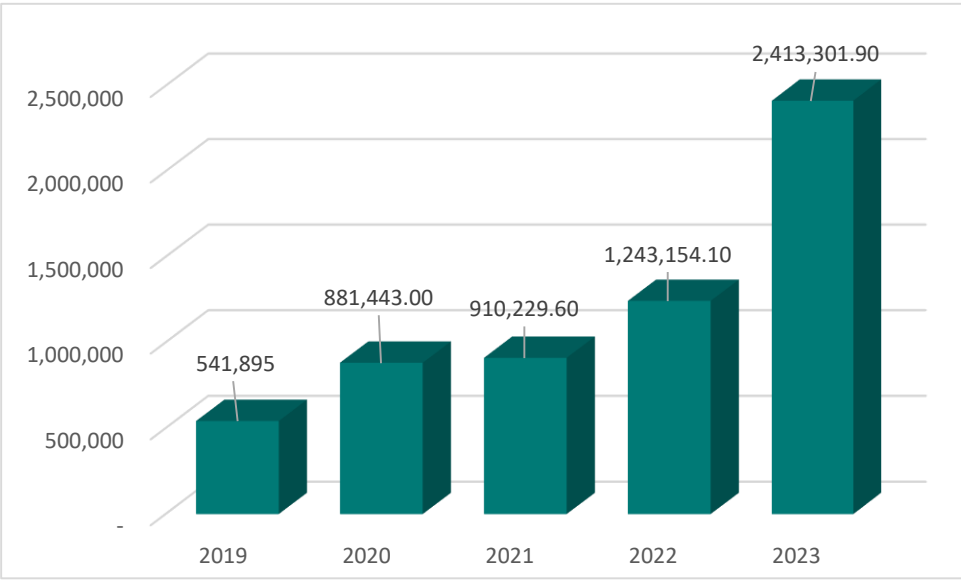
Sumber: BPS Kota Bontang, tahun 2024

Gambar 3. 2 Grafik Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kota Bontang berdasarkan harga Konstan Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai Net Ekspor Barang dan Jasa di Kota Bontang mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Hal ini sejalan dengan peningkatan investasi di Kota Bontang yang terus meningkat.

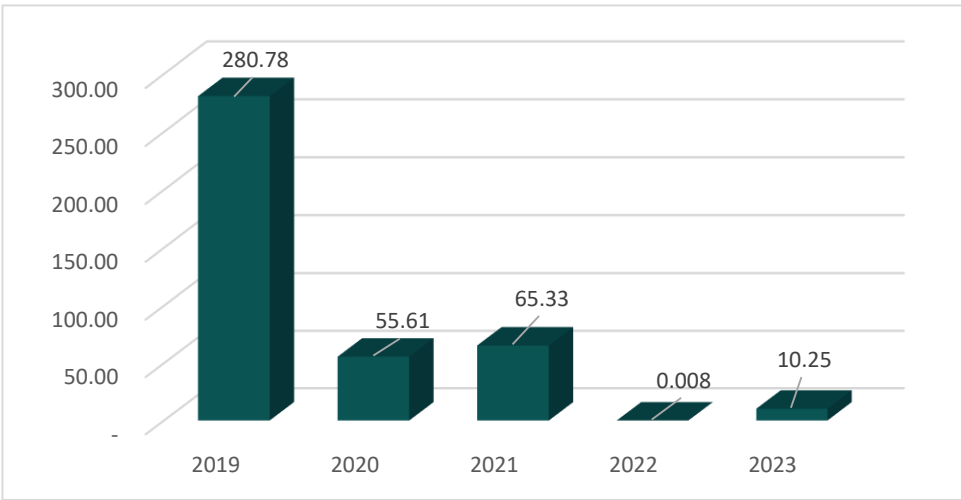
3.1.2 Investasi

Peningkatan investasi merupakan salah satu prioritas pengembangan ekonomi daerah yang terus menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing investasi diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di Kota Bontang dan menstimulasi perluasan dan serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, antara lain pemberian insentif penyertaan modal, pameran investasi, penyediaan Kawasan industri Bontang Lestari.



Sumber: Press Release Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur, DPMPSTSP Kalimantan Timur, 2024

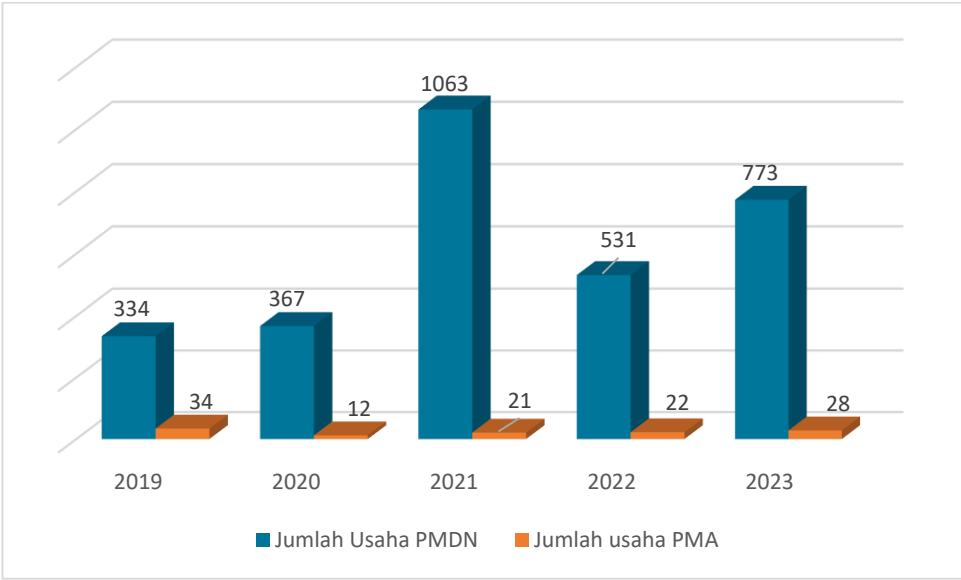
Gambar 3. 3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Bontang Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: Press Release Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur, DPMPSTSP Kalimantan Timur, 2024

Gambar 3. 4 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Kota Bontang Tahun 2019-2023 (dalam Juta US\$)

Berdasarkan Gambar 3.3 dan 3.4 di atas dapat dilihat bahwa untuk PMDN mengalami trend positif dengan bertambahnya nilai investasi dari tahun 2019-2023. Hal ini didukung dengan iklim investasi yang baik di Kota Bontang dan penyediaan kawasan industri KIE. Sebaliknya untuk PMA mengalami tren penurunan yang signifikan dari 2019-2023. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya peta potensi investasi sehingga investor asing belum bisa menentukan jenis investasi yang layak untuk dikembangkan di Kota Bontang. Selain itu semakin padatnya kawasan industri KIE dan belum adanya pengelola di Kawasan Industri Bontang. Sarana infrastruktur menuju kawasan industri Bontang juga perlu diperhatikan untuk memudahkan mobilisasi produksi.



Sumber: Press Release Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur, DPMPSTSP Kalimantan Timur, 2024

Gambar 3. 5 Jumlah Proyek Investasi PMDN dan PMA di Kota Bontang Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah proyek/usaha PMDN mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan bahwa Bontang belum terlalu menarik minat bagi investor untuk mengembangkan usahanya di Kota Bontang. Untuk itu perlu strategi untuk menarik minat investor menanamkan dan berusaha di Bontang. Sedangkan investasi PMA masih relative kecil walaupun mengalami tren yang positif.

3.1.3 Inflasi

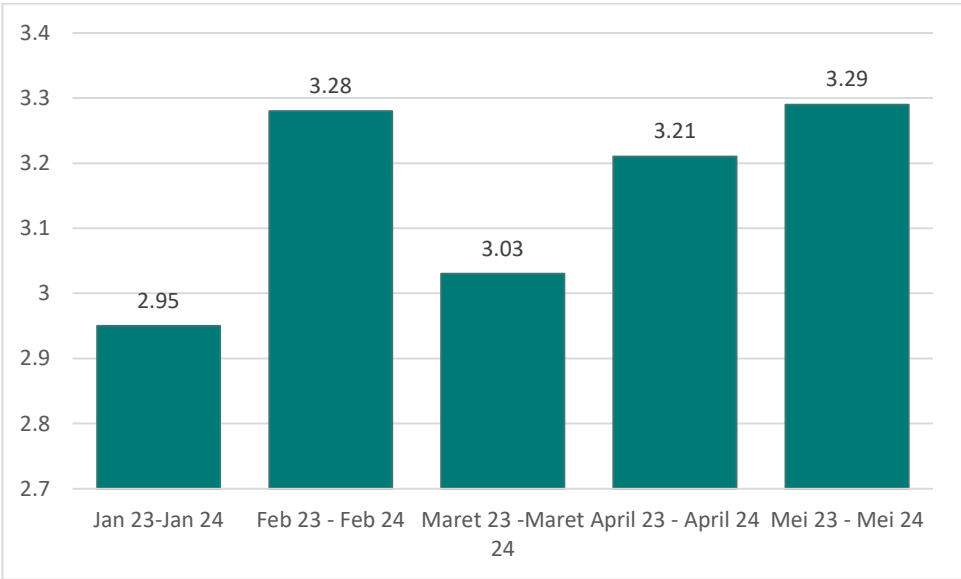
Pada aspek kestabilan harga-harga, perkembangan tingkat inflasi Kota Bontang mengacu pada tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 3,29 persen (yoy) dengan Indek Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,22. Inflasi *year-on-year* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya Sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,92 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,95 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,61 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,82 persen; kelompok transportasi sebesar 4,22 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,38 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,03 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,16 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,73 persen. Sebaliknya, terdapat dua kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan

pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,36 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,32 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Mei 2024, antara lain: beras, angkutan udara, emas perhiasan, tomat, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, tarif rumah sakit, bawang merah, jagung manis, bawang putih, gula pasir, ikan layang/ ikan benggol, sewa rumah, nasi dengan lauk, tukang bukan mandor, telur ayam ras, sawi hijau, tempe, buncis, dan sepeda motor. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: minyak goreng, sabun mandi cair, ikan bandeng/ikan bolu, telepon seluler, biskuit, sepatu anak, sabun cair/cuci piring, pengharum cucian/pelembut, dan sabun detergen bubuk.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Mei 2024, antara lain: daging ayam ras, ikan layang/ikan benggol, emas perhiasan, sawi hijau, kangkung, semangka, soto, bayam, bawang merah, es, dan angkutan udara. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: tomat, cabai rawit, telur ayam ras, biskuit, sabun mandi cair, ikan bandeng/ikan bolu, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Pada Mei 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,00 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,56 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,12 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,24 persen. Sebaliknya, terdapat dua kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan masing-masing sebesar 0,02 persen.



Sumber: BPS Kota Bontang 2023

Gambar 3. 6 Tingkat Inflasi year on year Provinsi Kalimantan Timur Bulan Mei 2024

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Memperhatikan perkembangan ekonomi nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2024, terdapat beberapa

tantangan dalam akan mempengaruhi perekonomian Kota Bontang di tahun 2024, antara lain:

1. melemahnya permintaan batu bara global yang diperkirakan melemah akan memberi resiko terjadi perlambatan ekonomi nasional dan daerah.
2. pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan perpindahan Ibu Kota Negara diperkirakan akan meningkatkan permintaan masyarakat, peningkatan Upah Minimum Pekerja (UMP) yang juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, namun di satu sisi dikhawatirkan ketersediaan barang yang lebih kecil dari permintaan pasar akan mendorong terjadinya inflasi.
3. Realisasi investasi Kota Bontang yang cenderung mengalami penurunan terutama PMA akan menurunkan jumlah produksi dan jasa yang pada akhirnya akan mempengaruhi ekonomi daerah.
4. pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan tekanan politik tersendiri yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah.
5. ketidakpastian terkait suku bunga global yang fluktuatif menjadi faktor yang membuat Bank Indonesia berada dalam kewaspadaan.
6. Sektor pertambangan yang diperkirakan akan menghadapi disrupsi pasok dan keterbatasan alat berat.

3.1.5 Peluang dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Kondisi ekonomi global dan ekonomi domestik juga memberikan peluang bagi perekonomian Kota Bontang di tahun 2024. Adapun tantangan perekonomian yang akan dihadapi di tahun 2024 ini adalah:

1. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang diperkirakan akan tumbuh pada rentang 4,80-5,60 persen.
2. Pertumbuhan sektor pertambangan mengalami penurunan karena dipengaruhi kebijakan harga karbon (*carbon pricing*), serta melandainya harga gas bumi di sejumlah negara konsumen besar.
3. Akselerasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek strategis nasional lainnya masih akan terus berlanjut dan diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi di Kalimantan Timur.
4. Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan di Bontang terutama dengan berdirinya pabrik nitrat dan pabrik oleokimia diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang.
5. Berdirinya PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) dan PT Energi Unggul Persada, diharapkan dapat mengurangi impor dan meningkatkan produksi dalam negeri.
6. Pertumbuhan ekonomi nasional dan Kaltim yang diprediksi akan terus bergerak positif, memberikan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang juga akan berkontraksi positif.

3.2 PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada April 2024 Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp75,7 triliun atau 0,33 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara tercatat sebesar Rp924,9 triliun per April 2024. Nilai itu setara dengan 33 persen dari target APBN sebesar Rp2.802,3 triliun. Kinerja pendapatan negara berkontraksi sebesar 7,6 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*) bila dibandingkan dengan April 2023. Dibanding tahun lalu, pendapatan negara terjadi penurunan. Namun, kinerja belanja negara mengalami peningkatan sebesar 10,9 persen *yoy*. Jumlah realisasi belanja negara hingga April 2024 tercatat sebesar Rp849,2 triliun. Nilai ini setara dengan 25,5 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.325,1 triliun.

Sejalan dengan surplus itu, surplus keseimbangan primer juga masih terjaga. Keseimbangan primer hingga akhir April tercatat sebesar Rp237,1 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Surplus keseimbangan primer mengindikasikan penerimaan negara cukup memadai untuk membiayai belanja negara sekaligus membayar seluruh atau sebagian pokok dan bunga utang.

Realisasi sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan Februari 2024 sebesar Rp8,73 triliun (13,33% dari target). Pendapatan APBD didominasi dari Dana Transfer dan PAD. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan Februari 2024 sebesar Rp6,61 triliun (13,14% dari target). Pendapatan dari Dana Transfer dan PAD masing-masing berkontribusi sebesar 75,72% dan 24,17% terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD s.d. bulan Februari 2024 sebesar Rp1,85 triliun (2,64% dari pagu Rp70,19 triliun). Pada tahun 2025, diperkirakan penerimaan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp20,675M. Angka ini lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp24,372M.

Penerimaan pajak telah terealisasi sebesar Rp4,77 triliun (10,40% dari target), mengalami penurunan sebesar -5,93% yoy. Penurunan pajak tersebut dipengaruhi oleh mayoritas kelompok pajak di wilayah Kaltim mengalami pertumbuhan negatif, kecuali jenis pajak PBB dan pajak lainnya. Pertumbuhan negatif tersebut akibat harga CPO di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan yang menurun. Hal serupa terjadi pada Pajak Perdagangan Internasional yang mengalami pertumbuhan minus, utamanya disebabkan oleh perlambatan penerimaan Bea Keluar sebesar -77,15%. Sementara itu hingga Februari 2024, Bea Masuk mengalami peningkatan 9,05% karena importasi gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya yang naik.

3.2.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Seiring dengan perkembangan yang semakin mendukung perbaikan indikator perekonomian selama tahun 2024 hingga memasuki triwulan II tahun 2024 baik dalam lingkup nasional dan daerah, termasuk perkiraan realisasi penerimaan negara tahun 2024 yang akan melampaui targetnya, maka pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan 20,79 persen dibandingkan dengan target dalam APBD Murni Tahun 2023. Peningkatan ini utamanya ditopang oleh adanya peningkatan pada komponen pendapatan transfer, yakni pendapatan transfer Pemerintah Pusat sesuai Perpres 98 tahun 2023 sebesar 24,41persen.

Hingga bulan Mei 2024, APBD Kota Bontang telah terealisasi sebesar Rp737.049.061.647,84 dari APBD tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.885.317.411.456,00 atau sebesar 20,97 persen. Dari sisi belanja terealisasi sebesar Rp 563.686.741.821,00 dari target belanja sebesar Rp2.840.317.411.455,00 atau sebesar 19,85 persen. Pendapatan transfer telah teralisasi Rp708.410917.884,00 dari target Rp1.991.443.215.595,00 atau 35 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah telah terealisasi sebesar Rp28.637.029.488,84 dari target Rp245.000.000.000,00 atau sebesar 11,69 persen.

Pada Perubahan RKPD 2024, diproyeksikan akan terjadi peningkatan pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun perbandingan proyeksi

pendapatan pada Perubahan RKPD tahun 2024 terhadap RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024			Silisih P-RKPD 2024 dengan RKPD 2024
	RKPD Murni	APBD Murni	Perubahan RKPD	
PENDAPATAN	1.956.037.901.028	2.865.317.411.456	2.762.535.342.457	806.497.441.429
Pendapatan Asli Daerah	223.922.642.285	245.000.000.000	296.329.967.393	72.407.325.108
Pajak Daerah	132.361.704.115	146.845.288.166	148.640.154.163	16.278.450.048
Retribusi Daerah	3.677.854.568	86.497.854.568	126.512.187.027	122.834.332.459
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.075.813.311	4.075.813.311	4.075.813.311	-
Lain-Lain PAD yang Sah	83.807.270.291	7.581.043.955	17.101.812.892	(66.705.457.399)
PENDAPATAN TRANSFER	1.724.715.223.683	2.124.425.955.595	2.456.035.696.439	731.320.472.756
Pendapatan Tansfer Pemerintah Pusat	1.478.048.697.663	1.752.568.485.595	2.084.178.499.439	606.129.801.776
Pendapatan Tansfer Antar Daerah	246.666.526.020	371.857.470.000	371.857.470.000	125.190.943.980
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.400.035.060	10.155.118.527	10.169.405.625	2.769.370.565
Pendapatan Hibah	1.684.139.648	1.684.139.648	1.684.139.648	-
Lain-Lain Pendapatan	5.715.895.412	8.470.978.879	8.485.265.977	2.769.370.565

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan pada pendapatan Asli Daerah yang disebabkan adanya proyeksi pendapatan yang berasal dari Pajak PBB-P2 dan Lain-lain PAD yang Sah karena adanya pembayaran bunga atas deposito daerah selama 3 bulan senilai Rp.8.843.606.557,-. Sedangkan pada Pendapatan Transfer terjadi direncanakan terdapat peningkatan pendapatan dari transfer pusat yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Hak-Hak Keuangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

3.2.2 Perubahan Belanja Daerah

Dengan adanya peningkatan target Pendapatan Daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2024, dalam perspektif Belanja Daerah memberikan ruang untuk peningkatan akomodasi terhadap kebutuhan belanja pembangunan yang sebelumnya belum dapat diakomodir dalam APBD murni tahun 2024, termasuk dalam rangka belanja daerah untuk peningkatan kinerja program-program prioritas dalam upaya pencapaian target RPJMD pada tahun 2024. Penyesuaian belanja daerah dalam perubahan RKPD tahun 2024 disusun dan direncanakan dengan prioritas kebijakan sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat yang belum teranggarkan seluruhnya dalam APBD Murni tahun 2024;
2. Penyesuaian terhadap kebijakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, khususnya dana transfer khusus melalui Belanja program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),
3. Penyesuaian kebijakan belanja daerah yang bersumber dari alokasi Transfer antar daerah dalam hal ini belanja program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD tahun 2022 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku termasuk pengalokasian Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah;

- 5. Penambahan alokasi Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD tetap harus memperhatikan pemenuhan ketentuan untuk belanja *Mandatory Spending* sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6. Kegiatan pada Perubahan RKPD tahun 2024 disusun dengan memperhatikan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran yang relatif terbatas;

Target Belanja daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2024 dibandingkan dengan RKPD Murni tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan dari Rp.2.080.661.674.926,00 menjadi Rp.3.342.796.039.593,00 atau meningkat sebesar Rp.1.262.134.364.901,00 atau meningkat 60,66 persen dari belanja pada APBD tahun 2024. Sedangkan jika dibandingkan dengan APBD muni tahun 2024 Target Belanja Daerah mengalami peningkatan 17,69 persen. Adapun rencana belanja pada Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Rencana Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024

Uraian	Anggaran Tahun 2024			Selisih Perubahan dengan RKPD 2024
	RKPD Murni	APBD Murni	Perubahan RKPD	
BELANJA DAERAH	2.080.661.674.692	2.840.317.411.456	3.342.796.039.593	1.262.134.364.901
Belanja Operasi	1.549.322.029.952	2.023.295.669.879	2.100.527.700.954	551.205.671.002
Belanja Pegawai	688.813.190.379	760.577.251.152	845.894.771.906	96.317.604.648
Belanja Barang dan Jasa	776.721.057.635	1.194.717.605.345	1.162.065.398.456	706.546.143.966
Belanja bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	82.787.781.938	67.000.813.382	91.567.530.592	3.893.367.359
Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0
Belanja Modal	524.839.644.740	810.521.741.577	1.238.634.522.283	713.794.877.543
Belanja Modal Tanah	4.500.000.000	42.982.902.000	166.452.902.000	161.952.902.000
Belanja Peralatan dan Mesin	58.655.612.706	157.365.688.022	171.560.772.646	112.905.159.940
Belanja Bangunan dan Gedung	208.799.701.784	242.670.016.832	258.648.525.031	49.848.823.247
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	252.343.664.874	366.381.279.221	637.437.607.506	385.093.942.632
Belanja Aset Tetap Lainnya	40.665.376	227.036.696	2.956.168.574	2.915.503.198
Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000	894.818.806	1.578.546.526	1.078.546.526
Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	6.500.000.000	3.633.816.356	-2.866.183.644
Belanja Tidak terduga	6.500.000.000	6.500.000.000	3.633.816.356	-2.866.183.644

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan belanja direncanakan pada belanja operasi dan belanja modal yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD pada tahun 2024. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar 44,09 persen karena telah digunakan pada pergeseran anggaran di tahun 2024 ini.

Berdasarkan uraian pendapatan dan belanja di atas, maka secara lengkap perbandingan antara Pendapatan dan Belanja daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024

KODE	URAIAN	Anggaran Tahun 2024			BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		RKPD Murni 2024	APBD MURNI 2024	Perubahan RKPD	
I.	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	223.922.642.285	245.000.000.000	296.206.967.393	72.284.325.108
	PENDAPATAN TRANSFER	1.724.715.223.683	2.124.425.955.595	2.456.158.969.439	731.443.745.756
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.400.035.060	10.155.118.527	10.169.405.625	2.769.370.565
	Jumlah Pendapatan	1.956.037.901.028	2.379.581.074.122	2.762.535.342.457	806.497.441.429
II.	BELANJA DAERAH				
	Belanja Operasi	1.549.322.029.952	2.023.295.669.879	2.100.527.700.954	551.205.671.002
	Belanja Modal	524.839.644.740	810.521.741.577	1.238.634.522.283	713.794.877.543
	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	6.500.000.000	3.633.816.356	-2.866.183.644
	Jumlah Belanja	2.080.661.674.692	2.840.317.411.456	3.342.796.039.593	1.262.134.364.901
III.	Total Surplus/(Defisit)	(124.623.773.664)	(460.736.337.334)	(580.260.697.136)	-455.636.923.472

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada perubahan RKPD 2024 diperkirakan akan ada defisit sebesar Rp.455.636.923.472,00 karena penerimaan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah. Dibandingkan dengan rencana pada RKPD 2024, defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar 365,61 persen.

3.2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kota Bontang pada perubahan RKPD Tahun 2023 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp. 605.260.697.136,00. Jika dibandingkan dengan RKPD murni, angka tersebut berselisih lebih sebesar Rp. 480.260.697.136,00. Peningkatan ini disebabkan oleh pencairan dana transfer daerah secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF). Secara lengkap rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Rencana Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024

URAIAN	Anggaran Tahun 2024			Selisih Perubahan dengan RKPD 2024
	RKPD Murni	APBD Murni	Perubahan RKPD	
PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000	460.736.337.334	580.260.697.136	480.260.697.136
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.000.000.000	485.736.337.334	605.260.697.136	480.260.697.136
Silsa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	125.000.000.000	485.736.337.334	605.260.697.136	480.260.697.136
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-

URAIAN	Anggaran Tahun 2024			Selisih Perubahan dengan RKPD 2024
	RKPD Murni	APBD Murni	Perubahan RKPD	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/ Hibah	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	-
PEMBIAYAAN NETTO	100.000.000.000	460.736.337.334	580.260.697.136	480.260.697.136

Berdasarkan uraian pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan tersebut di atas, maka pembiayaan daerah mengalami SURPLUS pembiayaan sebesar Rp.480.260.697.136,00.

Dengan adanya pembiayaan daerah maka total Anggaran dalam Perubahan RKPD tahun 2024 menjadi Rp.3.367.796.039.593,00. Adapun rencana total anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Rencana Anggaran Pada Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024

URAIAN	Anggaran Tahun 2024			BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	RKPD Murni 2024	APBD MURNI 2024	Perubahan RKPD 2024	
PENDAPATAN DAERAH	1.955.661.674.692	2.379.581.074.122	3.367.796.039.593	1.412.134.364.901
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	223.546.415.949	245.000.000.000	296.329.967.393	72.783.551.444
Pajak Daerah	132.361.704.115	146.845.288.166	148.640.154.163	16.278.450.048
Pajak Hotel		2.638.000.000	0	
Pajak Restoran		14.876.531.630	0	
Pajak Hiburan		1.436.840.000	0	
Pajak Reklame		1.646.011.409	1.646.011.408	
Pajak Penerangan Jalan		40.203.145.116	0	
Pajak Parkir		400.932.000	0	
Pajak Air Tanah		8.583.008.000	6.448.848.914	
Pajak Sarang Burung Walet		2.000.000	3.150.000	
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya		500.000.000	2.000.000.000	
PBBP2		66.848.853.011	65.419.511.595	
BPHTB-Pemindahan Hak		9.709.967.000	9.709.967.000	
PBJT		0	63.412.665.246	
Retribusi Daerah	3.677.854.568	86.497.854.568	126.512.187.027	122.834.332.459
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.205.924.568	84.015.924.568	124.232.267.027	
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	830.000.000	1.840.000.000	1.637.990.000	
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	641.930.000	641.930.000	641.930.000	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.075.813.311	4.075.813.311	4.075.813.311	0

URAIAN	Anggaran Tahun 2024			BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	RKPD Murni 2024	APBD MURNI 2024	Perubahan RKPD 2024	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.075.813.311	4.075.813.311	4.075.813.311	
Lain-lain PAD yang Sah	83.431.043.955	7.581.043.955	17.101.812.892	-66.329.231.063
Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar dan Bangunan Gedung	220.000.000	220.000.000	1.650.000.000	
Hasil Sewa BMD	2.150.401.068	1.150.401.068	1.108.318.568	
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.268.533.966	4.268.533.966	4.268.533.966	
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0	0	8.483.606.557	
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	538.277.670	538.277.670	538.277.670	
Pendapatan Denda Pajak	442.290.000	442.290.000	90.534.880	
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0	1.000.000	
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	761.541.251	761.541.251	761.541.251	
Pendapatan BLUD	75.000.000.000	150.000.000	150.000.000	
PENDAPATAN TRANSFER	1.724.715.223.683	2.124.425.955.595	2.456.035.969.439	731.320.745.756
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.478.048.697.663	1.752.568.485.595	2.084.178.499.439	606.129.801.776
DBH, DAU, DAK	1.478.048.697.663	1.745.873.133.595	2.077.483.147.439	
Insentif Fiskal		6.695.352.000	6.695.352.000	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	246.666.526.020	371.857.470.000	371.857.470.000	125.190.943.980
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		238.874.730.000	238.874.730.000	
Bantuan Keuangan		132.982.740.000	132.982.740.000	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.400.035.060	10.155.118.527	10.169.405.625	2.769.370.565
Pendapatan Hibah	1.684.139.648	1.684.139.648	1.684.139.648	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.715.895.412	8.470.978.879	8.485.265.977	
Jumlah Pendapatan	1.955.661.674.692	2.379.581.074.122	2.762.535.342.457	806.873.667.765
BELANJA DAERAH	2.080.661.674.692	2.840.317.411.456	3.342.796.039.593	1.262.134.364.901
Belanja Operasi	1.549.322.029.952	2.023.295.669.879	2.100.527.700.954	
Belanja Modal	524.839.644.740	810.521.741.577	1.238.634.522.283	
Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000	6.500.000.000	3.633.816.356	
Jumlah Belanja	2.080.661.674.692	2.840.317.411.456	3.342.796.039.593	1.262.134.364.901
Total Surplus/(Defisit)	-125.000.000.000	-460.736.337.334	-580.260.697.136	
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.000.000.000	485.736.337.334	605.260.697.136	480.260.697.136
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	125.000.000.000	485.736.337.334	605.260.697.136	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah		25.000.000.000	25.000.000.000	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Pembiayaan Netto	125.000.000.000	460.736.337.334	580.260.697.136	455.260.697.136
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	125.000.000.000	435.736.337.334	605.260.697.136	480.260.697.136

URAIAN	Anggaran Tahun 2024			BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	RKPD Murni 2024	APBD MURNI 2024	Perubahan RKPD 2024	
Total APBD	2.080.661.674.692	2.865.317.411.456	3.367.796.039.593	1.287.134.364.901

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD Perubahan 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 serta program strategis nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Bontang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan tahun ke-3 (ketiga) dari RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Penjabaran pelaksanaan pembangunan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mewujudkan pencapaian target kinerja pembangunan yang telah dituangkan di dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan Kota Bontang yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 yaitu: “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”. Visi pembangunan tersebut pada esensinya adalah cita-cita untuk mewujudkan Kota Bontang yang lebih berkembang pada seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan, sehingga hasil pembangunan lebih dirasakan dampak dan manfaatnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

Kota Bontang yang Lebih Hebat merupakan suatu harapan dan cita-cita bahwa Kota Bontang dapat menjadi Kota yang lebih meningkat kualitas tata kelola pemerintahannya, lebih meningkat kualitas penataan sarana dan prasarana kotanya, lebih meningkat perekonomian, kehidupan sosial dan budaya kotanya, lebih berkelanjutan daya dukung lingkungannya, lebih unggul SDM-nya dan lebih sejahtera masyarakatnya. Harmonisasi dari pencapaian seluruh cita-cita pembangunan tersebut pada esensinya merupakan tekad untuk mewujudkan Kota Bontang yang Hebat Pemerintahannya, Hebat Kotanya dan Hebat Masyarakatnya. Hebat Pemerintahannya merupakan komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hebat Kotanya ditujukan untuk mewujudkan Kota Bontang dengan penataan sarana dan prasarana kota yang mantap dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Bontang yang hebat akan mendorong peningkatan produktivitas kota dan warganya secara berkelanjutan. Hebat Masyarakatnya dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang harmoni dengan keberagamannya, masyarakat yang aktif dan peduli terhadap pembangunan

kotanya, dan masyarakat dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kota Bontang yang Beradab merupakan perwujudan kota dengan masyarakat yang Beradab, yaitu ‘maju tingkat penghidupannya’ pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu mewujudkan Kota Bontang yang Beradab akan sangat berkaitan dengan membangun karakter dan budaya masyarakat yang produktif dan berakhlak mulia sebagai pondasi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, dirumuskanlah 3 (tiga) misi pembangunan, yaitu :

- a. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.
- b. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.
- c. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Gambar 4. 1 Visi dan Misi Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021-2026

Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Bontang sebagaimana yang termuat di dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, serta untuk mejamin keselarasan pembangunan maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target RPJMD Th ke-3	Target RKPD 2024	Realisasi TW IV Tahun 2023	Target dalam P-RKPD 2024
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan								
T1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, amanah dan bertanggung jawab	Indeks Kepemimpinan Daerah			82	82	N/A	0
		S.1	Meningknya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks reformasi birokrasi	BB(70,41)	BB (70,41)	BB (71,21)	BB (72,41)*
				Nilai LPPD	Tinggi (4,00)	Tinggi (4,00)	Sedang (3,379)	Tinggi (4,00)
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
		S.2	Meningkatnya Kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	7	7	7	6
				Persetase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum (%)	100	100	100	100
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup								
T2	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)			69,69	69,69	65,49	71,025
		S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan (Nilai)	72,98	72,98	64,16	72,98
		S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	66,41	66,41	66,81	66,82
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup								

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target RPJMD Th ke-3	Target RKPD 2024	Realisasi TW IV Tahun 2023	Target dalam P- RKPD 2024
T3	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi - 67 -eseh dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks gini				0,3	0,3	0,299	0,295
			S.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan ekonomi Non migas (%)	5,3	5,3	4,41	4,41-5,3*
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia									
T4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				81	81,05	81,56	81,05
			S.6	Meningkatnya akses layanan - 67 -esehatan- 67 - dan - 67 -esehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah (tahun)	13,54	13,54	13,43	13,54
					Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,64	11,64	10,92	11,64
					Usia harapan hidup (tahun)	74,56	74,56	74,81	74,85*
			S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka (%)	8,5	7,35	7,74	7,35*
			S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Angka kemiskinan (%)	3,9	4,25	4,11	3,9*

* Indikator yang mengalami penyesuaian target

Pada tabel di atas, terdapat beberapa indikator tujuan dan sasaran yang dilakukan penyesuaian target, yaitu :

1. Indikator pada Sasaran 1, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dilakukan penyesuaian karena capaian IRB pada tahun 2023 yang lalu telah melampaui target di tahun 2024. Sehingga target IRB naik menjadi 72,41 dengan kategori Sedang.
2. Indikator pada Sasaran 3, yaitu Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penyesuaian dilakukan karena capaian IKLH pada tahun 2023 dengan nilai 66,81 telah melampaui target di 2024 yang semula ditargetkan 66,41. Untuk itu IKLH di dalam Perubahan RKPD 2024, ditargetkan menjadi 69,07.
3. Indikator pada Sasaran 5, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi NonMigas. Penyesuaian dilakukan karena pertumbuhan ekonomi non migas selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar. Oleh sebab itu pada Perubahan RKPD Tahun 2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi NonMigas ditargetkan menjadi 4,41 persen sampai 5,3 persen.
4. Indikator pada Sasaran 6, yaitu Indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Penyesuaian dilakukan karena pada tahun 2023, UHH telah tercapai sebesar 74,81 tahun dari target sebelumnya sebesar 74,56 tahun di tahun 2024.
5. Indikator Sasaran 7, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada tahun 2023, TPT tercapai dengan angka 7,74 persen. Lebih rendah 0,76 persen dari target 2024 yaitu sebesar 8,5 persen. Untuk itu TPT kan disesuaikan targetnya menjadi 7,35 persen, sesuai dengan target di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.
6. Indikator Sasaran 8, yaitu Angka Kemiskinan. Pada tahun 2023 yang lalu, relaisasi Angka Kemiskinan turun menjadi 4,11. Pada RKPD Kota Bontang Tahun 2024, Angka kemiskinan di targetkan 4,25. Karena target di tahun 2024 telah terlampaui, maka target Angka Kemiskinan pada tahun 2029 disesuaikan mengikuti target di dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026, yaitu 3,9 persen.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2024 disamping mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan RPJPD dan arahan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026, secara vertikal juga harus mejadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Arah kebijakan pembangunan nasional yang dituangkan di dalam RKP tahun 2024 menetapkan tema pembangunan **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Adapun Arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan Tema RKPD 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. penguatan daya saing usaha;
5. pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta
8. pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Selanjutnya 8 arah kebijakan dan strategi nasional tahun 2024 tersebut dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional RKP Tahun 2024, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya dalam lingkup regional Kalimantan Timur, perencanaan pembangunan tahun 2024 mengusung tema **“Peningkatan Daya Saing SDM, Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan daerah:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik; dan
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Pada skala daerah, maka tema pembangunan Kota Bontang dalam RKPD tahun 2024 diselaraskan dengan tema RKP tahun 2024 dan tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Adapun tema pembangunan dalam RKPD Kota Bontang tahun 2024 adalah **“Peningkatan SDM Unggul, Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Penataan Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan Untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-

2026, maka ditetapkan 4 Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Bontang tahun 2024, yaitu:

- Prioritas Daerah 1 : Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Yang Berdaya Saing Dan Sejahtera.
- Prioritas Daerah 2 : Penguatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Berbasis pada Ekonomi Lokal Dan Keragaman Sosial Budaya Masyarakat.
- Prioritas Daerah 3 : Penataan Infrastruktur Perkotaan dan lingkungan hidup Yang Mendorong Daya Saing Daerah.
- Prioritas Daerah 4 : Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani

Selanjutnya Prioritas Daerah sebagaimana di atas, dilaksanakan melalui Program-Program Prioritas Daerah, salah satunya adalah melalui Program Unggulan Kepala Daerah, yang diarahkan pada 4 tema, yaitu:

1. Program Unggulan Bontang KITA (Kolaborasikan Ide Satukan Aksi), yang dimaksudkan untuk mempromosikan kebijakan pembangunan kolaboratif untuk memperkuat kerjasama dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yang dilandasi oleh semangat dan rasa memiliki terhadap Kota Bontang. Program Unggulan Bontang KITA dijabarkan ke dalam beberapa program unggulan, yaitu:
 - a. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1) Pemantapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 - 2) peningkatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;
 - 3) Peningkatan pelayanan publik;
 - b. Program Kompak (Kolaborasi Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat), diarahkan untuk mengkolaborasikan program pemerintah dengan *stakeholders* dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari perusahaan kepada masyarakat sekitar;
 - c. Program ASN Unggulan; diterjemahkan ke dalam beberapa program *dedicated*, yaitu:
 - 1) Beasiswa bagi ASN;
 - 2) peningkatan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun.
 - d. Program Stimulan RT, diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan dengan focus pada upaya pemberdayaan sosial, ekonomi dan lingkungan yang bersifat produktif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Program Bontang Bebas Kuota (Bontang Bebas Wifi), diarahkan untuk memberikan akses internet kepada masyarakat di ruang publik.
2. Program Unggulan Bontang BARU (Bersih, Asri, Lestari dan Maju), merupakan program untuk mewujudkan wajah baru Kota Bontang yang Lebih Hebat yakni Kota Bontang Lebih Bersih, Lebih Asri, Lebih Lestari dan Lebih Maju Kotanya menuju Kota Berkelanjutan yang nyaman, cerdas dan layak huni. Program Unggulan Bontang BARU dijabarkan ke dalam beberapa program unggulan, yaitu:
 - a. Program Pengendalian Banjir; yang dilaksanakan melalui beberapa program *dedicated*, yaitu:
 - 1). Kerjasama penanganan banjir antar daerah dalam penanganan daerah hulu, antara lain: pembangunan Bendali Suka Rahmat, dan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan fungsi Waduk Kanaan.
 - 2). Revitalisasai Waduk Kanaan;

- 3). Normalisasi sungai-sungai di Kota Bontang;
- 4). Normalisasi dan optimalisasi sistem drainase perkotaan;
- 5). Penataan bantaran sungai;
- 6). Pembangunan 3 polder pengendalian banjir.
- b. Program Penataan Sarana dan Prasarana Kota Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1). Peningkatan dan penataan ruang terbuka hijau;
 - 2). Pelayanan sanitasi dan air bersih;
 - 3). Pembangunan jalan alternatif/jalan lingkar.
3. Program Unggulan Bontang Bangkit, memiliki makna “Bangkit dan Maju Ekonominya” yang bertujuan untuk lebih membangkitkan dan memajukan perekonomian Kota Bontang. Program Unggulan Bontang Bangkit dijabarkan ke dalam beberapa program unggulan, yaitu:
 - a. Program Peningkatan Investasi, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated* yaitu:
 - 1) Pembangunan mall pelayanan publik;
 - 2) Pengembangan pelayanan melalui Anjungan Pelayanan Mandiri;
 - 3) Pengembangan;
 - b. Program Pengembangan Pariwisata dan Budaya, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1) Penataan objek-objek pariwisata;
 - 2) Penyelenggaraan festival seni dan budaya;
 - 3) Merevitalisasi cagar budaya;
 - 4) Pengembangan Kawasan seni dan budaya.
 - c. Program Pengembangan UMKM, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1) Pengembangan dan penguatan UMKM;
 - 2) Moratorium pemberian izin took modern (waralaba);
 - 3) Pengembangan usaha perikanan; pertanian dan peternakan;
 - 4) Pengembangan 1 RT 1 Kelompok Usaha berupa usaha ekonomi, ekonomi kreatif atau urban farming.
4. Program Unggulan Bontang Unggul, bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul, SDM yang unggul dan masyarakat yang sejahtera. Program Unggulan Bontang Unggul diterjemahkan ke dalam beberapa program unggulan sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:
 - 1) Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan;
 - 2) Pemberian perlengkapan belajar bagi siswa SD sampai SLTP;
 - 3) Penyediaan 500 beasiswa stimulant/penuh bagi siswa dan mahasiswa;
 - 4) Peningkatan 2 event kompetisi/lomba olahraga prestasi dan rekreasi bagi siswa;
 - 5) Pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat;
 - 6) Bantuan biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat peserta kelas III non PBI;
 - 7) Pembangunan Emergency Call (Call Center 112);
 - 8) Pelayanan dokter kunjung bagi pasien jompo dan miskin;
 - 9) Penguatan kemitraan pemerintah dengan RS Swasta dalam pelayanan Kesehatan;
 - 10) Peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja;
 - 11) Peningkatan kompetensi bagi keluarga miskin;
 - 12) Pembangunan Rumah Kreasi Milenial sebagai sarana pengembangan kreasi bagi pemuda;
 - 13) Peningkatan dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan; dan

- 14) Pembangunan Kawasan pusat pengembangan kaeagamaan.
- b. Program Bantuan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan *dedicated*, yaitu:

1) Perluasan cakupan dan ragam bantuan pangan;

2) Pengembangan kelompok usaha masyarakat bagi 100 kelompok keluarga miskin;

3) Bantuan makanan siap santap untuk lansia miskin tanpa keluarga;

Prioritas pembangunan Kota Bontang telah diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tercantum di dalam RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Bontang dengan prioritas Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Nasional disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bontang dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun dan Prioritas Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Kota Bontang	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Nasional
Penguatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Berbasis pada Ekonomi Lokal Dan Keragaman Sosial Budaya Masyarakat.	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertical dan horizontal pada sektor unggulan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin Terutama Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;	• Pengurangan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Penataan Infrastruktur Perkotaan dan lingkungan hidup Yang Mendorong Daya Saing Daerah.	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembengan Ekonomi dan Pelayan Dasar
	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hdup secara berkelanjutan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Yang Berdaya Saing Dan Sejahtera	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;	Meningkatkan Sumber daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainna;	
Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik; dan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Target Indikator Makro pada Perubahan RKPD 2024 mengalami penyelarasan dengan target indicator makro nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun persandingan target pembangunan daerah dengan target pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan target pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang dalam Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024

		Kota Bontang	Prov. Kaltim	Nasional
LPE	RKPD 2024	2,65	4 - 5	5,3 - 5,9
	P-RKPD 2024	2,65-4,5		
IPM	RKPD 2024	81,05	78,14	73,29-73,35
	P-RKPD 2024	81,05		
Kemiskinan	RKPD 2024	4,25	5,78	73,29-73,35
	P-RKPD 2024	3,9		
TPT	RKPD 2024	7,35	5,46	5,3-6,0
	P-RKPD 2024	7,35		
Gini Ratio	RKPD 2024	0,32	0,307	0,375-0,378
	P-RKPD 2024	0,295		

Prioritas pembangunan daerah yang akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD. Implementasi dari program-program prioritas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024.

Relevansi antara pencapaian sasaran, prioritas pembangunan dan program prioritas tahun 2023 disajikan dalam matrik berikut:

Tabel 4. 4 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Bontang Tahun 2024

Prioritas Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program Prioritas	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Prioritas Daerah 1: Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	79,56%	87,00%	87,00%	PD Penanggung jawab urusan Pekerjaan Umum
		Persentase kapasitas aliran sungai	70,73%	69,00%	70,73%	
		Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi	85,17%	87,36%	87,36%	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	97,92%	95,00%	97,92%	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	94,76%	93,22%	94,76%	PD Penanggun jawab urusan perumahan, kawasan permukiman
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	93,48%	93,58%	93,58%	
		Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	60%	66,00%	66,00%	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase sempadan sungai yang tertata	15,61%	15,46%	15,61%	Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Fasilitas Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	25%	100%	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Kehati	55,00%	69,49%	69,49%	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan IzinPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	96,15%	96,00%	96,15%	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	99,41%	96,00%	99,41%	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	100%	100%	100%	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup

Prioritas Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program Prioritas	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	100%	100%	100%	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan kasus	100%	100%	100%	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	20,00%	80,00%	80,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	tidak dilaksanakan	tidak dilaksanakan	tidak dilaksanakan	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian tata ruang	94,17%	89,20%	94,17%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum layak	85,72%	83,99%	85,72%	Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,02%	96,50%	96,50%	Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	30,11%	100,00%	100%	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/ TPS	41,88%	38,00%	41,88%	Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	88,46%	90,02%	90,02%	Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	80,42%	92,82%	92,82%	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	68,03%	28,00%	68,03%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Penanggulangan Bencana
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100%	100,00%	100,00%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Sosial
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana lalu lintas jalan yang layak fungsi	98,23%	72,00%	98,23%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan pemenuhan standar fasilitas pelayaran	100%	58,00%	100%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Perhubungan

Prioritas Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program Prioritas	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	95,50%	100,00%	100,00%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sub Urusan Pemadam Kebakaran
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	57,35%	70,49%	70,49%	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
Prioritas Daerah 2: Peningkatan pelayanan publik dalam mendukung kemandirian fiskal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM	B (89,3)	B (89,3)	B (89,3)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD	113,23%	100%	113,23%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Keuangan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana lalu lintas jalan yang layak fungsi	98,23%	72,00%	98,23%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perhubungan
	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100%	100,00%	100%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Pertanian
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	21.915,8 Ton	21.511 Ton	21.915,8 Ton	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Perikanan&Kelautan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	B (88,20)	B (87,00)	B (88,20)	Sekretariat Daerah
		Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	96,00%	97,00%	97,00%	Kecamatan
		Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	96,00%	97,00%	97,00%	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	100%	100%	Kecamatan
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk berKTP per satuan Penduduk	0,99	0,99	0,99	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	0,96	0,96	0,96	
		Rasio pasangan berakte nikah	0,7	0,73	0,73	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	96,00	96,00	96,00	

Prioritas Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program Prioritas	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Prioritas Daerah 3: pengembangan daya saing investasi, pariwisata dan UMKM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	Rp 1.763.829.000.000,-	Rp 4.375.000.000.000,-	Rp 4.375.000.000.000,-	PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investor	285 investor	2 investor	285 investor	PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	40,00%	50,00%	50,00%	PD Penanggung Jawab Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	75,00%	84,00%	84,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	346.647orang	386.636 orang	386.636 orang	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelestarian budaya	100%	100%	100%	PD Penanggung Jawab Urusan Kebudayaan
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjalिन Kemitraan Usaha	3,57%	3,58%	3,58%	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi & UMKM
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	tidak dilaksanakan	19,74%	19,74%	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi & UMKM
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	47,00%	8,97%	47,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi & UMKM
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	66,60%	7,50%	66,60%	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi & UMKM
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase kapasitas SDM koperasi	51,12%	19,23%	51,12%	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi & UMKM
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Tingkat pertumbuhan penyaluran dan koperasi	tidak dilaksanakan	7,50%	7,50%	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi & UMKM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	100%	100%	100%	PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penerapan standardisasi dan perlindungan konsumen	69,83%	64,00%	69,83%	PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perijinan	tidak dilaksanakan	37,50%	37,50%	PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	tidak dilaksanakan	100,00%	100,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan

Prioritas Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program Prioritas	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas	0,50%	0,50%	0,50%	PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	100%	tidak dilaksanakan	tidak dilaksanakan	PD Penanggung Jawab Urusan Kebudayaan
	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	2,06%	0,50%	2,06%	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi & UMKM
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	0,74%	2,00%	2,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Industri
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	0,47%	2,00%	2,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Industri
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen produk	5,58%	1,52%	5,58%	PD Penanggung Jawab Urusan Industri
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	21.915,8 ton	21.511 ton	21.915,8 ton	PD Penanggung Jawab Urusan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	3.562,23 ton	3300 ton	3.562,23 ton	PD Penanggung Jawab Urusan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	22,00%	29,00%	29,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Perikanan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	100%	100,00%	100,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	60,00%	80,00%	80,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100%	100,00%	100,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Perikanan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	100,00%	100,00%	100,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Peternakan
		Cakupan pembinaan pelaku usaha olahan peternakan	67,00%	80,00%	80,00%	
	Program Peningkatan Difersifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	89,8	89	89,8	PD Penanggung Jawab Urusan Ketahanan Pangan
		Ketersediaan Energi dan Protein	AKE = 2.486,48 kkal/kapita/hari AKP=99,62gram/kapita/hati	AKE= 2.400 kkal/kapita/hari AKP = 63 gram/kapita/hari	AKE = 2.486,48 kkal/kapita/hari AKP=99,62gram/kapita/hati	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100%	100%	100%	Kecamatan

Prioritas Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program Prioritas	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Prioritas daerah 4: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD (Paket setara SD)	103,49	104,25	104,25	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SMP (Paket setara SMP)	105,7	103,46	105,7	
		APK PAUD	81,07	83.49.00	83.49.00	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid	616,74	513,2 rasio	616,74	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100%	100%	100%	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki izin	100%	100,00%	100,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100%	100,00%	100,00%	Sekretariat Daeh
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pemustaka Perpustakaan	79.462 orang	42,350 orang	79.462 orang	PD Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	119,19	95,00	0	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
		Cakupan kepesertaan JKN	100%	100%	100%	
		Ketersediaan obat esensial (%)	100%	100%	100%	
		Angka kematian bayi	13,48%	11%	0%	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	97,08%	100%	100%	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga Kesehatan berizin (Dinkes)	100%	100%	100%	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	67,00%	45,00%	67,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,65	1,9	1,9	PD Penanggung Jawab Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program Prioritas	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rasio Akseptor KB	57	71,00	71,00	PD Penanggung Jawab Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangga kencana	97,16%	77,00%	97,16%	PD Penanggung Jawab Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Prioritas daerah 5: Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,02%	96,50%	96,50%	Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum
	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	68,42%	72,06%	72,06%	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	0,79%	2,59%	2,59%	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	100%	100%	100%	
	Program pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100%	100%	100%	Kecamatan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	80,42%	81,50%	81,50%	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase implementasi Kebijakan bidang ketenagakerjaan	92,31%	tidak dilaksanakan	tidak dilaksanakan	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase produktifitas tenaga kerja	14,13%	100,00%	100,00%	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
		Persentase pencari kerja yang dilatih	5%	5,09%	5,09%	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	28,35%	21,00%	28,35%	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	2,33%	4,43%	2,33%	PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sejalan dengan sasaran dan prioritas daerah dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 hingga triwulan kedua, rencana kerja dalam perubahan RKPD dijabarkan ke dalam program/kegiatan dan pendanaanya. Prioritas pembangunan Kota Bontang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sepenuhnya masih mengacu pada prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 murni. Mengingat bahwa kebutuhan belanja pembangunan selalu melampaui kemampuan pendanaan yang tercermin dari perkiraan pendapatan daerah, maka program dan kegiatan yang dijabarkan yang mengalami penambahan, pergeseran, maupun merupakan usulan baru sepenuhnya mengacu pada prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah, kondisi sosial politik dan ekonomi, aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023, penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2024, di dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diusulkan anggaran belanja sebesar Rp. 3.342.742.039.593,00. Adapun rincian anggaran terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Pagu Perangkat Daerah pada RKPD Perubahan 2024

Perangkat Daerah	RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	420.973.229.418	497.508.688.082	593.301.978.963
Dinas Kesehatan	148.861.394.934	264.908.580.359	271.232.724.762
Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	173.799.823.814	176.216.180.821	234.594.523.758
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	355.649.311.019	599.558.753.403	873.421.614.190
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	61.909.598.473	100.520.425.785	105.870.008.285
Satuan Polisi Pamong Praja	17.653.534.298	18.613.853.555	18.813.853.555
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.799.807.069	13.384.560.818	14.084.560.818
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35.338.692.051	35.390.025.884	36.474.445.884
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	20.720.352.002	25.709.010.751	28.393.510.751
Dinas Ketenagakerjaan	18.579.094.410	27.666.123.193	28.439.623.193
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	17.551.192.800	24.421.518.058	25.263.518.058
Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian	32.443.255.587	40.347.996.296	40.871.216.296
Dinas Lingkungan Hidup	54.879.719.313	61.697.455.319	63.751.455.319
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.043.386.591	16.733.787.016	17.370.694.181
Dinas Perhubungan	30.166.485.950	39.218.139.396	44.079.139.396
Dinas Komunikasi dan Informatika	25.003.600.242	38.416.845.878	39.664.845.878
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	44.170.370.393	59.138.558.946	60.007.858.946

Perangkat Daerah	RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.701.460.792	17.303.590.152	20.103.590.152
Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	54.182.610.777	87.084.048.062	89.244.048.062
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.458.417.563	24.696.468.989	25.096.468.989
Sekretariat Daerah	124.897.834.961	151.110.280.870	176.879.271.944
Sekretariat DPRD	70.732.147.929	92.209.016.553	96.603.649.260
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	20.905.955.108	24.804.631.453	26.807.181.453
Badan Pendapatan Daerah	20.348.956.154	20.431.372.343	21.786.106.469
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35.206.936.433	39.523.237.288	36.747.273.644
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.332.359.622	26.803.355.190	28.436.323.190
Inspektorat Daerah	20.872.427.057	22.327.174.113	23.645.174.113
Kecamatan Bontang Utara	68.450.628.008	102.864.869.879	102.996.017.080
Kecamatan Bontang Selatan	67.479.570.061	104.316.839.209	104.407.039.209
Kecamatan Bontang Barat	36.251.192.739	46.855.994.178	46.917.094.178
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.298.329.124	40.536.029.617	47.491.229.617
TOTAL	2.080.661.674.692	2.840.317.411.456	3.342.796.039.593

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD (Paket setara SD)	104,25 persen	104,25 persen			
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	56 sekolah	56 sekolah			
1.01.02.2.0103 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	4,264,090,000	3,532,736,000	3,625,283,000
1.01.02.2.0105 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	7 Ruang	-	2,521,680,000	2,521,680,000
1.01.02.2.0106 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Usulan Pokir	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	9 Unit	2,397,703,000	10,091,208,615	10,854,058,615
1.01.02.2.0109 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	150,000,000	-	
1.01.02.2.0114 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	2,976,400,000	10,131,401,752	12,131,401,752
1.01.02.2.0116 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1 Usulan Pokir	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	11 Paket	2,123,500,000	7,605,583,586	8,987,082,248
1.01.02.2.0119 Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	4 Unit	781,890,000	435,700,000	435,700,000
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6840 Peserta Didik	6840 Peserta Didik	42,417,183,080	2,502,938,000	2,567,248,000
1.01.02.2.0125 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	739,015,288	1,326,372,090	1,626,072,090
1.01.02.2.0126 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	667 Orang	667 Orang	29,184,491,658	7,617,491,658	7,784,957,658
1.01.02.2.0127 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	54 Orang	54 Orang	226,499,806	2,667,589,806	2,667,589,806
1.01.02.2.0128 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	56 Satuan Pendidikan	56 Satuan Pendidikan	99,983,794	428,125,796	428,125,796
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	25 Satuan Pendidikan	-	8,390,850,000	8,390,850,000
1.01.02.2.0136 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	1 Konten Digital	-		313,930,126
1.01.02.2.0141 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	2 Komunitas	-		1,093,790,000
1.01.02.2.0143 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	1 Kegiatan	-		918,136,000
1.01.02.2.0146 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	18583 Paket	18583 Paket	13,601,390,690	13,833,758,547	13,833,758,547
1.01.02.2.0147 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	6 Ruang	19,353,602,000	38,261,964,868	38,887,311,868
1.01.02.2.0148 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Usulan Pokir	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	4 Unit	150,000,000	810,000,000	1,060,000,000
1.01.02.2.0149 Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	500 Orang	490,960,052	5,008,682,436	5,208,682,436
1.01.02.2.0151 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	200,000,000	890,000,000	1,386,450,000
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang dikelola	27 sekolah	27 sekolah			
1.01.02.2.0203 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	200,000,000	-	
1.01.02.2.0212 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Usulan Pokir	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	98 Unit	200,000,000	2,471,299,000	2,471,299,000
1.01.02.2.0214 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	12 Ruang	-	3,643,458,500	3,909,858,500
1.01.02.2.0224 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	2 Unit	200,000,000	630,050,000	630,050,000
1.01.02.2.0225 Pengadaan Mebel Sekolah 1 Usulan Pokir	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1,989,220,000	6,524,423,544	7,899,330,882
1.01.02.2.0227 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	11 Paket	903,220,000	6,308,345,868	6,308,345,868
1.01.02.2.0230 Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	400,000,000	230,000,000	230,000,000
1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3600 Peserta Didik	3600 Peserta Didik	35,126,521,493	2,708,600,000	2,374,470,000
1.01.02.2.0235 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 Usulan Pokir	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	199,876,353	199,876,353	199,876,353
1.01.02.2.0238 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	710,008,286	2,132,532,094	2,732,532,094
1.01.02.2.0239 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	363 Orang	363 Orang	26,341,000,000	4,653,050,000	4,713,332,000
1.01.02.2.0240 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	38 Orang	38 Orang	801,447,506	1,892,355,506	2,200,385,506
1.01.02.2.0241 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	199,879,911	260,429,921	260,429,921
1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	20 Satuan Pendidikan	-	4,556,200,000	4,556,200,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.01.02.2.0254 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	-	719,662,000
1.01.02.2.0259 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	2 Ruang	9,460,500,000	13,754,982,000	13,847,529,000
1.01.02.2.0260 Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50 Orang	208,207,642	4,065,868,257	4,565,868,257
1.01.02.2.0262 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	8,490,600,902	7,116,757,670	7,116,757,670
1.01.02.2.0263 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 1 Usulan Pokir	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan PAUD yang dikelola	149 sekolah	149 sekolah			
1.01.02.2.0302 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	- 1 Unit	1 Unit	-	266,226,000	266,226,000
1.01.02.2.0303 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000
1.01.02.2.0304 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	200,000,000	575,689,558	575,689,558
1.01.02.2.0311 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- 3732 Peserta Didik	3732 Peserta Didik	-		1,154,850,000
1.01.02.2.0315 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	789 Orang	789 Orang	9,470,261,808	8,513,090,808	38,786,158,908
1.01.02.2.0316 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	38 Orang	150 Orang	200,000,000	3,879,546,000	3,879,546,000
1.01.02.2.0317 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	149 Satuan Pendidikan	149 Satuan Pendidikan	350,006,333	350,006,127	840,477,942
1.01.02.2.0318 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	149 Satuan Pendidikan	143 Satuan Pendidikan	200,000,034	4,537,459,912	4,537,459,912
1.01.02.2.0319 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	38 Orang	38 Orang	350,000,000	349,999,685	349,999,685
1.01.02.2.0339 Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang	500,000,000	-	201,378,000
1.01.02.2.0341 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	2,466,116,084	2,466,115,890	6,103,099,030
1.01.02.2.0342 Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	400,000,000	400,000,000	400,000,000
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola	50 sekolah	50 sekolah			
1.01.02.2.0410 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	- 1528 Peserta Didik	1528 Peserta Didik	-		621,200,000
1.01.02.2.0416 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	114 Satuan Pendidikan	114 Satuan Pendidikan	499,999,675	499,999,263	749,999,263
1.01.02.2.0417 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	15 Satuan Pendidikan	-	1,415,820,000	1,415,820,000
1.01.02.2.0446 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	18 Peserta Didik	18 Peserta Didik	49,995,350	49,994,607	49,994,607
1.01.02.2.0449 Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	150,000,000	230,000,000	230,000,000
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	20 persen	20 persen			
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	2 kurikulum	2 kurikulum			
1.01.03.2.0102 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	10,533,988	7,134,000	7,134,000
1.01.03.2.0103 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1000 Buku	1000 Buku	198,235,365	393,210,730	393,210,730
1.01.03.2.0104 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	300 Orang	300 Orang	15,278,000	14,268,000	14,268,000
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD PNF yang ditetapkan	1 kurikulum	1 kurikulum			
1.01.03.2.0206 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	30,999,850	884,264,046	1,266,769,046
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru murid	513,2 rasio	513,2 rasio			
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Rasio guru/murid per kelas rata- rata	84,14 persen 51,32 rasio	84,14 persen 51,32 rasio			
1.01.04.2.0101 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	2 Dokumen	199,986,057	28,056,389,572	28,056,389,572
1.01.04.2.0102 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan	449,402,000	700,070,000	700,070,000
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki izin	100 persen	100 persen			
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin Operasional Satuan PAUD PNF yang terbit	16 Dokumen	16 Dokumen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.01.05.2.0202 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	16 Dokumen	16 Dokumen	49,999,998	49,999,679	49,999,679
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen			
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
1.01.01.2.0201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	778 Orang/bulan	778 Orang/bulan	143,685,328,802	156,885,011,791	197,756,943,299
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadministrasikan	74.951 Unit	74.951 Unit			
1.01.01.2.0301 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	178,669,780	178,669,780
1.01.01.2.0302 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,999,999	-	
1.01.01.2.0303 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22,740,000	-	
1.01.01.2.0304 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	-	
1.01.01.2.0305 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	-	
1.01.01.2.0306 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,997,167	-	
1.01.01.2.0307 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	-	
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 laporan	1 laporan			
1.01.01.2.0502 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	471,691,020	999,913,650	2,732,273,866
1.01.01.2.0503 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	-	
1.01.01.2.0504 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	4,999,991	255,996,000	255,996,000
1.01.01.2.0505 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	9,300,000	-	
1.01.01.2.0509 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	154 Orang	154 Orang	1,526,874,985	8,526,741,448	12,789,983,022
1.01.01.2.0510 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	98,735,444	108,638,635	108,638,635
1.01.01.2.0511 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang	208,910,189	-	
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	1 laporan	1 laporan			
1.01.01.2.0601 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	220,048,400	162,439,190	162,439,190
1.01.01.2.0602 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	727,306,741	14,013,876,217	16,203,614,859
1.01.01.2.0603 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	149,993,328	158,005,789	176,947,579
1.01.01.2.0604 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	69,999,983	71,280,005	99,257,955
1.01.01.2.0605 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	189,955,195	1,237,097,371	1,237,097,371
1.01.01.2.0606 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	104,999,547	111,671,929	111,671,929
1.01.01.2.0607 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99,999,998	-	
1.01.01.2.0608 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	192,893,460	192,893,460	192,893,460
1.01.01.2.0609 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1,538,107,790	1,538,263,790	1,538,263,790
1.01.01.2.0610 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	248,910,000	348,966,000	348,966,000
1.01.01.2.0611 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	-	
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	14 unit	14 unit			
1.01.01.2.0701 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	412,080,000	1,072,797,000	660,717,000
1.01.01.2.0702 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	946,860,000	2,846,570,000	3,480,729,040
1.01.01.2.0705 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	24,987,835	-	
1.01.01.2.0706 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	9,999,964	-	
1.01.01.2.0707 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30,000,000	-	
1.01.01.2.0708 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	24,997,234	-	
1.01.01.2.0709 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	18,674,331,000	6,963,082,600	1,594,470,917
1.01.01.2.0710 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	29,350,121	-	
1.01.01.2.0711 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	29,329,110	-	
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	4 Laporan	4 Laporan			
1.01.01.2.0801 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	31,290,625	73,300,125	119,146,837

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.01.01.2.0802 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	589,133,133	721,614,702	721,614,702
1.01.01.2.0803 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	697,302,000	1,915,980,200	2,254,180,200
1.01.01.2.0804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12,142,990,500	11,717,363,064	11,717,363,064
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	250 unit	250 unit			
1.01.01.2.0901 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	99,952,167	319,081,500	319,081,500
1.01.01.2.0902 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	41 Unit	495,713,094	414,741,300	414,741,300
1.01.01.2.0905 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	104,999,676	104,812,500	-
1.01.01.2.0907 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	19,999,985	35,585,000	35,585,000
1.01.01.2.0908 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	57,106,000	57,106,000	57,106,000
1.01.01.2.0909 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	379,972,500	379,972,500	358,393,573
1.01.01.2.0910 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	209,990,898	209,990,898	141,185,085
1.01.01.2.0911 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukng Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	273,398,125	273,398,125	273,559,000
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2.22.02.2.0101 Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	6 Objek	2,050,005,565	3,743,981,698	3,328,344,117
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2.22.02.2.0201 Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	707,533,030	2,078,033,962	2,078,033,962
2.22.02.2.0202 Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1 Laporan	127,109,950	1,423,490,000	2,745,930,000
2.22.02.2.0203 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	5 Sertifikat	5 Sertifikat	110,201,715	115,466,825	115,466,825
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2.22.02.2.0303 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 Unit	2 Unit	2,849,984,584	15,926,241,580	15,612,780,230
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2.22.03.2.0101 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 1 Usulan Pokir	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	350 Orang	350 Orang	774,652,031	1,875,990,374	1,738,539,619
2.22.03.2.0103 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	370,408,068	1,749,804,453	1,749,804,453
1.01.2.22.0.0101 SDN 001 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	540 Peserta Didik	540 Peserta Didik	219,990,951	254,915,103	331,565,103
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	481,650,000	481,650,000
1.01.2.22.0.0102 SDN 002 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	475 Peserta Didik	475 Peserta Didik	192,769,408	237,998,206	285,598,206
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	441,750,000	441,750,000
1.01.2.22.0.0103 SDN 003 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	620 Peserta Didik	620 Peserta Didik	255,167,984	332,499,624	398,999,624
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	625,100,000	625,100,000
1.01.2.22.0.0104 SDN 004 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	538 Peserta Didik	538 Peserta Didik	212,474,563	286,499,720	343,799,720
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	543,400,000	543,400,000
1.01.2.22.0.0105 SDN 005 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	602 Peserta Didik	602 Peserta Didik	235,518,632	307,000,000	368,400,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	580,450,000	580,450,000
1.01.2.22.0.0106 SDN 006 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	354 Peserta Didik	354 Peserta Didik	142,380,000	187,000,000	224,400,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	354,350,000	354,350,000
1.01.2.22.0.0107 SDN 007 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	548 Peserta Didik	548 Peserta Didik	219,912,404	286,500,000	343,800,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	544,350,000	544,350,000
1.01.2.22.0.0108 SDN 008 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	571 Peserta Didik	571 Peserta Didik	227,838,795	290,499,894	348,599,894
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	549,100,000	549,100,000
1.01.2.22.0.0109 SDN 009 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	399 Peserta Didik	399 Peserta Didik	163,839,450	174,948,347	216,248,347
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	391,400,000	391,400,000
1.01.2.22.0.0110 SDN 010 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	451 Peserta Didik	494 Peserta Didik	166,716,515	246,995,211	296,394,864
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	461,700,000	461,700,000
1.01.2.22.0.0111 SDN 011 Bontang Utara						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	62 Peserta Didik	62 Peserta Didik	102,383,572	130,002,460	227,502,460
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	61,750,000	61,750,000
1.01.2.22.0.0112 SDN 001 Bontang Selatan						

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	491 Peserta Didik	491 Peserta Didik	198,791,787	233,500,000	280,200,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	443,650,000	443,650,000
1.01.2.22.0.0113 SDN 002 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	589 Peserta Didik	589 Peserta Didik	237,567,549	285,498,229	342,597,389
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	542,450,000	542,450,000
1.01.2.22.0.0114 SDN 003 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	476 Peserta Didik	476 Peserta Didik	179,567,769	223,499,931	268,199,874
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	418,000,000	418,000,000
1.01.2.22.0.0115 SDN 004 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	368 Peserta Didik	368 Peserta Didik	148,468,744	187,000,000	224,400,002
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	354,350,000	354,350,000
1.01.2.22.0.0116 SDN 005 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	366 Peserta Didik	366 Peserta Didik	151,029,593	173,500,000	208,200,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	327,750,000	327,750,000
1.01.2.22.0.0117 SDN 006 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	442 Peserta Didik	414 Peserta Didik	180,395,765	207,500,000	248,400,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	392,350,000	392,350,000
1.01.2.22.0.0118 SDN 007 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	244 Peserta Didik	244 Peserta Didik	101,987,917	123,000,000	147,600,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	232,750,000	232,726,300
1.01.2.22.0.0119 SDN 009 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	528 Peserta Didik	528 Peserta Didik	214,637,771	261,999,835	314,374,826
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	489,250,000	489,250,000
1.01.2.22.0.0120 SDN 010 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	365 Peserta Didik	365 Peserta Didik	151,039,556	183,998,595	220,798,595
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	338,200,000	338,200,004
1.01.2.22.0.0121 SDN 011 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	431 Peserta Didik	431 Peserta Didik	-	-	278,850,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	836,548,286	407,550,000
1.01.2.22.0.0122 SDN 012 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	413 Peserta Didik	413 Peserta Didik	166,399,808	206,497,480	247,797,480
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	385,700,000	385,700,000
1.01.2.22.0.0123 SDN 013 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	401 Peserta Didik	401 Peserta Didik	162,395,470	200,000,000	239,900,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	373,350,000	373,350,000
1.01.2.22.0.0124 SDN 014 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14 Peserta Didik	14 Peserta Didik	47,981,156	90,000,000	157,500,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-		39,900,000
1.01.02.2.0139 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					39,900,000	-
1.01.2.22.0.0125 SDN 015 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	31,972,196	28,000,003	49,000,003
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	13,300,000	13,300,000
1.01.2.22.0.0126 SDN 016 Bontang Selatan						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	47 Peserta Didik	47 Peserta Didik	81,573,440	69,996,390	122,496,390
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	31,350,000	31,350,000
1.01.2.22.0.0127 SDN 001 Bontang Barat						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					502,308,533	502,308,533
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	345 Peserta Didik	345 Peserta Didik	143,998,434	172,992,107	207,592,107
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	328,700,000	328,700,000
1.01.2.22.0.0128 SDN 002 Bontang Barat						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	247 Peserta Didik	247 Peserta Didik	99,969,877	109,493,115	142,343,115

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	203,300,000	203,300,000
1.01.2.22.0.0129 SDN 003 Bontang Barat						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	357 Peserta Didik	357 Peserta Didik	148,391,974	181,000,000	181,000,000
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	341,050,000	341,050,000
1.01.2.22.0.0130 SDN 004 Bontang Barat						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.0121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	688 Peserta Didik	688 Peserta Didik	271,359,828	339,998,188	407,998,188
1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	646,000,000	646,000,000
1.01.2.22.0.0131 SMPN 1 Bontang						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	832 Peserta Didik	832 Peserta Didik	447,828,598	526,200,000	657,750,000
1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	1,017,320,000	1,017,320,000
1.01.2.22.0.0132 SMPN 2 Bontang						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	806 Peserta Didik	806 Peserta Didik	483,199,268	484,799,535	605,999,535
1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	936,120,000	936,120,000
1.01.2.22.0.0133 SMPN 3 Bontang						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	358,399,480	357,599,692	417,199,692
1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	691,360,000	691,360,000
1.01.2.22.0.0134 SMPN 4 Bontang						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	543 Peserta Didik	543 Peserta Didik	319,999,041	357,600,000	412,100,000
1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	632,200,000	632,200,000
1.01.2.22.0.0135 SMPN 5 Bontang						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	613 Peserta Didik	613 Peserta Didik	367,996,750	376,800,000	439,600,000
1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	728,480,000	728,480,000
1.01.2.22.0.0136 SMPN 6 Bontang						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	281 Peserta Didik	281 Peserta Didik	156,733,560	172,792,712	201,592,712
1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	334,080,000	334,080,000
1.01.2.22.0.0137 SMPN 7 Bontang						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	395 Peserta Didik	395 Peserta Didik	243,187,510	239,995,035	279,995,035
1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	461,680,000	461,680,000
1.01.2.22.0.0138 SMPN 8 Bontang						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	406 Peserta Didik	406 Peserta Didik	220,787,315	251,400,000	293,200,000
1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	483,720,000	483,720,000
1.01.2.22.0.0139 SMPN 9 Bontang						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	319 Peserta Didik	319 Peserta Didik	185,399,741	189,627,268	221,227,268
1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	366,560,000	366,560,000
1.01.2.22.0.0140 TK NEGERI 1 BONTANG						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1.01.02.2.0311 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	225 Peserta Didik	225 Peserta Didik	108,764,888	81,599,868	104,099,868
1.01.02.2.0318 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	128,520,000	128,520,000
1.01.2.22.0.0141 TK NEGERI 2 BONTANG						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1.01.02.2.0311 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	59 Peserta Didik	59 Peserta Didik	30,374,874	18,799,745	24,699,745
1.01.02.2.0318 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	29,610,000	29,610,000
1.01.2.22.0.0142 TK NEGERI 3 BONTANG						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1.01.02.2.0311 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	43 Peserta Didik	61 Peserta Didik	19,252,000	24,399,765	30,500,000
1.01.02.2.0318 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	38,430,000	38,430,000
1.01.2.22.0.0143 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bontang						
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
1.01.02.2.0410 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1343 Peserta Didik	1343 Peserta Didik	502,308,533		87,000,000
1.01.02.2.0417 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan	-	239,940,000	239,940,000
1.01.02.2.0446 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	-	-	-	502,308,533	
TOTAL				420,973,229,418	498,010,996,615	593,301,978,963

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;			
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar, Rasio FKTP per satuan penduduk, Persentase FKTL Sesuai standar, Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen			
1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	5,000,000,000	2,354,099,335	2,354,099,335
1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Usulan Pokir	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	450,000,000	159,615,075	159,615,075
1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Usulan Pokir	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	85 Unit	85 Unit	684,000,000	680,150,783	680,150,783
1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	-	-	-	198,167,991	198,167,991
1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Usulan Pokir	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	0 Unit	231,000,000	555,831,365	555,831,365
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	288 Unit	294 Unit	975,540,747	1,692,618,083	1,692,618,083
1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	375 Unit	375 Unit	363,000,000	392,999,685	392,999,685
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	312 Paket	312 Paket	2,289,762,185	3,328,326,209	3,328,326,209
1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Kunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0 Keluarga	0 Keluarga	121,000,000	120,538,316	120,538,316
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB IR DBD Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Terakreditasi Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita Gizi kurus Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV	94 Persen 210 Rasio 100 Persen 7 Persen 12 Persen 25 Persen 0,16 Persen	94 Persen 210 Rasio 100 Persen 7 Persen 12 Persen 25 Persen 0,16 Persen			
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3400 Orang	3400 Orang	110,000,000	135,117,119	135,117,119
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3200 Orang	3200 Orang	110,000,000	274,680,000	274,680,000
1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15000 Orang	15000 Orang	110,000,000	687,970,520	687,970,520
1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15000 Orang	15000 Orang	110,000,000	109,503,834	109,503,834
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19000 Orang	19000 Orang	110,000,000	110,000,000	110,000,000
1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125000 Orang	125000 Orang	110,000,000	108,779,043	108,779,043
1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9000 Orang	9000 Orang	110,000,000	110,000,615	110,000,615
1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12000 Orang	12000 Orang	110,000,000	209,999,187	209,999,187
1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	4000 Orang	110,000,000	431,115,429	431,115,429
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	110,000,000	109,999,590	109,999,590
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	110,000,000	478,305,202	478,305,202
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	0 Orang	0 Orang	110,000,000	167,658,447	167,658,447
1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	109,605,079	109,605,079
1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	330,000,000	329,425,611	329,425,611
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	254,072,618	254,072,618
1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	109,827,429	109,827,429
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	309,261,970	309,261,970
1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	672,381,367	672,381,367
1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	157,210,092	157,210,092
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	148,925,297	148,925,297

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	330,000,000	886,768,745	886,768,745
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	24,349,953,600	24,288,013,400	26,165,210,300
1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	5 Paket	-	11,700,000	11,700,000
1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	550,000,000	539,099,077	539,099,077
1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	5 Unit	5 Unit	100,000,000	99,587,728	99,587,728
1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	1,800,000,000	-	-
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	71,640,366	73,470,870	73,470,870
1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit	250,000,000	117,840,000	117,840,000
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	-	3,000,000	3,000,000
1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	90,962,000	90,962,000
1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	110,000,000	110,994,423	110,994,423
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	-	31,500,000	31,500,000
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Ketersediaan sistem informasi kesehatan terpadu/terintegrasi	100 persen	100 persen			
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen	425,200,000	1,216,263,067	1,216,263,067
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan Rujukan (FKTL) Berizin	100 persen	100 persen			
1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	4 Unit	4 Unit	100,000,000	10,260,923,875	10,260,923,875
1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	6 Unit	6 Unit	508,294,239	1,559,317,087	1,559,317,087
1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	181,500,000	106,927,759	106,927,759
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar (Jumlah, Jenis dan Kompetensinya)	100 Persen	100 Persen			
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100 Persen	100 Persen			
1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	125 Dokumen	125 Dokumen	30,250,000	29,904,818	29,904,818
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK berdasarkan Rencana Kebutuhan Fasyankes	34 Persen	34 Persen			
1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	85 Dokumen	85 Dokumen	121,000,000	182,010,103	182,010,103
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMk mendapatkan pengembangan kompetensi	100 Persen	100 Persen			
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Usulan Pokir	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	40 Orang	593,213,000	2,915,241,880	2,915,241,880
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	ersentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	100 persen	100 persen			
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana produksi dan distribusi obat berizin dan memenuhi standar	96 persen	96 persen			
1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	121,000,000	139,988,245	139,988,245
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana PIRT yang berizin yang memenuhi standar	70 persen	70 persen			
1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	121,000,000	442,085,389	442,085,389
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan	68 persen	68 persen			
1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		1 Dokumen	121,000,000	120,334,000	120,334,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan sesuai standar	98 persen	98 persen	72,600,000	72,212,500	72,212,500
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	80 persen	80 persen			
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pedoman/ regulasi/ rekomendasi penerapan kebijakan GERMAS	15 buah	15 buah			
1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	115,500,000	1,191,644,000	3,691,644,000
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PHBS 5 Tatanan (Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum)	70 persen	70 persen			
1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	231,000,000	349,787,000	349,787,000
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	100 persen	100 persen			
1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	502,500,000	490,250,886	490,250,886
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	90 Persen	90 Persen			
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen			
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	179,411,231	178,942,016	178,942,016
1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	19,959,778	19,959,778
1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	44,000,000	34,511,352	34,511,352
1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	122,000,000	121,632,253	121,632,253
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2 Laporan	2 Laporan			
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	608 Orang/bulan	608 Orang/bulan	69,428,000,000	154,875,014,399	154,875,014,399
1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	154,000,000	154,356,950	154,356,950
1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	14,997,095	14,997,095
1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	14,997,095	14,997,095
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	28,561,300	28,561,300
1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
1.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	13,479,113	13,479,113
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan			
1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	157 Paket	150,000,000	149,712,563	149,712,563
1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	19,610,000	19,610,000
1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	35 Orang	600,000,000	2,799,244,000	2,799,244,000
1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100,000,000	135,243,250	135,243,250
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum	1 Laporan	1 Laporan			
1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	110,000,000	102,345,247	102,345,247
1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	499,000,000	2,634,096,053	2,634,096,053
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65 Paket	65 Paket	275,000,000	196,710,740	196,710,740
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	342,000,000	340,565,688	340,565,688
1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	40 Dokumen	12,100,000	10,850,000	10,850,000
1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	30,000,000	82,250,000	82,250,000
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan	5,340,367,000	5,033,585,000	5,033,585,000
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	1,000,000,000	1,046,357,000	1,046,357,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya air, listrik, komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4,500,000	4,500,000	4,500,000
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	363,000,000	570,860,000	570,860,000
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10,242,160,000	8,477,882,486	8,477,882,486
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset Barang Milik Daerah terpelihara Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan			
1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	329,016,824	313,561,860	313,561,860
1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	1,099,998,696	1,086,222,545	1,086,222,545
1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	11,000,000	9,750,000	9,750,000
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	141,751,500	135,130,000	135,130,000
1.02.0.00.0.00.02.0001 UPT Puskesmas Bontang Utara 1						
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar, Rasio FKTP per satuan penduduk, Persentase FKTL Sesuai standar, Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen			
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1024 Orang	-	5,400,000	5,400,000
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	977 Orang	-	7,500,000	7,500,000
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	5561 orang	-	80,000,000	80,000,000
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	452 orang	-	6,800,000	6,800,000
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	-	178,132,541	178,132,541
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	-	6,000,000	6,000,000
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	-	79,090,000	79,090,000
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	-	86,750,000	86,750,000
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1,712,086,075	1,373,056,200	1,601,944,908
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 8 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	600,000,000	2,626,791,430	2,626,791,430
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	-	14,800,000	14,800,000
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		136 orang	-	2,500,000	2,500,000
1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	15,440,000	15,440,000
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	-	53,450,000	53,450,000
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 dokumen		431,886,137	431,886,137
1.02.0.00.0.00.02.0002 UPT Puskesmas Bontang Utara 2						
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar, Rasio FKTP per satuan penduduk, Persentase FKTL Sesuai standar, Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen			
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 534 orang	-	800,000	800,000
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 509 orang	-	1,900,000	1,900,000
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	umlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 497 orang	-	11,550,000	11,550,000
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 1 Dokumen	-	77,903,954	77,903,954
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	-	65,036,000	65,036,000
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	-	48,800,000	48,800,000
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1,605,624,222	1,194,678,000	1,512,497,957
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 8 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	841,000,000	2,149,846,225	2,149,846,225
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	-	3,100,000	3,100,000
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 1 Laporan	-	400,000	400,000
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		137 orang	-	9,000,000	9,000,000
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 16 orang	-	1,000,000	1,000,000
1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	1,400,000	1,400,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	-	400,000	400,000
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 dokumen	-	59,590,322	59,590,322
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	80 persen	80 persen			
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		2,830,000	2,830,000
1.02.0.00.0.00.02.0003 UPT Puskesmas Bontang Selatan 1						
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar, Rasio FKTP per satuan penduduk, Persentase FKTL Sesuai standar, Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen			
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 789 orang	-	2,000,000	2,000,000
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 4288 orang	-	5,400,000	5,400,000
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 240 orang	-	3,600,000	3,600,000
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai		0 1047 orang	-	750,000	750,000
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 1 Dokumen	-	90,294,994	90,294,994
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 1 Dokumen	-	8,000,000	8,000,000
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		- 1 Dokumen	-	51,930,000	51,930,000
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		- 1 Dokumen	-	59,150,000	59,150,000
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1,732,028,144	916,381,812	1,256,315,532
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 8 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	600,000,000	2,967,096,671	2,967,096,671
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	-	3,616,000	3,616,000
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 1 Laporan	-	500,000	500,000
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	umlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 140 orang	-	4,000,000	4,000,000
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 3 orang	-	1,200,000	1,200,000
1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	21,633,000	21,633,000
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	-	5,700,000	5,700,000
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 dokumen		63,556,179	63,556,179
1.02.0.00.0.00.02.0004 UPT Puskesmas Bontang Selatan 2						
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar, Rasio FKTP per satuan penduduk, Persentase FKTL Sesuai standar, Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen			
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 538 orang	-	2,000,000	2,000,000
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 513 orang	-	100,000	100,000
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 2922 orang	-	11,450,000	11,450,000
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 490 orang	-	5,000,000	5,000,000
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar0		0 713 orang	-	2,000,000	2,000,000
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 1 Dokumen	-	73,398,192	73,398,192
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 1 Dokumen	-	1,500,000	1,500,000
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		- 1 Dokumen	-	35,950,000	35,950,000
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		- 1 Dokumen	-	67,950,000	67,950,000
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1,481,181,661	1,113,354,000	1,324,500,468
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 8 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	600,000,000	3,020,208,981	3,020,208,981
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	-	2,970,000	2,970,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1 Laporan	-	200,000	200,000
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	umlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	112 orang	-	2,400,000	2,400,000
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	17 orang	-	1,000,000	1,000,000
1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	8,244,000	8,244,000
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	-	3,000,000	3,000,000
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 dokumen		57,657,381	57,657,381
1.02.0.00.0.00.02.0005 UPT Puskesmas Bontang Barat						
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar, Rasio FKTP per satuan penduduk, Persentase FKTL Sesuai standar, Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen			
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	615 orang	-	9,360,000	9,360,000
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar0	0	587 orang	-	1,960,000	1,960,000
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	3342 Orang	-	12,800,000	12,800,000
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	364 orang	-	2,000,000	2,000,000
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	0	711 orang	-	2,100,000	2,100,000
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	1 Dokumen	-	93,076,461	93,076,461
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	1 Dokumen	-	1,500,000	1,500,000
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	-	57,444,000	57,444,000
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	-	83,400,000	83,400,000
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1,178,525,973	881,790,000	1,201,841,396
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 8 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	841,000,000	2,591,792,400	2,591,792,400
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	-	3,642,000	3,642,000
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1 Laporan	-	2,000,000	2,000,000
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	366 orang	-	3,000,000	3,000,000
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	57 orang	-	1,000,000	1,000,000
1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	23,114,000	23,114,000
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	-	23,896,000	23,896,000
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 dokumen		72,284,028	72,284,028
1.02.0.00.0.00.02.0006 UPT Puskesmas Bontang Lestari						
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar, Rasio FKTP per satuan penduduk, Persentase FKTL Sesuai standar, Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen			
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	95 orang	-	10,580,000	10,580,000
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	91 orang	-	6,200,000	6,200,000
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	519 orang	-	9,800,000	9,800,000
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	551 orang	-	4,150,000	4,150,000
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	0	816 orang	-	750,000	750,000
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	1 Dokumen	-	28,824,200	28,824,200
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	1 Dokumen	-	3,200,000	3,200,000
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	-	42,580,000	42,580,000
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	-	36,000,000	36,000,000
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	587,048,464	351,597,444	549,276,825
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 8 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	816,000,000	2,662,539,991	2,662,539,991
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	1 Laporan	-	300,000	300,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	87 orang	-	4,500,000	4,500,000
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	4 orang	-	1,200,000	1,200,000
1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 Dokumen	-	40,166,000	40,166,000
1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	-	33,000,000	33,000,000
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 dokumen		153,960,611	153,960,611
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	80 persen	80 persen			
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		5,132,000	5,132,000
1.02.0.00.0.00.02.0007 UPT Laboratorium Kesehatan						
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar, Rasio FKTP per satuan penduduk, Persentase FKTL Sesuai standar, Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen			
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	650,000,000	1,050,010,479	1,050,010,479
1.02.0.00.0.00.02.0008 Klinik PNS						
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;			
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar, Rasio FKTP per satuan penduduk, Persentase FKTL Sesuai standar, Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen	100, 1:20000, 100, 1 Persen, Rasio,Persen			
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1,244,641,007	947,968,800	1,279,396,673
TOTAL				148,861,394,934	264,908,580,359	271,232,724,762

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RSUD TAMAN HUSADA
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD	-	100 ; 100 ; 12 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen			
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP Sesuai standar ; Rasio FKTP per satuan penduduk ; Persentase FKTL Sesuai standar ; Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial	-	100 ; 1:20.000 ; 100 ; 100 persen ; rasio ; persen ; persen			
1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	372,503,005	595,393,350	595,393,350
1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	273 Unit	2,132,698,950	199,290,000	199,290,000
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	21 Unit	3,599,335,309	17,532,054,066	17,532,054,066
1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	123 Unit	299,812,500	517,728,500	517,728,500
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	599,997,940	35,090,725,001	35,090,725,001
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kesembuhan TB ; Prevalensi HIV ; IR DBD ; Prevalensi Hipertensi ; Prevalensi balita gizi kurang ; Prevalensi balita Gizi kurus ; Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Terakreditasi	-	95 ; 0.16 ; 200 ; 25 ; 6 ; 11 ; 100 angka ; persen			
1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	600,000,000	599,999,400	599,999,400
1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	75,000,000,000	80,000,000,000	137,728,342,937
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Ketersediaan sistem informasi kesehatan terpadu/terintegrasi	-	100 persen			
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	246,801,635	246,801,635	246,801,635
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan SDM Sesuai Standar (Jumlah, Jenis dan Kompetensinya)	-	100 persen			
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDMk mendapatkan pengembangan kompetensi	-	100 persen			
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	122 Orang	398,140,000	1,751,961,000	1,751,961,000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	-	80 persen			
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PHBS 5 Tatanan (Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum) undefined	-	70 persen undefined undefined			
1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	299,716,502	299,716,502
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	-	8 dokumen 8 Dokumen			
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1,378,321	1,220,643	1,220,643
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	-	2 Laporan 8 laporan			
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	660 Orang/bulan	471 Orang/bulan	80,037,281,593	18,543,770,811	18,543,770,811
1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen	802,500,920	144,000,000	144,000,000
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	-	1 laporan 1 Laporan			
1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	35 Orang	248,860,000	246,510,000	246,510,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum	-	1 laporan 1 Laporan			
1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	1,999,380,299	6,235,795,502	6,235,795,502
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	399,080,425	398,402,677	398,402,677
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	198,468,000	193,104,000	193,104,000
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	47 Laporan	299,312,000	317,221,000	317,221,000
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	499,950,917	699,428,390	699,428,390
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4,366,000,000	5,673,814,263	6,323,814,263
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset Barang Milik Daerah terpelihara	-	12 bulan 12 Bulan			
1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	80 Unit	99,992,000	84,010,000	84,010,000
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	598,330,000	1,996,721,931	1,996,721,931
1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	320 Unit	600,000,000	400,000,000	400,000,000
1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9 Unit	350,000,000	4,448,512,150	4,448,512,150
TOTAL				173,799,823,814	176,216,180,821	234,594,523,758

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas aliran sungai Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	69 % 87,36 % 87 %	69 % 87,36 % 87 %			
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang turap dan tanggul yang telah dibangun/ panjang keseluruhan sungai	250 meter	250 meter			
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	10 KM	12 KM	5,393,566,166	5,343,553,391	5,395,553,391
1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.04 KM	0.033 KM	6,200,000,000	2,759,426,740	2,759,426,740
1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1 Usulan Pokir1 Usulan Aspirasi	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.05 KM	3,09784 KM	68,730,663,000	184,287,058,990	259,287,058,990
1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.02 KM	0,08857 KM	2,000,000,000	-	-
1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	1 Titik	500,000,000	-	-
1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 6 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	10 Dokumen	12 Dokumen	2,570,000,000	3,716,865,475	11,216,865,475
1.03.02.2.01.0124 Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	1 Unit	4 Unit	36,700,000,000	16,946,953,750	43,946,953,750
1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 2 Usulan Pokir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	3 Unit	4 Unit	2,280,000,000	746,930,400	746,930,400
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	675,000,000	-	-
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran Irigasi	100 meter	100 meter			
1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.1 KM	0.1 KM	200,000,000	159,377,211	159,377,211
1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	27,165,000	27,165,000
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum layak	83,99 Persen	83,99 Persen			
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	0 jiwa 83,99 Persen	0 jiwa 83,99 Persen			
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	650,000,000	824,770,000	2,983,970,000
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	25 Liter/Detik	25 Liter/Detik	4,697,742,000	28,763,674,000	28,763,674,000
1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	344,300,000	255,468,200	256,468,200
1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	100 SR	807,958,000	3,564,345,326	6,692,245,326
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS persentase sampah yang tertangani	38 Persen 0	38 Persen 0			
1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	0.38	0.38			
1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	50 Ton/hari	50 Ton/hari	912,183,000	1,069,061,000	1,069,061,000
1.03.04.2.01.0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	50 Orang	50 Orang	267,817,000	-	-
1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	170,000,000	685,499,000	909,135,000
1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1,450,000,000	-	-
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase penduduk berakses sanitasi layak Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0 96,50 Persen	0 96,50 Persen			
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk berakses air limbah domestik	200 jiwa	200 jiwa			
1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	25 Unit	25 Unit	344,649,984	-	-
1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	100 Unit	100 Unit	1,349,645,600	1,849,645,600	2,442,865,600
1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	233,089,137	180,692,876	180,692,876
1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	3,198,550,279	3,250,946,206	3,270,946,206

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	1,144,700,000	1,344,700,000	1,344,700,000
1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	12 Orang	12 Orang	200,000,000	50,180,457	50,180,457
1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	285,000,000	139,271,000	362,907,000
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	95 Persen	95 Persen			
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase dalam kondisi baik Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	3300 meter Meter	3300 meter Meter			
1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 15 Usulan Pokir2 Usulan Aspirasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	300 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	14,941,651,392	12,285,758,922	62,285,758,922
1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1,200,000,000	-	
1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1000 Sistem Drainase Perkotaan	1000 Sistem Drainase Perkotaan	72,360,000	-	
1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 3 Usulan Pokir2 Usulan Aspirasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1500 Sistem Drainase Perkotaan	1500 Sistem Drainase Perkotaan	10,745,290,834	12,818,528,628	12,818,528,628
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 4 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	1,454,000,000	1,931,457,000	1,931,457,000
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	70,49 Persen 100 persen	100 60,81 persen Persen			
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan gedung negara ; Jumlah bangunan yang diberikan IMB/PBG dan sertifikat laik fungsi (SLF) Tingkat Pelayanan Aparatur	19 Unit, 50 Unit unit 100 %	19 Unit, 50 Unit unit			
1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	10 Bangunan Gedung	4 Bangunan Gedung	141,277,000	3,201,211,685	3,201,211,685
1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Usulan Aspirasi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	15 Bangunan Gedung	25 Bangunan Gedung	4,570,000,000	12,368,163,685	12,668,163,685
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	55 Dokumen	91,573,671,368	116,323,480,668	118,836,851,963
1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1 Orang	1 Orang	99,995,189	105,352,697	105,352,697
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	60 Dokumen	60 Dokumen	500,000,347	494,510,347	494,510,347
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sempadan sungai yang tertata	15,46 Persen	15,46 Persen			
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	panjang sempadan sungai yang tertata	400 meter	400 meter			
1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	99,856,000	-	
1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen	0 Dokumen	47,662,000	-	
1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	52,482,000	198,259,000	198,259,000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap ; Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	90,02% 92,82% %	90,02% 92,82% %			
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi mantap ; Panjang drainase jalan dalam kondisi baik	1000, 300 meter	1000, 300 meter			
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	598,970,500	411,924,000	523,742,000
1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	16 KM	16 KM	3,215,470,000	7,458,276,000	7,458,276,000
1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	1 Jembatan	8,901,430,000	3,202,435,960	3,202,435,960
1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan 2 Usulan Pokir	Panjang Jalan yang Dibangun	0.520 KM	0.712 KM	8,452,873,730	12,952,847,566	116,782,411,499
1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan 1 Usulan Aspirasi	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.518 KM	16 KM	21,133,560,770	83,844,902,047	83,844,902,047
1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,490 KM	0,490 KM	457,529,000	348,998,984	348,998,984
1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	1 Jembatan	200,000,000	178,000,104	178,000,104
1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	16 Jembatan	3 Jembatan	15,183,024,000	20,776,811,342	21,014,696,142
1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Jembatan	1 Jembatan	200,000,000	227,999,316	227,999,316

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	334 KM	600,000,000	732,845,000	732,845,000
1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan 1 Usulan Pokir	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.460 KM	0.460 KM	518,500,000	12,562,700,956	12,885,731,715
1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,330 KM	0,330 KM	2,049,822,000	3,399,774,669	3,416,774,669
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	81,50 persen	86,78 persen			
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja terampil konstruksi yang bersertifikasi	130 tenaga	1431 orang			
1.03.11.2.01.0010 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	90 Orang	609 Orang	128,777,498	2,830,252,741	2,830,252,741
1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	90 Orang	140 Orang	413,159,404	1,122,694,442	1,122,694,442
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan SIPJAKI Daerah Jumlah Data Badan Usaha Yang Berizin Jumlah Data Tenaga Kerja Yang Bersertifikat	562 Badan Usaha 1296 Tenaga kerja	562 Badan Usaha 1296 Tenaga kerja			
1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	167,072,033	167,407,620	167,407,620
1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	3 Orang	19,999,740	118,524,299	118,524,299
1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jumlah Izin Usaha	20 badan usaha	20 badan usaha			
1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	20 Dokumen	20 Dokumen	10,000,000	9,999,655	9,999,655
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan	100 %	100 %			
1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	25 Paket Pekerjaan	322,491,975	34,493,700	34,493,700
1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga	200 Lembaga	88,499,389	366,614,659	566,614,659
1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	4 Dokumen	19,999,961	19,999,866	19,999,866
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	89,20 persen	94,17 persen			
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	223,845,287	223,842,249	223,842,249
1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	921,105,982	1,537,849,550	1,586,577,081
1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	150 Orang	15,002,615	15,036,368	15,036,368
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi dan sinkronisasi	1	1 Dokumen			
1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	2,894,569	86,030,934	118,803,403
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	100 KKPR	100 KKPR			
1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	37,058,622	37,058,417	55,558,417
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi atau pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi			
1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100,092,925	300,092,466	300,092,466
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen			
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	100 %	100 %			
1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	19,825,858,745	21,790,134,369	21,790,134,369
1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,097,445	2,097,445	2,097,445
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	100 %	100 %			
1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	4 Paket	128,890,000	620,106,000	620,106,000
1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	200 Orang	238,270,000	2,449,478,000	2,449,478,000
1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	149,988,096	150,120,304	150,120,304
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	100 %	100 %			
1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,983,876	7,129,901	7,129,901
1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	261,551,399	519,568,402	519,568,402
1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25,498,308	25,757,685	25,757,685
1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	89,955,698	100,470,757	100,470,757

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	240 Laporan	969,339,760	1,778,223,000	1,778,223,000
1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	300 Dokumen	151,833,021	332,996,830	332,996,830
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	100 %	100 %			
1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	100,000,000
1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	53 Unit	106,567,452	243,294,492	243,294,492
1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	12 Unit	121,271,146	363,501,863	363,501,863
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	100 %	100 %			
1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	9,988,965	10,000,000	10,000,000
1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	300,000,000	311,100,000	540,700,000
1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	27 Laporan	1,516,227,487	1,361,892,168	1,361,892,168
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	100 %	100 %			
1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	24 Unit	835,822,909	639,792,423	639,792,423
1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	75 Unit	72,868,000	193,369,600	193,369,600
1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	32,008,416	-	
TOTAL				355,649,311,019	599,558,753,403	873,421,614,190

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	25 persen 33,5 persen	25 persen 33,5 persen			
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi rumah program pemerintah	4 Dokumen	4 Dokumen			
1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	-	
1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	307,806,200	307,806,200
1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	-	
1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	153,667,840	153,667,840
1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	
1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	153,667,840	153,667,840
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah rehabilitasi korban bencana atau relokasi program pemerintah yang dibangun	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah			
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	350,000,000	265,400,000	265,400,000
1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	350,000,000	257,448,700	257,448,700
1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	10,000,000	23,750,000	23,750,000
1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	100,000,000	30,488,000	30,488,000
1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	40,000,000	972,125,000	972,125,000
1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	10,000,000	-	
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah RT, KK & jiwa penghuni rumah susun umum & rumah khusus yg dibina	406 jiwa	406 jiwa			
1.04.02.2.05.0001 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 4 Usulan Pokir	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	4 Laporan	4,535,734,000	6,611,199,615	6,787,616,115
1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4 Dokumen	4 Dokumen	874,138,039	679,637,799	679,637,799
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	72,06 persen	72,06 persen			
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi izin pembangunan & pengembangan kawasan permukiman yg diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen			
1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	168,388,000	168,388,000
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4 Dokumen	4 Dokumen			
1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	740,000,000	1,423,283,995	1,423,283,995
1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	562,653,225	562,653,225
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	2,34 Ha	2,34 Ha			
1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	800,000,000	979,400,000	1,037,400,000
1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	126,923,000	126,923,000
1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 4 Usulan Pokir2 Usulan Aspirasi	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2,34 Ha	2,34 Ha	5,760,000,000	5,503,778,200	5,943,778,200
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh	2,59 persen	2,59 persen			
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	30 Unit Rumah	30 Unit Rumah			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	1,000,000,000	731,100,000	731,100,000
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana TPU Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	66 persen 93,22 persen 93,58 peren	66 persen 93,22 persen 93,58 peren			
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana TPU Panjang drainase yang dibangun/direhab Panjang jalan yang dibangun/direhab	33 jenis 1000 meter 2000 meter	33 jenis 1000 meter 2000 meter			
1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	15 Dokumen	15 Dokumen	1,605,680,000	1,607,825,000	1,607,825,000
1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 50 Usulan Pokir52 Usulan Aspirasi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	15 Lokasi	15 Lokasi	29,094,205,455	60,169,122,924	64,792,021,640
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	249,846,000	249,846,000	249,846,000
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen			
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	56,000,000	4,310,540	1,314,190
1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22,000,000	657,095	29,193,095
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	43 Orang/bulan	9,117,448,570	10,102,516,019	10,102,516,099
1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2 Laporan	750,000	1,314,190	1,314,190
1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	750,000	657,095	657,095
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-			
1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	246,395,033	466,815,022	466,815,022
1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	32 Orang	249,250,000	1,512,900,000	1,502,400,000
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan layanan administrasi umum yang disediakan	5 jenis	5 jenis			
1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	631,209,118	1,786,627,499	1,793,968,246
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	200,000,000	90,004,872	90,004,872
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	63,000,000	57,444,731	57,505,686
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	859,766,000	1,827,386,000	1,827,386,000
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1.04.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	120,000,000	-	
1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10,000,000	-	10,000,000
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis	3 jenis			
1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,077,206,657	916,611,130	935,844,482
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	50 unit 45 orang	50 unit 45 orang			
1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	50 Unit	927,818,665	969,089,655	969,089,655
1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	23 Unit	423,400,940	378,504,000	378,504,000
1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	99,999,996	-	
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100 persen	100 persen			
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas penanganan sengketa tanah garapan	10 Dokumen	10 Dokumen			
2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	300,000,000	306,942,825	307,179,825
2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara	10 Berita Acara	350,000,000	279,449,059	279,449,059
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah	75 persen	75 persen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	156,165,900	156,284,400
2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	30 persen	30 persen			
2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	100 persen	100 persen			
2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	1 Laporan	85,000,000	130,124,900	130,243,400
2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk masyarakat	75 persen	75 persen			
2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah fasilitas penerbitan izin membuka tanah	3 Lokasi	3 Lokasi			
2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	116,202,900	116,321,400
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik	10 persen	10 persen			
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Peta Zona Nilai Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	480,000,000	429,191,015	429,191,015
TOTAL				61,909,598,473	100,520,425,785	105,870,008,285

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	80 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen			
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Daerah Prententase Peningkatan Penagananan Gangguan Ketentaraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen			
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	130 Orang	147 Orang	235,879,000	234,745,084	284,357,084
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	80 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen	344,321,803	344,306,803	344,306,803
1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	5 Laporan	300 laporan	67,000,000	66,996,000	66,996,000
1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	12,768,698	12,768,698	9,324,966
1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	11 Unit	136 Unit	57,840,971	53,168,989	110,457,748
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan Presentase Peningkatan Penanganan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	80 Persen 100 Persen	80 Persen 100 Persen			
1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	583,340,366	589,002,017	557,656,372
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	7 Laporan	7 Laporan	862,501,800	520,655,102	567,586,435
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18 Laporan	18 Laporan	826,023,489	540,823,500	580,931,600
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen			
1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	2 Laporan	85,500,000	88,510,000	32,815,000
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol PP)	100 persen	100 persen			
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	584,076	584,076	584,076
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	584,076	584,076	584,076
1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	584,076	584,076	584,076
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana yang dibutuhkan Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	40 orang 100 Persen 100 Persen 100 Persen	41 orang 100 Persen			
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	38 Orang/bulan	7,948,559,919	8,866,692,640	8,866,692,640
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	584,076	584,076	584,076
1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	584,076	584,076	584,076
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	55,890,000	388,980,750	314,470,550
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	5 Orang	74,600,000	79,735,000	79,735,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi umum Perangkat Daerah Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen			
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	15,303,072	13,786,550	13,786,550
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8 Paket	168,596,789	156,476,317	263,059,204
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	33,195,301	31,173,411	31,173,411
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	48,907,510	49,168,828	49,271,866
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	60 Laporan	716,606,000	729,012,000	957,657,000
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	undefined undefined	100 Persen			
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	223,400,000	193,400,000	141,000,000
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan	83 Laporan	4,174,500,000	4,681,345,648	4,507,822,408
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	30 Unit	1,079,729,200	957,745,838	1,007,742,538
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	5 Unit	-		3,050,000
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	4 Unit	26,150,000	2,440,000	2,440,000
1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	-		8,600,000
TOTAL				17,653,534,298	18,613,853,555	18,813,853,555

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	28 Persen	28 Persen			
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 Persen	100 Persen			
1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	459,648,440	517,496,400	517,496,400
1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	161 Orang	161 Orang	566,834,900	288,440,031	288,440,031
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen			
1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	45 Kawasan	10 Kawasan	249,766,250	169,525,250	144,093,250
1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	150 Orang	150 Orang	25,800,000	51,658,235	51,658,235
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	10 Unit	93,749,984	92,362,854	116,905,999
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1074 Kawasan	300 Kawasan	70,280,000	988,268,000	988,268,000
1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	10 laporan	12 laporan	122,507,966	88,549,410	88,549,410
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen			
1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	23,431,350	14,818,175	14,818,175
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	50 Orang	149,698,860	131,570,860	131,570,860
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80 Orang	50 Orang	199,976,083	120,122,425	64,362,425
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	9,588,293	9,588,293	9,588,293
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang	18 Orang			
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	9,087,427,769	8,119,262,920	8,119,262,920
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	1 paket	1 paket			
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	500 Paket	2 Paket	99,847,081	220,700,918	220,700,918
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	50 Dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket			
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,505,035	9,186,942	9,186,942
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	447,391,467	206,528,146	231,591,881
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	131,808,893	131,808,893	131,808,893
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	90,258,437	94,977,904	94,977,904
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	594,547,224	650,248,312	715,980,938
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"jumlah pengadaan barang milik daerah dalam menunjang urusan pemerintahan daerah tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan milik daerah	6 paket	100 persen 6 Unit			
1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	-	-	660,917,000
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	13 Unit	18,313,549	53,478,587	58,414,081
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen	4 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	1 Laporan	6,100,000	6,100,000	6,100,000
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	140,800,000	146,400,000	146,400,000
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	393,580,000	271,823,384	271,823,384
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 paket 57 paket	4 paket 57 paket			
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	796,845,488	861,843,579	861,843,579
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	12,100,000	139,801,300	139,801,300
TOTAL				13,799,807,069	13,384,560,818	14,084,560,818

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 Persen	100 Persen			
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100 Persen	100 Persen			
1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000	100,000	100,000
1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	4,747,478,848	1,327,768,424	1,827,725,424
1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	411,200,635	567,911,660	567,911,660
1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	511,705,000	291,210,671	291,210,671
1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	141,829,806	244,381,454	244,381,454
1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	2 Unit	1,807,331,424	848,177,649	848,177,649
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana & prasarana proteksi kebakaran yg dinilai sesuai standar	100 Persen	100 Persen			
1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	39,993,476	12,950,000	12,950,000
1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	94,360,913	28,449,261	28,449,261
1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran						
1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000	58,141,000	58,141,000
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran	100 Persen	100 Persen			
1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	750 Orang	750 Orang	300,515,176	119,309,257	119,309,257
1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	99,656,158	701,978,523	701,978,523
1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	1 Dokumen	88,870,000	12,000,000	12,000,000
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	13,694,000	640,997	640,997
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	23,903,033,389	20,088,929,170	20,088,929,170
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	13,694,000	616,177	616,177
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	50,000	49,640	49,640
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	50,000	796,511,935	796,511,935
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23,180,593	416,933,755	416,933,755
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	110,480,503	110,466,635	110,466,635
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	631,797,512	510,378,452	810,566,452
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100,000	99,645	99,645
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100,000	249,491,415	249,491,415
1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50,000	49,640	49,640

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	9,500,000	9,500,000	9,500,000
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	267,000,000	341,000,000	341,000,000
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	925,526,963	7,484,765,641	7,643,765,641
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen	100 Persen			
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	912,113,575	923,456,499	923,456,499
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	27,200,000	27,107,000	27,107,000
1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	31 Unit	134,900,000	80,000,000	205,275,000
1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	31 Unit	123,130,080	137,651,384	137,651,384
TOTAL				35,338,692,051	35,390,025,884	36,474,445,884

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100 Persen	100 Persen			
1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/monitoring PUB	1 Jenis	1 Jenis			
1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	12 Dokumen	27,511,000	23,890,000	23,890,000
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	5 Jenis	5 Jenis			
1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	30 Orang	29,945,769	29,727,090	29,727,090
1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	77,008,275	76,913,275	76,913,275
1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	30 Lembaga	67,328,000	63,109,000	438,114,000
1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	133 Sertifikat	50 Sertifikat	44,836,395	30,382,523	30,382,523
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 Persen	100 Persen			
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	12 Jenis	100 Persen			
1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	2,086,088,279	2,086,084,115	2,723,921,315
1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	17,184,000	17,184,000	17,184,000
1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	103,403,470	53,456,768	53,456,768
1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	49,960,000	44,231,435	44,231,435
1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	49,968,421	49,941,563	49,941,563
1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	750 Orang	400 Orang	64,556,730	64,284,075	64,284,075
1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	19,247,000	19,245,950	19,245,950
1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	26,102,194	26,075,765	26,075,765
1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	20,000,158	19,999,932	19,999,932
1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	20,000,000	19,931,677	19,931,677
1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	31,430,300	31,430,045	31,430,045
1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	65,000,000	54,427,700	54,427,700
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	14 Jenis	100 Persen			
1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	15,000,000	14,996,400	14,996,400
1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	14,987,220	14,956,945	14,956,945
1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	62 Orang	50 Orang	24,986,012	24,985,230	24,985,230
1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	19,726,422	19,679,675	19,679,675
1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	15,000,000	14,960,000	14,960,000
1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	42 Orang	15,215,000	15,213,280	15,213,280

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	22,106,960	22,090,000	22,090,000
1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	23,163,067	23,199,040	23,199,040
1.06.04.2.02.0009 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	14,952,500	14,894,000	14,894,000
1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	25 Orang	13,381,956	13,381,753	13,381,753
1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10,000,000	9,924,000	9,924,000
1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	26 Orang	32,897,144	22,813,704	22,813,704
1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	29,462,000	29,459,000	29,459,000
1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	113,179,000	76,466,000	76,466,000
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen			
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan data fakir miskin	100 Persen	100 Persen			
1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	8815 Orang	47102 Orang	250,000,000	195,950,839	195,950,839
1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4480 Keluarga	1291 Keluarga	210,000,000	223,296,861	223,296,861
1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Keluarga	500 Keluarga	1,107,958,000	1,072,373,000	1,697,078,000
1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	74,988,500	66,071,544	66,071,544
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100 Persen	100 Persen			
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perlintunga sosial korban bencana alam dan sosial	5 Jenis	5 Jenis			
1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	189,251,853	174,127,678	174,127,678
1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000
1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	49,615,945	48,155,945	48,155,945
1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	50 Orang	76,150,770	54,879,708	54,879,708
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	2 Jenis	2 Jenis			
1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung	54,976,225	40,818,225	40,818,225
1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	30 Orang	94,977,913	84,955,913	84,955,913
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen			
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan	1 Jenis	1 Jenis			
1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	9,958,984,255	11,250,282,833	11,250,282,833
1.06.01.2.05 Administrasi Pegewajiban Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian	2 Jenis	2 Jenis			
1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	105 Paket	88,578,000	190,618,785	190,618,785
1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	75 Orang	77,740,000	608,839,000	608,839,000
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum	6 Jenis	6 Jenis			
1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	16 Paket	135,655,404	854,522,928	854,522,928
1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	20,653,079	20,653,079	20,653,079
1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	25,000,000	25,001,590	25,001,590
1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	12 Laporan	702,653,000	862,359,000	862,359,000
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Jenis	1 Jenis			
1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	285,000,000	-	-
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis	3 Jenis			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	12 Laporan	10,000,000	9,995,000	9,995,000
1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	81,000,000	242,846,000	242,846,000
1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	59 Laporan	12 Laporan	2,404,200,000	3,062,263,972	3,109,216,772
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Jenis	4 Jenis			
1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	39 Unit	523,247,940	544,996,300	544,996,300
1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	55 Unit	38,730,000	38,390,000	38,390,000
1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	27,082,346	16,715,383	16,715,383
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK dan LAK yang aktif	100 Persen	100 Persen			
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	6 Jenis	6 Jenis			
2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	233,127,000	233,127,000
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	2 Lembaga	40,000,000	290,028,507	290,028,507
2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Unit	4 Unit	40,000,000	11,204,085	11,204,085
2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Laporan	3 Laporan	115,000,000	822,949,422	822,949,422
2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Laporan	1 Laporan	40,000,000	21,485,861	21,485,861
2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	6 Dokumen	785,281,500	1,584,768,353	2,584,768,353
TOTAL				20,720,352,002	25,709,010,751	28,393,510,751

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase produktifitas tenaga kerja; Persentase pencari kerja yang dilatih	0,90 ; 5,09 persen	0,90 ; 5,09 persen			
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 persen	100 persen			
2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 3 Usulan Pokir	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	409 Orang	708 Orang	4,021,000,000	4,731,073,046	5,231,067,046
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	100 persen	100 persen			
2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	25 Lembaga	50,000,000	295,120,210	295,120,210
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhi Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen			
2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	74,981,393	74,981,393
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	21 persen	21 persen			
2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapat pelayanan antar kerja di kabupaten/kota	100 persen	100 persen			
2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	500 Orang	50,000,000	50,661,003	50,661,003
2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	20 Orang	100,000,000	99,150,866	99,150,866
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase data dan informasi pasar kerja yang dikelola	100 persen 1 dokumen	100 persen			
2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3000 Orang	0 Orang	50,000,000	-	
2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	50 Orang	200,000,000	199,190,611	199,190,611
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	4,43 persen	4,43 persen			
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Menyusun Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen			
2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	30 Perusahaan	55,405,000	39,568,303	39,568,303
2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	39,991,891	39,991,891
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen			
2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	30 Perkara	30 Perkara	350,133,792	750,060,830	750,060,830
2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	19 Perkara	19 Perkara	45,000,000	44,955,894	44,955,894
2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	566,555,070	363,196,070	363,196,070
2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	30 Orang	34782 Orang	3,124,153,389	7,156,616,732	7,156,616,732
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 persen	100 persen			
2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	200,090,418	200,090,418
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen			
2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6,542,033,399	8,234,710,330	8,234,710,330
2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 persen	100 persen			
2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	69 Paket	70,000,000	202,098,165	202,098,165
2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	181 Orang	81,188,000	1,496,531,000	1,496,531,000
2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen			
2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	57,047,357	74,973,912	74,973,912
2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40,700,000	38,987,561	38,987,561
2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	35,000,000	36,425,875	36,425,875
2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	12 Laporan	553,778,959	702,393,000	928,178,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100 persen	100 persen			
2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	3 Unit	127,938,000	374,292,000	374,292,000
2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	25 Unit	259,333,268	373,160,271	373,160,271
2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 persen	100 persen			
2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000
2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	66,000,000	66,000,000	66,000,000
2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan	12 Laporan	1,692,517,532	1,747,732,348	1,795,453,348
2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen	100 persen			
2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	212,310,644	248,271,464	248,271,464
2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	34 Unit	10,000,000	21,890,000	21,890,000
TOTAL				18,579,094,410	27,666,123,193	28,439,623,193

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENIA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Gender pada Belanja Langsung APBD Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	0.0163 persen 47,78 persen	0.0163 persen 47,78 persen			
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100 persen	100 persen			
2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Dokumen	1 Dokumen	478,004,664	1,077,924,194	1,510,838,194
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100 perse	100 perse			
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen			
2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	203,842,432	313,945,577	313,945,577
2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	110,295,000	56,873,871	56,873,871
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan UPTD PPA	100 Persen	100 Persen			
2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	40 Orang	50 Orang	133,333,514	347,230,881	347,230,881
2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	700 Layanan	-	301,600,000	301,600,000
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	70 Persen	70 Persen			
2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan Puspaga, SDM, Jejaring antar lembaga penyedia layanan	100 Persen	100 Persen			
2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	25 Orang	410,366,173	125,369,115	125,369,115
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG	100 persen	100 persen			
2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Layanan	30 Layanan	110,610,081	110,616,796	110,616,796
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak Terpadu	100 persen	100 persen			
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak	100 persen	100 persen			
2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	55,835,846	55,797,846	55,797,846
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya			
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha yang telah mendapatkan pelembagaan PHA	30 Lembaga	30 Lembaga			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	30 Organisasi	30 Organisasi	590,990,482	341,588,840	341,588,840
2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	3 Dokumen	82,775,000	64,901,246	64,901,246
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	100 Persen			
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen			
2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	120 Orang	85,441,000	215,299,578	215,299,578
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Masuk	100 Persen	100 Persen			
2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	80 Orang	40 Orang	290,540,889	329,393,015	329,393,015
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Kegiatan Pengembangan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	5 Kegiatan	5 Kegiatan			
2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	3 Kegiatan	339,207,655	434,770,524	434,770,524
2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	240 Orang	-	88,400,000	88,400,000
2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	2 Dokumen	92,450,000	92,525,039	92,525,039
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor	100 persen	100 persen			
2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 persen	100 persen			
2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	3,942,570	1,971,285	1,971,285
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen			
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	35 Orang/bulan	8,011,145,000	9,379,456,745	9,379,456,745
2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,971,285	-	
2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen			
2.08.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10 Orang	49,500,000	292,267,000	292,267,000
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen			
2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15 Paket	373,793,806	781,649,301	781,649,301
2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	38,220,610	36,462,060	36,462,060
2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	22,730,460	23,740,460	23,740,460
2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	12 Laporan	694,553,593	701,489,000	701,489,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen	100 persen			
2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	5 Unit			
2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 persen	100 persen			
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	12 Laporan	1,127,530,000	1,306,805,688	1,456,805,688
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen	100 persen			
2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59 Unit	38 Unit	822,881,516	816,864,980	816,864,980
2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	35 Unit	16,050,000	24,360,000	24,360,000
2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10,281,000	36,510,599	96,768,599
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rasio 1,99	Rasio 1,99			
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tercapainya Pengendalian Kuantitas Penduduk	60 persen	60 persen			
2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	92,273,590	292,180,000	292,180,000
2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	15,758,000	15,736,000	15,736,000
2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	5 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	76,587,170	276,729,113	276,729,113
2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	12 Kegiatan	36,734,000	36,654,000	36,654,000
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpetakannya perkiraan pengendalian penduduk	100 persen	100 persen			
2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	10,987,846	11,086,495	11,086,495
2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	1 Laporan		52,200,000	52,200,000
2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	7,050,000	37,200,000	37,200,000
2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	15 Unit	15 Unit	74,051,395	274,574,150	274,574,150
2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	2 Laporan	1 Laporan	168,496,694	339,122,613	339,122,613
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor	71 persen	71 persen			
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB (Monev)	80 persen	80 persen			
2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	3 Laporan		140,000,000	140,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Unit	3 Unit	109,538,000	257,038,333	257,038,333
2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		3 Laporan		55,800,000	55,800,000
2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	3 Laporan	9,988,000	55,152,000	55,152,000
2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	4 Dokumen	-	100,000,000	100,000,000
2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	2 Dokumen	802,547,694	1,000,144,462	1,000,144,462
2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi	9,812,628	99,982,000	99,982,000
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	60 Orang		45,000,000	45,000,000
2.14.03.2.02.0006 Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	100,559,000	100,733,000	100,733,000
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan terdistribusinya Alat, Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB	100 Persen	100 Persen			
2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	1 Laporan	-	16,700,000	16,700,000
2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		-	-	-	293,171,000	293,171,000
2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit	5 Unit	25,535,630	38,214,635	38,214,635
2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	1 Laporan		4,600,000	4,600,000
2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	342,411,791	267,300,734	267,300,734
2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	70 Orang	120 Orang	50,834,555	50,320,044	50,320,044
2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	43 Orang	15 Orang	320,683,553	314,093,033	314,093,033

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 Orang	75 Orang	25,038,033	24,663,033	24,663,033
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kesertaan organisasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana	60 persen	60 persen			
2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	1 Dokumen	-	4,960,000	4,960,000
2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	2 Laporan	96,863,000	400,600,743	400,600,743
2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Kampung	15 Kampung	79,959,344	304,280,098	304,280,098
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaan Kelompok Kegiatan Bangga Kencana	75 persen	75 persen			
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk	100 persen	100 persen			
2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	125,994,338	123,674,133	123,674,133
2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	110,964,369	114,697,827	114,697,827
2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	15 Unit	5 Unit	23,100,000	94,621,410	94,621,410
2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	50 Orang	241 Orang	164,904,246	162,220,957	162,220,957
2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	2 Laporan	74,696,280	93,696,348	93,696,348
2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	200 Orang	200 Orang	10,000,000	-	
2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	153 Kelompok	120 Kelompok	90,000,000	149,286,180	149,286,180
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk	80 Persen	80 Persen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	1 Organisasi	129,551,000	133,383,000	133,383,000
2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Laporan	3 Laporan	109,982,468	311,943,139	311,943,139
2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4 Laporan	4 Laporan	99,997,600	439,201,348	638,029,348
2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1 laporan	-	213,019,344	213,019,344
2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1 laporan	-	319,725,246	319,725,246
2.08.2.14.0.00.11.0001 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak						
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor	100 persen	100 persen			
2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		
TOTAL				17,551,192,800	24,421,518,058	25,263,518,058

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi) Ketersediaan Energi dan Protein	89 Nilai AKE= 2.400 kkal/kapi AKE=kkal/ AK	89 Nilai AKE= 2.400 kkal/kapi AKE=kkal/ AK			
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5 Dokumen	5 Dokumen			
2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	143,767,344	139,935,218	139,935,218
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Ton	70 Ton			
2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Ton	10 Ton	292,063,632	289,838,264	289,838,264
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari WNPg tahun 2012	2150 kkal/kap/hari Kkal/kap/hari dan gr	2150 kkal/kap/hari Kkal/kap/hari dan gr			
2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Buku (Buku PPH Kon Dokumen	3 Buku (Buku PPH Kon Dokumen	282,379,882	274,025,725	274,025,725
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Target 17 Klp P2L da Laporan	Target 17 Klp P2L da Laporan	386,063,951	1,174,599,697	1,174,599,697
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100 Persen	100 Persen			
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	3 Dokumen	3 Dokumen			
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	3 Dokumen	3 Dokumen	140,685,000	136,199,621	136,199,621
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	100 undefined persen undefined	100 persen			
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 Persen	100 Persen			
2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	635,550,613	135,438,163	135,438,163
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			
2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	24,541,095	24,501,095	24,501,095
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	-	100 Persen			
2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	91 Orang/bulan	19,392,061,295	20,510,852,002	20,510,852,002
2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	24,541,095	24,501,095	24,501,095
2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100 Persen			
2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	128 Paket	150 Paket	180,000,000	135,937,200	135,937,200
2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	57 Orang	298,112,000	909,690,000	909,690,000
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya admnistrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			
2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10,000,000	9,986,690	9,986,690
2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	296,195,933	298,536,852	298,536,852
2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	49,992,412	49,790,168	49,790,168
2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	87,833,550	218,018,353	218,018,353

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	1,716,000	1,716,000	1,716,000
2.09.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	9,120,000	6,000,000	6,000,000
2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	985,090,000	980,690,000	1,281,209,000
2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	-	100 Persen			
2.09.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	1,610,000	-	1,010,000
2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	148,570,000	161,398,000	161,398,000
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	13,720,000	17,400,000	17,400,000
2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27,000,000	27,000,000	27,000,000
2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	69 Laporan	60 Laporan	2,683,828,000	2,798,080,736	2,903,552,781
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit	1,166,875,595	885,744,367	885,744,367
2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	99 Unit	46,170,000	66,870,000	66,870,000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	21.511 Ton	20.904,80 Ton			
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	10 Kelompok 21511 Ton	10 Kelompok			
3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	120 Orang	120 Orang	202,165,000	785,349,303	785,349,303
3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	12 Kelompok	12 Kelompok	134,992,950	773,032,011	773,032,011
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi perikanan tangkap	100 Persen 21511 Ton	20.904,80 Ton			
3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5000 Layanan	5000 Layanan	185,000,000	575,536,491	585,536,491
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	-	3300 Ton			
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang di bina	12 Kelompok	12 Kelompok			
3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	15 Kelompok	217,866,000	217,665,859	217,665,859
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang Disediakan	-	17 Jenis			
3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	121,360,000	111,583,093	111,583,093
3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit	382,617,000	613,024,972	613,024,972
3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	200 Orang	200 Orang	160,964,000	159,581,781	159,581,781
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	-	33 Persen			
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil sektor perikanan	-	10 Unit Usaha			
3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	560,732,000	560,731,676	560,731,676
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	-	33 Persen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	900 Ton	900 Ton	35,000,000	319,867,510	319,867,510
3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	90,000,000	432,396,543	432,396,543
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	-	100 Persen			
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	100 Persen			
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	3 Laporan	332,295,000	727,807,239	727,807,239
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	3 Laporan	214,783,754	211,245,659	211,245,659
3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok			
3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	7 Laporan	4 Laporan	247,224,615	391,593,558	391,593,558
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan jumlah populasi ternak di kelompok	500 Ekor	500 Ekor			
3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500 Ekor	46 Ekor	414,521,382	441,083,707	441,083,707
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	-	100 Persen			
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dan peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	100 Persen			
3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	1 Unit	350,000,000	339,216,796	339,216,796
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan Cakupan pembinaan pelaku usaha olahan peternakan	-	100 80 Persen Persen			
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penjaminan kesehatan hewan	100 Persen	100 Persen			
3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12 Kasus	2000 Kasus	169,390,599	818,187,804	818,187,804
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan Pangan dan Non Pangan	100 Persen	100 Persen			
3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2 Laporan	2 Laporan	261,645,904	636,581,929	636,581,929
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya operasional pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas	-	100 Persen			
3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	80,116,332	76,862,156	76,726,111
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	-	100 Persen			
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	100 Persen			
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	30 Ha	30 Ha	106,655,000	106,654,693	106,654,693
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	-	100 Persen			
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	100 Persen			
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Unit	15 Unit	145,847,755	1,202,385,055	1,202,385,055
3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 Unit	6 Unit	57,147,128	206,110,233	212,110,233
2.09.3.25.3.27.12.0002 UPT Rumah Potong Hewan						
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100 Persen	100 Persen			
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian						
3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	245,443,771	244,929,058	345,284,058
2.09.3.25.3.27.12.0003 UPT Balai Benih Ikan						
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang di bina	12 Kelompok	12 Kelompok			
3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	11 Kelompok	12 Kelompok	400,000,000	1,119,819,924	1,119,819,924
TOTAL				32,443,255,587	40,347,996,296	40,871,216,296

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	96,00 persen 83 Persen	91 %			
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pemantauan kualitas lingkungan hidup Cakupan pemantauan kualitas lingkungan hidup Prosentase pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan Prosentase pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan Prosentase pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	96 % 97 Persen 97 % 97 persen 97 Persen	95 %			
2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	319,347,400	293,906,470	293,906,470
2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaa Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	9,915,000	189,850,220	189,850,220
2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	213,556,865	213,491,291	310,035,186
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pemantauan kualitas lingkungan hidup Cakupan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	97 Persen 100 Persen	0.95			
2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	49,237,363	244,996,462	244,996,462
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Kehati Cakupan pengelolaan Kehati ; Cakupan pengelola taman kota	69,49 Persen 85,00 ; 0 persen	76 %			
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas pengelolaan Kehati Luas pengelolaan Kehati	50,56 Ha 98 Ha	49,56 Ha			
2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	149,999,500	380,755,970	380,755,970
2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	48,56 Ha	49,56 Ha	11,313,542,933	13,134,771,071	13,293,771,071
2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Orang	2 Orang	2,000,000	595,126,253	595,126,253
2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	3 Unit	2,000,000	1,012,572,610	1,012,572,610
2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	49,999,870	114,290,819	114,290,819
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	100,00 persen 100 Persen	100,00 persen 100 Persen			
2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan pengelolaan limbah B3 dari kantor dan oli bekas Jumlah laporan pengelolaan limbah B3 dari kantor dan oli bekas	1 Dokumen 1 laporan	1 Dokumen 1 laporan			
2.11.05.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1,913,634	1,913,634
2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	8,200,000	8,206,175	8,206,175
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	4,00 persen 96 %	4,00 persen 96 %			
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan Terlaksananya kegiatan pembinaan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	100 nilai 100 persen	100 nilai 100 persen			
2.11.06.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15 Dokumen	15 Dokumen	3,027,882	3,027,882	3,027,882
2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	52,797,685	37,385,392	37,385,392
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	80 Persen 80,00 persen	60 %			
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis diklat dan penyuluhan Jumlah jenis diklat dan penyuluhan	2 jenis 2 Jenis	2 jenis 2 Jenis			
2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	10,050,000	-	29,917,484

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Orang	1 Orang	10,050,000	20,040,000	20,040,000
2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga	113,172,000	361,985,534	361,985,534
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan hidup Cakupan penghargaan lingkungan hidup	100,00 persen 80 Persen	100,00 persen 80 Persen			
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan yang diberikan Penghargaan yang diberikan	4 jenis 4 Jenis	4 jenis 4 Jenis			
2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	4 Entitas	245,352,656	239,022,656	239,022,656
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan kasus Cakupan penanganan kasus	100 Persen 100,00 persen	100 Persen 100,00 persen			
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yg diselesaikan Prosentase pengaduan yang ditangani	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %			
2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	1 Pengaduan	43,380,263	24,229,500	24,439,500
2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	1 Perkara	2,035,000	2,062,000	2,062,000
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase penanganan sampah Persentase penanganan sampah Persentase pengelolaan sampah Persentase pengurangan sampah	71 % 71 Persen 100,00 persen 74 Persen	28 72 % %			
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tereduksi Prosentase Penanganan Sampah Prosentase Pengurangan Sampah	29 Persen 71 % 29 %	11.797 ton 29.913 ton			
2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	15 Kelompok	15 Kelompok	49,968,346	101,289,462	101,289,462
2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	9,983,000	8,592,000	8,592,000
2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	15,109 Ton	15,109 Ton	16,678,044,865	17,212,211,294	17,617,314,294
2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	1 Laporan	2,029,228,692	631,465,019	631,465,019
2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	7 Ton	7 Ton	1,000,000,005	977,889,091	977,889,091
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen			
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi		6 Jenis			
2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	1,168,170	1,168,170
2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	584,085	584,085
2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	584,085	584,085
2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	3,570,510	3,570,510
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	11,846,907,467	13,746,698,065	13,746,698,065
2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,523,235	2,523,235
2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	2,000,000	1,518,621	1,518,621
2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket	95,000,000	204,037,500	204,037,500
2.11.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.11.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	250,000,000	1,150,614,000	1,232,964,297
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	494,324,828	322,139,066	409,541,566
2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000
2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	28,622,628	29,549,982	29,549,982
2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36,552,944	32,800,095	98,183,419
2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1,032,470,000	1,124,044,479	1,436,044,479
2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	1,577,028	1,577,028
2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	5 Unit	44,000,000	420,125,614	420,125,614
2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	596,760,612	494,048,743	494,048,743
2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000
2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	91,200,000	96,300,000	98,800,000
2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,007,200,000	1,184,513,894	1,891,513,894
2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	6,854,291,001	6,922,920,000	7,007,945,000
2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10,000,000	37,925,622	37,925,622
2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	85,000,508	84,631,720	106,196,220
TOTAL				54,879,719,313	61,697,455,319	63,751,455,319

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8 Paket	370,662,263	416,241,786	516,104,970
2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	205,408,500	227,007,000	227,007,000
2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	29,981,423	199,449,300	199,449,300
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,99 Rasio	0,99 Rasio			
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase terlaksananya kegiatan pendaftaran kependudukan	100 Persen	100 Persen			
2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	383,143,431	654,008,490	654,008,490
2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	58,199,971	148,558,925	148,558,925
2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	100 persen	100 persen			
2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1200 Dokumen	1200 Dokumen	988,650	-	
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 persen	100 persen			
2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	9,998,000	-	
2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 persen	100 persen			
2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	7,567,000	-	
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio anak berakte kelahiran Rasio Pasangan berakte nikah Cakupan kepemilikan akta perceraian	0,96 Rasio 0,73 Rasio 96 persen	0,73 0,96 96 Rasio Rasio persen			
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 persen	100 persen			
2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	6 Layanan	1,138,173,814	1,528,016,226	1,528,016,226
2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	21 Paket	21 Paket	988,650	-	
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 persen	100 persen			
2.12.03.2.02.0002 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	9,998,000	-	
2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 persen	100 persen			
2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	7,567,000	-	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi Adminduk	100 persen	100 persen			
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 persen	100 persen			
2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	76,141,636	76,185,180	76,185,180
2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	4,955,150	-	
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 persen	100 persen			
2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	106,470,572	1,359,907,561	1,359,907,561
2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 persen	100 persen			
2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	7,567,000	-	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyampaian data profil kependudukan	100 Persen	100 Persen			
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	100 persen	100 persen			
2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,133,625	4,089,320	4,089,320
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,999,614	179,785,495	183,734,199
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	8,860,442,685	8,831,403,944	9,048,967,670
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	67,710,000	62,690,000	62,690,000
2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	94,028,000	92,028,000	92,028,000
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangкта Daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	3,430,839	3,155,724	4,215,835
2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	64,989,612	17,568,285	17,568,285
2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	98,161,789	97,377,587	97,377,587
2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	612,098,000	605,089,000	900,217,000
2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	2 Unit	3,341,875	6,055,793	6,055,793
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	23,500,000	23,500,000	23,500,000
2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	314,400,000	314,400,000	314,400,000
2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	820,770,000	1,171,580,908	1,190,924,348
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen			
2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	19 Unit	500,346,492	530,859,992	530,859,992
2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	19 Unit	25,348,000	27,218,500	27,218,500
2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	4 Unit	56,875,000	81,250,000	81,250,000
2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	66,000,000	71,400,000	71,400,000
2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	5,000,000	4,960,000	4,960,000
TOTAL				14,043,386,591	16,733,787,016	17,370,694,181

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana lalu lintas jalan yang layak fungsi Cakupan Kualitas Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peningkatan Pelayanan Keselamatan LLAJ Persentase pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	72 Persen 0 persen 100 Persen 100 Persen	72 Persen 0 persen 100 Persen 100 Persen			
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Terlaksananya Ketertiban dan Keselamatan Pengguna Jalan	25 Persen 0 dokumen	25 Persen 0 dokumen			
2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	599,950,129	670,225,035	670,225,035
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota yang dipasang	100 Persen 80 persen	100 Persen 80 persen			
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2 Usulan Pokir	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	693,122,800	9,978,954,535	9,978,954,535
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3 Usulan Pokir	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit	8 Unit	4,196,115,833	1,090,311,173	1,090,311,173
2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 2 Usulan Pokir	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	404,040,000	374,566,710	374,566,710
2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3 Usulan Pokir	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	7 Unit	5,880,440,448	6,103,845,152	6,403,845,152
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Pengelolaan Fasilitas Parkir Jumlah Titik Parkir yang Berizin	45 Persen 6 titik	45 Persen 6 titik			
2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	217,498,808	498,728,941	498,728,941
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terlayannya Kendaraan Laik Uji	100 Persen 75 persen	100 Persen 75 persen			
2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	154,296,154	154,567,589	154,567,589
2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang	48,770,000	23,047,000	23,047,000
2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 Dokumen	4000 Dokumen	100,000,000	25,000,000	25,000,000
2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	19,781,569	134,959,969	134,959,969
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5 Unit	5 Unit	95,768,000	113,108,000	113,108,000
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 Persen 1 dokumen	100 Persen 1 dokumen			
2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	73,571,486	679,944,951	679,944,951
2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	31,952,804	30,742,804	30,742,804
2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dokumen	3 Dokumen	178,420,895	28,464,235	28,464,235
2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	14,763,235	14,423,235	14,423,235
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum Meningkatnya Pelayanan Angkutan	100 Persen 12 kali razia	100 Persen 12 kali razia			
2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	9,950,000	9,090,000	9,090,000
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Kebijakan Perijinan Pelayaran Cakupan kualitas Layanan Pelayaran Cakupan pemenuhan standar fasilitas pelayaran Persentase meningkatnya keselamatan pelayaran kapal angkutan penyebrangan	90 Persen 0 persen 58 Persen 100 Persen	90 Persen 0 persen 58 Persen 100 Persen			
2.15.03.2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Persen 0 -	0 Persen 0 -			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.15.03.2.09.0001 Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	29,990,000	29,050,000	29,050,000
2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal	0 Persen 0 -	0 Persen 0 -			
2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	659,787,329	206,535,000	206,535,000
2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	99,891,396	12,699,950	12,699,950
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen			
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi sesuai dengan Tahapan dan Waktu	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen			
2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	45,742,235	30,358,235	30,358,235
2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	25,186,235	29,238,235	29,238,235
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan tepat waktu Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 persen 12 Bulan	100 persen 12 Bulan			
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	8,551,887,600	9,158,062,858	9,263,062,858
2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22,905,404	8,579,235	8,579,235
2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	19,991,588	1,513,941	1,513,941
2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1,332,391	3,823,235	3,823,235
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	58 persen 12 Bulan	58 persen 12 Bulan			
2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	198,311,652	195,730,584	898,877,022
2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	58 Orang	1,483,601,000	2,259,621,000	4,758,765,000
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum Kepegawaian Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan			
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,447,064	6,546,040	6,546,040
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	319,849,639	517,539,562	517,539,562
2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	276,910,658	627,185,648	1,124,185,648
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	110,686,498	118,425,308	118,425,308
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	642,510,000	986,133,000	1,286,778,382
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen 0 Persen	100 persen 0 Persen			
2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	285,948,000	488,100,000	488,100,000
2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	195,531,370	125,523,925	525,588,105
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan			
2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	8,570,000	9,550,000	9,550,000
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	459,000,000	464,000,000	464,000,000
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3,053,220,000	2,587,737,952	2,643,737,952
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	28 Unit	884,782,800	1,351,867,622	1,351,867,622
2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	21,300,000	46,350,000	46,350,000
2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	49,660,930	23,988,737	23,988,737
TOTAL				30,166,485,950	39,218,139,396	44,079,139,396

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	48 persen	48 persen			
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai STRAKOM dan SOP yang telah ditetapkan Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	80 % 80 %	80 % 80 %			
2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	44,997,852	241,549,124	241,549,124
2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	24 Dokumen	24 Dokumen	224,999,574	2,204,480,137	2,204,480,137
2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	299,990,519	383,971,574	383,971,574
2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	369,009,000	689,498,411	689,498,411
2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	13 Layanan	13 Layanan	1,018,822,200	3,425,733,419	3,425,733,419
2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Orang	1 Orang	22,759,000	229,996,000	229,996,000
2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	15 Dokumen	15 Dokumen	236,231,738	437,281,855	437,281,855
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	83,87 Persen 41 Persen	83,87 Persen 41 Persen			
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik Persentase ruang publik yang memiliki akses internet	83,87 Persen 100 Persen 80 Persen	83,87 Persen 100 Persen 80 Persen			
2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	286,678,000	1,185,952,170	2,382,728,970
2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	7,748,732,181	7,745,317,164	7,745,317,164
2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	519,973,790	4,019,925,367	4,019,925,367
2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	17 Unit	17 Unit	597,300,972	490,947,138	490,352,138
2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	229,826,000	206,774,783	206,774,783
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %			
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	47,840,982	73,643,340	73,132,340
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	9,437,377,197	11,415,390,206	11,418,455,523
2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	5,384,596	50,436,170	49,947,170
2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	6,165,129	51,613,170	52,355,340
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	55 Paket	115,103,237	99,081,945	99,081,945
2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	99,530,000	35,000,000	35,000,000
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	3,450,797	3,059,849	3,059,849
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	283,628,989	484,866,750	517,409,463
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	178,627,513	177,505,368	177,505,368
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	53,530,298	49,099,851	49,099,851
2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	8,828,765	3,500,000	3,500,000
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	748,595,440	728,579,000	728,579,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-	0 Unit			
2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	60,000,000	1,128,600,000	1,128,600,000
2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	50,000,000	-	
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6,300,000	7,460,000	7,460,000
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	6,882,000	-	500,000
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,260,768,000	1,370,123,170	1,386,123,170
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	324,842,142	52,497,999	52,497,999
2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	9,404,000	236,837,070	236,837,070
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	52,498,897	245,645,150	245,645,150
2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	210,953,319	174,000,000	174,000,000
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %			
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	100 %	100 %			
2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	1 Dokumen	165,373,750	165,330,273	165,330,273
2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,679,725	3,679,725	3,679,725
2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	1 Dokumen	48,906,200	48,902,200	48,902,200
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	62,02 %	62,02 %			
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %			
2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	96,945,440	330,898,500	330,898,500
2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	119,663,000	219,669,000	219,637,000
TOTAL				25,003,600,242	38,416,845,878	39,664,845,878

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang Bermitra dengan Pasar Retail Modern	0,34 % 1,38 %	0,34 % 1,38 %			
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1,85 %	1,85 %			
2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	99,999,800	99,999,675	599,999,315
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DKUKMP)	100 %	100 %			
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian DKUKMP Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian UPT Pasar	1 Paket 100 % 100 %	1 Paket 100 % 100 %			
2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	866,290,000	1,619,454,937	2,237,610,247
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %			
2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36,864,350	153,669,193	101,591,343
2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	2,004,378,863	1,394,049,395	1,206,767,430
2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1,179,989,189	1,869,035,000	1,869,645,302
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan DKUKMP Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan UPT Pasar	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan			
2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10,095,100,000	10,924,723,700	10,995,057,130
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DKUKMP Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan UPT Pasar	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan			
2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	62 Unit	857,387,298	903,098,119	823,126,932
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	100 %	100 %			
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	3 Unit	3 Unit			
3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 5 Usulan Pokir	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	1,689,895,476	2,187,608,530	2,518,921,089
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pembinaan	20 Orang	20 Orang			
3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 3 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	420,114,046	1,147,098,200	1,496,919,200
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah Pesentase IKM yang menerapkan sistem managemen produk	1 % 1,52 %	1 % 1,52 %			
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	162,516,100	524,302,324	523,502,324
3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	59,957,419	48,007,028	46,955,676
3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	15,113,000	265,020,000	206,928,000
3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	12,466,000	462,222,950	253,022,540
3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Usulan Pokir1 Usulan Aspirasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1,212,600,866	4,271,607,144	3,880,568,255
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	2,97 %	2,97 %			
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						
3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	74,963,588	58,391,882	56,373,294

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	99,927,593	61,386,699	42,386,699
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	2,97 %	2,97 %			
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memiliki izin Industri	2 %	2 %			
3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	99,993,000	48,371,976	47,971,976
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	19.74 Persen	19.74 Persen			
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan pemenuhan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen			
2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit Usaha	9,965,843	9,965,838	9,965,838
2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha			
2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	9,986,283	9,986,278	9,986,278
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	8,97 Persen	8,97 Persen			
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	100 %	100 %			
2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	23,551,366	23,550,741	23,550,741
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	54,29 %	54,29 %			
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilakukan penilaian	30 %	30 %			
2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	511,274,223	511,253,632	511,253,632
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	19,23 Persen	19,23 Persen			
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Pengurus dan Pengawas Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57,69 %	57,69 %			
2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	100 Orang	174,999,649	816,627,210	816,627,210
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Tingkat pertumbuhan penyaluran dan koperasi	7,50 %	7,50 %			
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP_ USP yang menyalurkan dana pinjaman	75 %	75 %			
2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	2,680,000	2,664,000	2,664,000
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang Bermitra dengan Pasar Retail Modern	0,34 % 1,38 %	0,34 % 1,38 %			
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	7542 Unit Usaha	7542 Unit Usaha	14,964,000	14,962,000	14,962,000
2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3 Orang	3 Orang	12,492,005	12,492,205	12,492,205
2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 6 Usulan Pokir	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	500 Orang	500 Orang	1,560,430,447	5,406,978,280	5,406,978,280

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	0,5 %	0,5 %			
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang Mengikuti Pelatihan	2 %	2 %			
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase capaian atas peningkatan asset dan omset pelaku usaha mikro	5 %	5 %			
2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 1 Usulan Pokir1 Usulan Aspirasi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	130 Unit Usaha	130 Unit Usaha	1,207,737,535	3,757,890,499	3,757,890,499
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DKUKMP)	100 %	100 %			
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyampaian laporan kinerja OPD	100 %	100 %			
2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	23,244,647	504,647	504,647
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	14,142,363,302	15,004,243,822	15,004,243,822
2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	23,244,647	504,647	504,647
2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	23,244,647	504,647	504,647
2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	23,244,647	504,647	504,647
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian DKUKMP Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian UPT Pasar	1 Paket 100 % 100 %	1 Paket 100 % 100 %			
2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	70 Orang	870,215,000	2,078,032,000	2,078,032,000
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %			
2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	66,141,160	84,685,480	84,685,480
2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42,807,880	176,860,470	176,860,470
2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	194,819,785	228,111,380	228,111,380
2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,080,000	5,040,000	5,040,000
2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	853,778,000	75,630,000	75,630,000
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan DKUKMP Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan UPT Pasar	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan			
2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DKUKMP Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan UPT Pasar	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	15,000,000	20,000,000	20,000,000
2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,572,800,000	2,572,800,000	2,572,800,000
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DKUKMP Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan UPT Pasar	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan			
2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	108 Unit	74,770,000	57,510,000	57,510,000
2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	344,628,540	214,944,127	214,944,127
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perijinan	37,5 Persen	37,5 Persen			
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase SKA yang diterbitkan dengan jumlah permohonan SKA yang masuk	100 %	100 %			
3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	12 Dokumen	12 Dokumen	45,100,211	45,100,211	45,100,211
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	100 %	100 %			
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	3 Unit	3 Unit			
3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5 Usulan Pokir	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	95,590,665	95,590,665	95,590,665
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting	100 %	100 %			
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan ketersediaan bahan pokok dan barang penting	12 Laporan	12 Laporan			
3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		48 Laporan	78,088,369	78,022,000	78,022,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48 Laporan	48 Laporan			
3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jenis komoditi bahan pokok dan barang penting yang dipantau stabilitasnya	23 Jenis	23 Jenis	425,710,129	424,979,856	424,979,856
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas	0,5 %	0,5 %			
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang) Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	2 Orang 2 Pelaku Usaha	2 Orang 2 Pelaku Usaha			
3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	250,270,000	450,136,260	450,136,260
3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	9 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	137,530,523	116,757,000	116,757,000
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	64 %	64 %			
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan pengawasan alat UTTP	64 %	64 %			
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	900 Unit	900 Unit	382,121,873	181,802,836	181,802,836
3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	12 Orang	12 Orang	64,182,573	10,046,000	10,046,000
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran	100 Persen	100 Persen			
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk yang difasilitasi pemasaran produk	5 Produk	5 Produk			
3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	10 UMKM	895,755,856	611,830,816	611,830,816
TOTAL				44,170,370,393	59,138,558,946	60,007,858,946

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	4,375 Triliyun	4,375 Triliyun			
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	390,500,000	77,979,535	97,589,535
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumah dokumen rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	69,980,000	69,980,000
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	621,203,525	621,203,525
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	2 Investor	2 Investor			
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung pameran yang minat investasi	100 Orang	100 Orang			
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	3,025,950,000	1,883,966,273	2,883,520,185
2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	139,050,000	23,950,000	31,350,000
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	89.30 Nilai	89.30 Nilai			
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	6 Dokumen	6 Dokumen			
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	118,450,000	309,288,095	309,230,307
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	17 Pelaku Usaha	17 Pelaku Usaha	159,135,000	102,261,448	112,962,448
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	134,415,000	94,901,761	838,660,150
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	50 Persen	50 Persen			
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	480 LKPM	100 Persen			
2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	10 Kegiatan Usaha.	72,100,000	120,012,134	120,012,134
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	92,700,000	605,656,247	605,656,247
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	41,200,000	95,640,144	95,640,144
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Perizinan	100 Persen	100 Persen			
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan permintaan data perizinan dan non perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	560 Dokumen	560 Dokumen	583,000,000	882,140,021	1,631,698,886
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen			
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen			
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	993,527	993,527
2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	431,054	431,054
2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	431,054	431,054
2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	431,054	431,054
2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	431,054	431,054

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	895,245	895,245
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	38 Dokumen	1 Dokumen			
2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	37 Orang/bulan	8,160,338,323	8,774,521,255	8,774,521,255
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	73 Orang	1 Dokumen			
2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	30,596,356	121,005,000	118,650,000
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	73 Orang	73 Orang			
2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	154,725,070	187,528,547	207,299,823
2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	112,879,992	30,130,532	38,422,102
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	50,010,001	50,298,695	53,395,663
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	2,520,000	2,520,000
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	319,512,000	392,526,000	724,437,000
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	5 Unit	5 Unit			
2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	123,801,100	-	
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			
2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7,000,000	7,000,000	12,000,000
2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	470,400,000	608,400,000	608,400,000
2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	36 Laporan	1,583,176,450	1,752,533,952	1,656,293,760
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang	2 Dokumen	1 Dokumen			
2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	281,021,500	399,924,000	399,924,000
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	67,500,000	86,610,000	86,610,000
TOTAL				16,701,460,792	17,303,590,152	20,103,590,152

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Organisasi Kepemudaan	100 %	100 %			
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor dan Wira Usaha Muda yang Berdaya Saing	80 Orang	80 Orang			
2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	406 Orang	200 Orang	331,772,882	326,476,882	326,476,882
2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	160 Orang	170 Orang	789,215,646	1,103,431,764	1,103,431,764
2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2 Usulan Pokir	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	110 Orang	130 Orang	816,839,621	1,153,147,620	1,153,147,620
2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	50 Orang	50 Orang	127,820,065	127,056,065	127,056,065
2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	259,488,305	257,935,473	257,935,473
2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	70 Orang	24 Orang	238,088,753	235,483,385	235,483,385
2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 2 Usulan Pokir	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	640 Orang	200 Orang	1,696,006,951	2,269,052,579	2,269,052,579
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota yang di Kembangkan	76 %	76 %			
2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	100 Orang	10 Orang	190,997,990	-	5,018,000
2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	3 Dokumen	431,379,843	748,141,310	748,141,310
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Atlit yang Berprestasi	0.4667	0.4667			
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	5 Unit	5 Unit			
2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	6 Unit	7,362,769,665	18,995,106,787	19,193,031,787
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit yang Memperoleh Medali	50 Medali	50 Medali			
2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	19 Dokumen	1,715,565,544	4,159,142,176	4,159,142,176
2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	310 Orang	320 Orang	1,613,608,206	5,844,245,440	4,786,645,440
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Prestasi Atlit Olahraga yang Dilaksanakan di Tingkat Provinsi	100 %	100 %			
2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	2 Orang	2 Orang	4,992,000	-	
2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	- Orang	204,992,000	-	
2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	-	157 Orang	-	-	2,530,591,000
2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Dokumen	2 Dokumen	101,680,000	180,888,000	180,888,000
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Dikembangkan	2 Organisasi	2 Organisasi			
2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	2 Organisasi	2,246,786,211	5,411,039,940	5,411,039,940
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi yang Kembangkan	7 Kegiatan	7 Kegiatan			
2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	8 Dokumen	171,478,113	3,842,642,173	3,843,192,471
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	100 %			
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Anggota Gugus Depan di Kota Bontang yang Aktif	2840 Orang	2840 Orang			
2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 Laporan	4 Laporan	321,015,521	2,274,665,890	2,274,665,890
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	90,735,620	20,995,620	20,995,620
2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi Pemenuhan Layanan Keuangan	100 %	100 %			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	40 Orang/bulan	7,898,078,000	9,214,430,479	9,214,430,479
2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,046,470	5,046,470	5,046,470
2.19.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1,492,075	1,492,075	1,492,075
2.19.01.2.05 Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Menunjang Pelayanan perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	3,000,000	-	5,250,000
2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	23 Orang	274,140,000	274,140,000	274,140,000
2.19.01.2.06 Administarsi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Menunjang Pelayanan perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan			
2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	69,546,045	69,546,045	69,546,045
2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	28 Paket	2,642,907,305	3,251,074,001	3,311,314,703
2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	52,636,150	54,326,150	54,326,150
2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	94,078,857	94,678,857	94,678,857
2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39,884,715	39,884,715	39,884,715
2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	20 Laporan	496,340,000	567,500,000	866,711,000
2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	24,858,536	172,348,536	172,348,536
2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	5 Unit			
2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	-	-	5,018,000
2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan0	-	1 Unit	-	-	5,018,000
2.19.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	95,515,000	-	
2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Sarana dan Prasaran Perkantoran Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah	16 Laporan	16 Laporan			
2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	12,991,496	12,991,496	12,991,496
2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,833,587,645	1,406,100,000	1,406,100,000
2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3,153,611,000	3,672,976,528	3,776,736,528
2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang yang Dipelihara Oleh Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37 Unit	37 Unit			
2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	28 Unit	437,881,449	496,372,507	496,372,507
2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	60 Unit	133,900,000	180,790,000	180,790,000
2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	149,556,000	151,446,000	151,446,000
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Objek Daya Tarik Wisata Kab/Kota yang Representatif	84 %	84 %			
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang di kelola Kab/Kota	1 ODTW	1 ODTW			
3.26.02.2.01.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	2 Unit	12,600,023,258	13,776,177,056	13,776,177,056
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang di Tingkatkan	100 %	100 %			
3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	4 Unit	3,238,991,500	2,183,058,052	2,183,058,052
3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	- Laporan	4,992,000	-	
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	386636 Orang	386636 Orang			
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	386636 Orang	386636 Orang			
3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	4,992,000	133,693,030	133,693,030
3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	563,960,501	614,651,501	614,651,501
3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	4,992,000	19,980,000	19,980,000
3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	2 Kegiatan	775,931,366	794,780,110	794,780,110
3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	4 Promosi	294,185,300	925,320,987	925,320,987

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Pengembangan dan Perlindungan Pelaku Ekonomi Kreatif	50 %	50 %			
3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Ruang Kreatif	50 %	50 %			
3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	- Unit	4,992,000	-	
3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-			
3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Produk	1 Produk	60,516,500	60,725,000	60,725,000
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sumber Daya Pariwisata yang Dikembangkan ; Presentase Sumber Daya Ekraf yang Dikembangkan	70 ; 26 %	70 ; 26 %			
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di Tingkatkan Kapasitasnya	360 Orang	360 Orang			
3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	4,992,000	-	5,018,000
3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	10 Orang	285 Orang	4,992,000	860,873,317	860,873,317
3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	100 Orang	- Orang	270,607,627	-	
3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	27 Orang	113 Orang	204,175,046	1,100,194,046	1,100,194,046
3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	- Orang	4,992,000	-	
3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	- Laporan	4,992,000	-	
TOTAL				54,182,610,777	87,084,048,062	89,244,048,062

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pemustaka Perpustakaan	42350 Orang	42350 Orang			
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	11 Bahan Pustaka	11 Bahan Pustaka			
2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	14 Layanan	1 Layanan	195,428,960	473,838,339	552,868,142
2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	11 Perpustakaan	85 Perpustakaan	336,195,251	1,198,354,177	1,198,354,177
2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Eksemplar	1 Eksemplar	11,969,400	21,536,166	21,536,166
2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	11 Perpustakaan	11 Perpustakaan	88,802,000	79,229,046	79,229,046
2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	99,745,000	393,373,546	403,893,546
2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1000 Eksemplar	10 Eksemplar	152,884,034	24,696,830	24,696,830
2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	10 Eksemplar	23,350,000	222,063,829	205,295,041
2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	12 Dokumen	5,702,335	5,556,092	5,556,092
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi budaya gemar membaca	1 Orang	100 persen			
2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Perpustakaan	-	4,500,000,000	4,500,000,000
2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	24 Orang	182,610,600	243,420,114	243,420,114
2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	273,936,052	413,020,232	331,420,232
2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	3 Orang	68,780,000	10,332,927	19,238,927
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	8,141,456,563	9,159,867,396	9,159,867,396
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			
2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	90,000,000	110,960,000	110,960,000
2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	172,000,000	454,382,000	454,382,000
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen			
2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33,879,353	30,521,940	43,114,960
2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	334,823,513	695,367,648	709,721,913
2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42,000,000	90,674,779	88,499,072
2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30,827,128	27,772,186	45,883,754
2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55,000,000	51,827,674	50,033,556
2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	969,248,000	902,919,000	949,916,000
2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen			
2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	8,000,000	65,532,605	61,950,561
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 Persen	100 Persen			
2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000
2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	623,989,400	529,650,000	445,650,000
2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,338,809,200	2,366,565,312	2,366,565,312

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen			
2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	438,483,380	403,650,500	403,650,500
2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	68,000,000	70,040,000	70,040,000
2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	62,782,571	62,444,012	62,444,012
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	75 Persen	75 Persen			
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	5 Perangkat daerah	5 Perangkat daerah			
2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	5 Berkas	5 Berkas	75,000,000	69,602,381	69,602,381
2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2 Berkas	2 Berkas	142,218,340	141,683,046	141,683,046
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	2 Laporan	159,573,143	155,260,901	155,260,901
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah			
2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Arsip	1 Arsip	372,603,296	371,679,530	371,531,504
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola simpul JIKN	30 Perangkat daerah	30 Perangkat daerah			
2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	275 Pengguna	100 Pengguna	149,999,880	148,797,065	548,670,084
2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	3 Laporan	555,320,164	1,053,764,438	1,053,764,438
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	18 Persen	50 Persen			
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah pencipta arsip yang melaksanakan pemusnahan arsip	1 Perangkat daerah	1 Perangkat daerah			
2.24.03.2.01.0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1 Berkas	1 Berkas	20,000,000	17,478,673	17,478,673
2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang akan diakuisisi dan dimusnahkan	500 Arsip	3 Arsip			
2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Daftar	3 Daftar	20,000,000	13,320,000	13,320,000
2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	3 Arsip	20,000,000	56,290,000	56,290,000
2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang di autentikasi	3 Perangkat daerah	3 Perangkat daerah			
2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	700 Arsip	3 Arsip	15,000,000	14,447,666	14,447,666
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase daftar arsip dan SOP arsip yang disusun	18 Persen	20 Persen			
2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang akan diakuisisi dan dimusnahkan	2 Arsip	2 Arsip			
2.24.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	2 SOP	2 SOP	37,500,000	34,888,939	34,572,947
2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	1 Arsip	37,500,000	6,660,000	6,660,000
TOTAL				16,458,417,563	24,696,468,989	25,096,468,989

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
401 SEKRETARIAT DAERAH						
40102 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan; Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakat	100; 100 persen; Persen	100; 100 persen; Persen			
40102201 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penataan administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan	100 Persen	100 Persen			
401022010001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	5 Dokumen	389,982,000	298,191,183	298,191,183
401022010002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	1,270,000,000	1,561,731,620	2,547,823,015
401022010003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	4 Dokumen	416,861,171	416,811,690	416,811,690
40102202 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan kegiatan kesejahteraan raykat yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen			
401022020001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual 6 Usulan Pokir2 Usulan Aspirasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	12 Dokumen	33,680,551,355	41,627,521,971	48,875,802,691
401022020002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	12 Dokumen	783,753,749	1,034,658,267	1,034,658,267
401022020003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	12 Dokumen	5,729,696,129	5,471,132,129	12,328,632,129
40102203 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Kebijakan yang terlaksana	100 Persen	100 Persen			
401022030001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	44 Dokumen	34 Dokumen	562,534,532	561,000,532	861,000,532
401022030002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	5 Kasus	4 Kasus	1,193,937,500	1,893,372,678	1,993,372,678
401022030003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	75 Dokumen	40 Dokumen	167,886,875	167,614,791	167,614,791
40102204 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya fasilitas kerja sama Daerah	100 Persen	100 Persen			
401022040001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	7 Dokumen	7 Dokumen	440,490,000	460,465,000	460,465,000
401022040003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10 Laporan	10 Laporan	390,625,000	370,616,120	370,616,120
40103 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase peningkatan implementasi kebijakan bidang perekonomian; Persentase peningkatan implementasi kebijakan bidang pembangunan	100; 100 Persen; Persen	100; 100 Persen; Persen			
40103201 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
401032010002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan	96,550,240	96,499,898	96,499,898
401032010003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	134,083,200	134,000,854	134,000,854
401032010005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	3 Dokumen	226,030,400	225,958,561	225,958,561
40103202 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tercapainya kebijakan perekonomian	100 Persen	100 Persen			
401032020001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	125,560,596	152,762,144	152,762,144
401032020002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	119,582,394	146,761,348	146,761,348
401032020003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	115,749,222	240,912,758	360,912,758
40103203 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	layanan pengadaan barang dan jasa	100 Persen	100 Persen			
401032030001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	185 Dokumen	185 Dokumen	233,847,504	1,332,888,833	1,582,888,833
401032030002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1000 Dokumen	1000 Dokumen	108,828,116	707,527,898	857,527,898
401032030003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	200 Orang	90,762,142	863,050,000	1,163,050,000
40103204 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terpenuhinya laporan pemantauan kebijakan bidang sumber daya alam	100 Persen	100 Persen			
401032040001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	74,753,622	74,733,902	74,733,902
401032040002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	4 Dokumen	96,812,654	96,706,898	96,706,898
401032040003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	128,520,000	128,475,620	128,475,620
40101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah;Presentaseimplementasi kebijkan reformasi birokrasi	B(8700); 100 Nilai; Persen	B(8700); 100 Nilai; Persen			
40101201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
401012010001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	418,192,905	588,955,758	588,955,758
40101202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			
401012020001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan	114 Orang/bulan	28,932,524,730	28,222,372,457	31,429,617,772
40101205 Administrasi Kependagawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			
401012050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	15,288,000	34,450,000	34,450,000
401012050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	184 Orang	311,940,000	1,689,966,000	1,689,966,000
40101206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	100 Persen			
401012060001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	114,963,303	142,713,371	142,713,371
401012060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	26 Paket	1,142,528,323	8,106,307,859	8,106,307,859
401012060004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	12 Paket	177,495,345	191,320,180	191,320,180
401012060005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	97,884,279	97,884,279	97,884,279
401012060008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	354,913,000	435,100,000	435,100,000
401012060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4,709,691,000	5,266,165,000	7,266,165,000
40101207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik Daerah	100 Persen	100 Persen			
401012070001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	15 Unit	390,000,000	-	
401012070002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	383,186,000	5,043,510,000	5,043,510,000
401012070005 Pengadaan Mebel 1 Usulan Pokir	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	75 Unit	538,086,310	619,258,153	619,258,153
40101208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja layanan administrasi pemerintah Daerah yang telah disediakanTingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 Persen	100 Persen			
401012080001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	2,650,725	24,110,000	24,110,000
401012080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5,573,531,693	5,591,400,000	8,457,583,644
401012080004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	22,330,909,090	22,653,319,866	22,827,609,866
40101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen			
401012090001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	774,239,539	772,633,337	1,153,994,537
401012090002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	85 Unit	1,500,781,978	1,747,013,700	2,365,652,500
401012090006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	114 Unit	1,116,356,614	985,379,400	985,379,400
401012090009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5 Unit	952,616,250	1,329,604,000	1,329,604,000
40101211 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH	100 Persen	100 Persen			
401012110001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	933,709,094	933,709,094	933,709,094
401012110002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	158,000,000	158,000,000	158,000,000
401012110003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	5 Orang	39,420,000	39,420,000	39,420,000
40101212 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan KDH/WKDH	100 Persen	100 Persen			
401012120001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	1,721,131,293	1,605,120,014	1,664,520,014
401012120002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	1,360,738,028	1,366,657,010	1,366,657,010
40101213 Penataan Organisasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	100 Persen	100 Persen			
401012130001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	6 Dokumen	186,931,489	186,096,547	236,096,547
401012130002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	303,860,580	390,888,380	440,888,380
401012130003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	217,671,995	329,344,192	379,344,192
40101214 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya pelayanan pada kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	100 Persen	100 Persen			
401012140001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	12 Laporan	2,279,220,500	2,813,640,000	2,813,640,000
401012140002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	4 Laporan	441,974,497	361,801,060	361,801,060
401012140003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	12 Laporan	840,000,000	1,320,746,518	1,320,746,518
TOTAL				124,897,834,961	151,110,280,870	176,879,271,944

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
4.02 SEKRETARIAT DPRD						
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan layanan tugas fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan DPRD	100 Persen	100 Persen			
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 Persen	100 Persen			
4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	90,450,000	90,428,000	90,428,000
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	215,850,000	215,840,000	215,840,000
4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	16,750,000	165,295,300	165,295,300
4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1,008,671,680	1,008,671,680	1,008,671,680
4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	11,725,000	11,674,000	11,674,000
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran yang dibahas	100 Persen	100 Persen			
4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	89,770,000	89,738,000	89,738,000
4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	147,320,000	147,282,000	147,282,000
4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	147,320,000	147,320,000	147,320,000
4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	108,440,000	108,120,000	108,120,000
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terpenuhinya fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Terpenuhinya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terpenuhinya fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Terpenuhinya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen	21,500,000	21,456,000	21,456,000
4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	70,950,000	70,800,000	70,800,000
4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	30,100,000	30,000,000	30,000,000
4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	30,100,000	30,000,000	30,000,000
4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	12 Laporan	30,100,000	30,000,000	30,000,000
4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	6,700,000	6,712,000	6,712,000
4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	6,700,000	6,712,000	6,712,000
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas DPRD Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	628,750,000	628,750,000	628,750,000
4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	6 Orang	258,600,000	578,376,000	578,376,000
4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang	362,855,000	427,834,000	427,834,000
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 21 Usulan Pokir	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,947,550,000	10,667,832,000	10,667,832,000
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terpenuhinya fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Terpenuhinya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	11,725,000	16,650,000	16,650,000
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	1,981,781,800	2,113,031,800	2,113,031,800
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	3,350,000	3,330,000	3,330,000
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya fasilitasi pembahasan kerja sama daerah Terpenuhinya Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	17,999,000	17,988,000	17,988,000
4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,025,000	4,958,000	4,958,000
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terpenuhinya tugas DPRD yang difasilitasi Terpenuhinya Tugas DPRD yang Difasilitasi	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,278,600,000	13,278,600,000	13,278,600,000
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen 100 Persen 100 persen	100 persen 100 Persen 100 persen			
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	26,729,380	26,279,380	26,279,380
4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,662,095	1,767,095	1,767,095
4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	70,484,190	195,789,190	195,789,190
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	38 Orang/bulan	7,207,474,001	7,546,077,029	9,762,726,981
4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,984,190	2,424,190	2,424,190
4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,664,190	4,644,190	4,644,190
4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1,902,095	2,157,095	2,157,095
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	5 Paket	402,500,000	870,954,500	870,954,500
4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	160 Orang	1,594,444,000	1,763,050,000	1,763,050,000
4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Usulan Pokir	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	32 Orang	75,345,000	77,970,000	77,970,000
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	1 Paket	47,409,448	50,548,983	50,548,983
4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14 Paket	1,015,077,964	4,828,534,901	4,828,534,901
4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	69,320,830	494,675,356	494,675,356
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	397,221,178	396,929,333	396,929,333
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3 Usulan Pokir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9 Paket	1,034,333,698	1,150,050,370	1,150,050,370
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	121,678,200	121,678,200	121,678,200

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4,044,479,000	5,973,459,000	5,973,459,000
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	31,562,000	658,627,000	658,627,000
4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	342,000,000	862,410,000	862,410,000
4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100 Unit	51,761,370	250,956,800	250,956,800
4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	31,684,000	31,684,000	31,684,000
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	17,995,000	41,125,000	41,125,000
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,740,000,000	1,740,600,000	1,755,600,000
4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	419,000,000	788,700,000	788,700,000
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6,691,160,000	8,192,410,986	8,883,251,983
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	112,723,695	195,120,267	195,120,267
4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	999,114,543	1,187,384,063	1,187,384,063
4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	726,000,000	2,027,014,043	2,027,014,043
4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	487,500,000	1,385,402,891	1,385,402,891
4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	365,625,000	422,025,000	422,025,000
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tingkat pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Tingkat Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	18,931,267,713	17,506,928,242	18,979,070,000
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	343,750,000	369,230,000	369,230,000
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	25 Orang	76,010,000	76,010,000	76,010,000
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya layanan administrasi DPRD Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen			
4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,350,000	3,700,000	3,700,000
4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	1,175,150,000	1,501,822,000	1,501,822,000
4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	1,541,102,669	1,543,478,669	1,543,478,669
TOTAL				70,732,147,929	92,209,016,553	96,603,649,260

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
5.01 PERENCANAAN						
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	86 Persen	86 Persen			
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 Dokumen	4 Dokumen			
5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	15,075,000	15,074,000	15,074,000
5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	90,863,000	88,823,000	88,823,000
5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	11,926,000	11,914,000	11,914,000
5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	3 Berita Acara	136,186,705	136,662,705	136,662,705
5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	300 Usulan	300 Usulan	7,705,000	7,696,000	7,696,000
5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	1,193,024,528	1,587,130,528	3,179,559,528
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	3200 data	3200 data			
5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	350 Dokumen	60 Dokumen	47,153,000	54,805,000	54,805,000
5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	31 Orang	31 Orang	48,511,000	48,518,000	233,888,000
5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	104,801,941	104,470,941	104,359,364
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen			
5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	5 Laporan	68,621,855	1,562,816,370	825,730,185
5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	5 Kerja Sama	2 Kerja Sama	39,280,120	39,266,120	-
5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	5 Laporan	98,908,700	331,195,501	541,071,685
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	94 Persen	94 Persen			
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 Dokumen 19 Rekomendasi	2 Dokumen 19 Rekomendasi			
5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	47,253,257	47,238,257	60,665,257
5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	13 Laporan	13,817,000	10,782,000	8,806,000
5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	31,546,770	31,541,770	25,347,770
5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	102,387,500	104,797,500	136,774,135
5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	54,655,570	55,654,570	74,169,570
5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	6 Laporan	14,070,000	14,060,000	17,760,000
5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	6 Laporan	22,588,011	18,243,735	18,217,735
5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	3 Laporan	70,257,838	71,267,838	111,317,838
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun dan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 dokumen 2 ; 11 Dokumen ; Rekomendasi 11 Rekomendasi	2 dokumen 2 ; 11 Dokumen ; Rekomendasi 11 Rekomendasi			
5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	58,963,270	59,968,270	59,968,270
5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	11,046,000	8,014,000	8,014,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	31,131,270	31,117,270	31,117,270
5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	89,258,000	89,252,000	119,064,000
5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	10,948,905	10,962,905	10,962,905
5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	5 Laporan	11,448,905	11,440,905	11,440,905
5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	5 Laporan	17,648,905	17,644,905	17,644,905
5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	630,278,470	638,820,470	658,702,470
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	2 Dokumen 8 Rekomendasi	2 Dokumen 8 Rekomendasi			
5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	10,948,905	27,862,905	27,862,905
5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	10,948,905	8,298,905	8,298,905
5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	19,778,905	12,498,905	12,498,905
5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	238,841,574	1,214,572,663	1,244,567,523
5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	183,614,500	61,130,140	61,130,140
5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan	10,232,500	8,298,905	8,298,905
5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan	10,232,500	8,298,905	8,298,905
5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	471,461,000	616,097,305	636,091,305
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	36 Pegawai PNS	100 Persen			
5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	35 Orang/bulan	8,442,211,183	9,619,297,118	9,619,298,186
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan adm kepegawaian	36 Pegawai	100 Persen			
5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	152,320,000	136,110,000	197,110,000
5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	123 Orang	110 Orang	877,210,000	342,094,000	331,094,000
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	6 Kegiatan Penyediaan	6 Kegiatan Penyediaan			
5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	10,981,230	10,981,230	20,431,715
5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11 Paket	677,795,717	668,051,792	813,165,081
5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	64,607,177	115,160,840	115,160,840
5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	91,930,846	88,607,605	29,246,612
5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	16,188,000	22,800,000	22,800,000
5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13 Laporan	2,279,293,000	1,645,945,000	1,907,167,000
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen			
5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	36,632,000	81,444,000	81,444,000
5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	118,333,750	72,284,022	72,284,022
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	2 Jenis Jasa Penunjang	2 Jenis Jasa Penunjang			
5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	9,500,000	9,500,000	9,500,000
5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	689,994,000	740,268,496	726,026,096
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	24 BMD yang dipelihara	24 BMD yang dipelihara			
5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	558,497,960	515,821,000	515,821,000
5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	36,500,000	37,698,040	37,698,040
5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	189,432,000	230,901,000	230,901,000
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase tindak lanjut hasil kelitbanagan	78,57 Persen	78,57 Persen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Bidang kelitbangan yang dilaksanakan	4 kegiatan kelitbangan	4 kegiatan kelitbangan			
5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	150,534,000	348,840,240	348,840,240
5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	206,937,000	559,080,382	559,080,382
5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	14,349,000	14,342,000	14,342,000
5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	1,162,545,538	1,289,428,097	1,489,427,851
5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	100 Persen			
5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	384,503,000	386,543,000	386,543,000
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi Daerah	150 Inovasi	150 Inovasi			
5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	9,187,000	9,172,000	9,172,000
5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	69,410,300	70,414,300	70,414,300
5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	602,505,098	604,481,098	604,481,098
5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	19,142,000	19,129,000	19,129,000
TOTAL				20,905,955,108	24,804,631,453	26,807,181,453

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PPENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
5.02 KEUANGAN						
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	100 Persen			
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen			
5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	117,190,000	72,735,000	72,735,000
5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	266,946,000	321,881,200	321,880,965
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	53,630,000	223,487,846	223,487,846
5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	14 Unit	49,063,440	272,827,741	348,170,280
5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	515,040,801	280,690,982	280,690,982
5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1800 Obyek Pajak	30000 Obyek Pajak	901,410,000	1,528,724,000	2,028,724,000
5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	2 Layanan	62,566,204	56,253,014	49,308,341
5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	11 Dokumen	256,360,000	29,881,746	29,881,746
5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	66,832,646	16,648,180	339,148,180
5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	191,810,000	129,190,000	57,190,000
5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50,642,000	197,891,141	197,891,141
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen			
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	12,879,062	2,628,380	1,314,190
5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,712,527	1,708,447	1,577,028
5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,708,447	1,708,447	131,419
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11,827,710	2,628,380	131,419
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-			
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	43 Orang/bulan	13,255,868,758	13,291,370,847	13,393,762,250
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	68,086,711	2,628,380	131,419
5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	4,862,503	2,628,380	131,419
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-			
5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	1 Paket	99,190,000	17,690,000	17,647,314
5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	12 Orang	113,918,000	93,543,000	93,543,000
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen			
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	10,749,865	5,291,848	5,291,848
5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	5 Paket	118,419,462	120,947,132	120,947,132
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	351,832,797	16,252,300	16,252,300
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	1 Paket	52,052,984	159,219,565	159,219,565
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	9,450,000	6,750,000	1,000,000
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	878,293,000	481,185,000	938,523,308
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	23,362,957	1,973,029	1,973,029
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	324,000,000	276,000,000	276,000,000
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,105,188,000	2,072,176,858	2,078,199,848
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	34 Unit	296,752,280	683,771,500	673,761,500
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30 Unit	39,700,000	49,060,000	49,060,000
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	29,610,000	4,000,000	400,000
TOTAL				20,348,956,154	20,431,372,343	21,786,106,469

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
502000000250000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
50202 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah perangkat daerah yang menyajikan laporan keuangan dengan baik Tingkat Kesesuaian tahapan penyusunan APBD	31 OPD 100 Persen	31 OPD 100 Persen			
50202201 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD yang Tepat waktu	10 Dokumen	10 Dokumen			
502022010001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	202,219,285	340,717,285	340,717,285
502022010002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	295,744,277	362,168,285	362,168,285
502022010003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	65,679,944	68,326,538	68,326,538
502022010004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	166,259,432	96,235,797	96,235,797
502022010006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	89,577,999	91,875,399	91,875,399
502022010007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	912,461,848	1,434,243,068	1,434,243,068
502022010008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	457,879,628	952,384,470	952,384,470
502022010009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	175,446,600	190,246,600	190,246,600
502022010010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	213,057,000	91,510,279	91,510,279
502022010011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	293,730,969	95,716,720	95,716,720
502022010012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	45,877,000	29,628,000	29,628,000
502022010013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang	384,653,046	476,663,046	476,663,046
50202202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan penatausahaan Keuangan	31 OPD	31 OPD			
502022020001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	73,811,000	68,035,628	68,035,628
502022020003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	124 Dokumen	124 Dokumen	358,394,122	292,839,326	292,839,326
502022020004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	22,983,000	34,506,000	34,506,000
502022020005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	33,474,000	77,167,000	77,167,000
502022020006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	109,890,069	109,890,350	109,890,350
502022020007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1 Laporan	22,992,000	22,992,000	22,992,000
502022020008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	8,974,350	21,852,350	21,852,350
502022020009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	51 Dokumen	50 Dokumen	412,532,000	412,509,000	412,509,000
502022020010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	152,493,869	152,563,869	152,563,869
50202203 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	31 OPD	31 OPD			
502022030001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	1 Laporan	36,734,000	36,702,276	36,702,276
502022030002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	1 Dokumen	346,371,884	346,060,164	346,060,164
502022030003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	167,498,724	178,172,008	178,172,008
502022030004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	50,403,000	49,301,038	49,301,038

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
502022030005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	185,213,000	186,225,980	186,225,980
502022030006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	342,806,000	363,322,973	363,322,973
502022030007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	11,955,295	13,450,000	13,450,000
502022030008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	148,154,068	149,157,746	149,157,746
502022030009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	92,814,400	91,951,002	91,951,002
502022030010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	14,538,000	14,592,000	14,592,000
502022030011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	590,517,000	590,517,000	590,517,000
502022030012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	10,953,430	5,682,000	5,682,000
502022030013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	24,010,000	17,646,349	17,646,349
50202204 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan			
502022040001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	22,990,257	8,352,838	8,352,838
502022040002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22,997,175	311,978,668	311,978,668
502022040004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22,983,000	4,086,839	4,086,839
502022040005 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22,988,000	4,087,204	4,087,204
502022040006 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22,811,000	4,086,839	4,086,839
502022040008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	22,988,905	2,079,270	2,079,270
502022040009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	4 Laporan	6,500,000,000	6,500,000,000	3,633,816,356
502022040010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	22,983,000	2,877,095	2,877,095
50202205 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
502022050001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	24,010,000	23,953,600	23,953,600
502022050002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	285,761,314	285,761,039	285,761,039
502022050003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 Orang	31 Orang	275,548,046	351,715,000	351,715,000
50203 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian Data Rincian BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota	100 Persen	100 Persen			
50203201 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan BMD baik pada lingkup pengguna barang maupun pengelola Barang	32 OPD	32 OPD			
502032010001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	437,650,000	671,633,053	1,023,571,815
502032010004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	137,891,650	111,140,650	111,140,650
502032010005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	230,000,000	242,532,900	242,532,900
502032010007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	149,963,034	149,945,745	149,945,745
502032010008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	200,018,943	199,992,895	199,992,895
502032010009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
502032010010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	337,435,943	327,677,064	327,677,064
502032010011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	178,050,813	-	-
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31 Laporan	31 Laporan	229,000,000	351,938,762	-
502032010013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 Orang	130 Orang	458,561,000	706,061,000	706,061,000
50201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	B(87);100 Persen 100 Persen	B(87);100 Persen 100 Persen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
50201201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan Tahapan dan waktu	100 Persen	100 Persen			
502012010001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10,217,950	6,877,950	6,877,950
502012010006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	9,437,080	9,797,080	9,797,080
502012010007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9,582,360	6,242,360	6,242,360
50201202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan keuangan perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			
502012020001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	9,777,391,226	10,264,789,402	10,264,789,402
502012020003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 Dokumen	42 Dokumen	221,874,933	721,874,500	721,874,500
502012020005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8,628,975	5,288,975	5,288,975
502012020008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	5,188,175	5,198,175	5,198,175
50201203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen			
502012030006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,187,950	3,177,950	3,177,950
50201205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen			
502012050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 Paket	2 Paket	295,282,300	251,511,759	251,511,759
502012050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	171 Orang	359,922,000	1,685,082,000	1,685,082,000
502012050011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	30 Orang	1,329,290,000	217,680,000	217,680,000
50201206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen			
502012060001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40,170,420	80,728,586	80,728,586
502012060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	376,402,811	443,601,309	443,601,309
502012060003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,016,965	99,904,592	99,904,592
502012060004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	250,318,739	296,729,231	296,729,231
502012060005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	126,290,240	158,550,885	158,550,885
502012060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	35,010,000	34,000,000	34,000,000
502012060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	12 Laporan	1,597,940,000	2,285,776,000	2,285,776,000
502012060010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	248,893,500	395,157,483	395,157,483
50201207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen			
502012070005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	30,675,907	30,479,737	30,479,737
502012070006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	106,803,292	203,607,953	203,607,953
502012070011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	21,690,000	20,000,000	20,000,000
50201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 Persen	100 Persen			
502012080001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	16,035,000	36,816,000	36,816,000
502012080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	414,000,000	500,000,000	500,000,000
502012080004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,632,555,000	2,532,689,304	2,622,909,304
50201209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen			
502012090001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	45 Unit	47,183,803	87,280,706	87,280,706
502012090002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	45 Unit	475,933,588	836,980,444	836,980,444
502012090006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	127,470,000	124,600,000	124,600,000
502012090009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	403,811,900	404,062,900	404,062,900
TOTAL				35,206,936,433	39,523,237,288	36,747,273,644

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase kinerja layanan kepegawaian	100 Persen	100 Persen			
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan layanan pengadaan dan pemberhentian Jumlah layanan lembaga profesi ASN dan informasi kepegawaian	5 Layanan	2 layanan 3 layanan			
5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	13,926,880	1,066,000	1,066,000
5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	417,609,669	373,483,000	373,483,000
5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	113,642,370	118,549,261	118,549,261
5.03.02.2.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	41,972,041	31,982,241	31,982,241
5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	49,933,000	49,933,000	49,933,000
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan mutasi dan promosi ASN	3 Layanan	3 Layanan			
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12,200,000	119,024,761	119,024,761
5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	467 Dokumen	450 Dokumen	234,696,000	212,515,000	212,515,000
5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	624,727,000	663,314,000	663,314,000
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan	3 Orang	2 kegiatan			
5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 Orang	20 Orang	908,100,000	539,624,000	539,624,000
5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	50 Orang	315 Orang	179,313,400	169,270,400	169,270,400
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2950 Orang	5 kegiatan			
5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2950 Dokumen	3361 Dokumen	18,156,000	18,168,000	18,168,000
5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan	12 Laporan	229,940,050	962,718,761	962,718,761
5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	240 Orang	110 Orang	6,000,000	6,016,000	6,016,000
5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	10 Orang	18,990,000	18,998,000	18,998,000
5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	11,150,000	11,160,000	105,660,000
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	3 Dokumen	100 persen			
5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4,576,000	4,552,000	4,552,000
5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4,576,000	19,162,000	19,162,000
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	46 Orang	100 persen			
5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	49 Orang/bulan	10,093,004,685	11,113,292,113	11,113,292,113
5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1,986,000	1,986,000
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	52 Orang	100 persen			
5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3 Paket	56,680,000	329,440,465	329,440,465
5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	50 Orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000
5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	93 Orang	98 Orang	203,723,645	203,061,455	203,061,455
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	4 Layanan	4 Layanan			
5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	150,000,000	315,086,619	315,086,619
5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	63,067,902	59,140,903	59,140,903
5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	109,142,724	90,628,678	90,628,678
5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	601,410,000	808,194,000	815,588,077
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	3 Jenis	100 Persen			
5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	277,144,200	734,937,000	734,937,000
5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	72 Unit	52,945,340	3,053,060,960	3,053,060,960
5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	163 Unit	17,626,833	352,817,731	352,817,731
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3 Jenis			
5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	11,369,472	10,701,155	10,701,155
5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	60,000,000	54,000,000	54,000,000
5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	335,400,000	324,915,534	324,915,534
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis			
5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	22 Unit	274,790,997	333,986,852	333,986,852
5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	115,444,429	119,158,092	119,158,092
5.03.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	1 Unit	186,892,000	93,786,000	93,786,000
5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	70,306,985	177,973,158	177,973,158

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun	30 Persen	30 Persen			
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	158 Orang	158 Orang			
5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	158 Orang	945 Orang	1,005,580,000	3,672,604,051	4,172,582,974
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional pegawai	50 Orang	4 Kegiatan			
5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	1,696,322,000	1,575,048,000	2,606,143,000
TOTAL				18,332,359,622	26,803,355,190	28,436,323,190

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
6.01.0.00.0.00.27.0000 Inspektorat Daerah						
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	78,00 persen	75,00 persen			
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelesaian pembinaan dan pengawasan internal perangkat daerah	275 Obinas	249 Obinas			
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96 Laporan	96 Laporan	580,720,000	452,030,000	353,600,000
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	110 Laporan	110 Laporan	562,190,000	878,048,200	733,548,200
6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	17,850,000	17,850,000	17,850,000
6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	31 Laporan	31 Laporan	99,960,000	99,960,000	99,960,000
6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	10 Dokumen	199,920,000	199,920,000	199,920,000
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus yang Telah Selesai Ditindaklanjuti	5 Kasus	5 Kasus			
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	5 Laporan	93,636,000	117,718,000	117,718,000
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan ; Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	100 ; 95 Persen	100 ; 85 Persen			
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan	1 Kebijakan	1 Kebijakan			
6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	1 Rekomendasi	52,930,000	52,980,816	52,980,816
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan	6 Kegiatan	20 Kegiatan			
6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 perangkat daerah	31 perangkat daerah	499,978,000	419,588,000	419,668,000
6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 perangkat daerah	31 perangkat daerah	85,000,000	132,472,000	132,472,000
6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan	16 Kegiatan	64,510,000	518,762,742	823,259,041
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen			
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun			
6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	55 Orang/bulan	11,618,826,802	12,523,336,648	12,656,336,648
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 Orang	58 Orang			
6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	5 Paket	149,135,118	299,016,362	299,016,362
6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 Dokumen	2 Dokumen	20,250,000	35,900,000	35,900,000
6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	58 Orang	2,962,130,000	2,918,281,000	3,632,192,000
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Umum yang Dilaksanakan	79 Jenis	14 Jenis			
6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	4 Paket	142,322,777	58,756,639	58,756,639
6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	45,922,204	44,819,320	44,819,320
6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	1 Paket	41,870,145	56,401,815	56,401,815
6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	3 Paket	40,205,842	82,277,988	82,277,988
6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1350 Dokumen	1 Dokumen	8,400,000	8,400,000	8,400,000
6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	12 Laporan	1,235,703,000	1,213,278,000	1,561,292,000
6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15,765,625	60,503,507	60,503,507
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen			
6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	342,000,000	754,690,000	754,690,000
6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	30 Unit	652,685,941	341,283,776	341,283,776
6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	26 Unit	460,548,675	294,459,392	282,229,892
6.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	43,658,963	-	58,408,201
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Kegiatan	21 Jenis	4 Jenis			
6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	12 Laporan	4,500,000	4,500,000	4,500,000
6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	42,000,000	42,000,000	46,620,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Laporan	12 Laporan	17,695,000	33,772,500	44,402,500
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	91,800,500	146,763,408	146,763,408
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Dipelihara dengan Baik	27 Unit	27 Unit			
6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	680,312,465	519,404,000	519,404,000
TOTAL				20,872,427,057	22,327,174,113	23,645,174,113

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BONTANG UTARA
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	Target Perubahan 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
701000000280000 Kecamatan Bontang Utara							
70102 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	98 Persen 98 ; 98 Persen	98 Persen 98 ; 98 Persen				
70102201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	3 Koordinasi	3 Koordinasi				
701022010001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	529,747,200	529,747,200	519,707,200	519,707,200
701022010002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	138,122,266	138,122,266	148,146,918	148,146,918
70102202 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	7 Urusan	7 Urusan				
701022020001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	61,877,734	61,877,734	61,877,674	61,877,674
701022020002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	100,000,000	173,815,000	173,815,000
701022020003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	111,529,600	111,529,600	2,708,529,299	2,708,529,299
70102203 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi	6 Kali	6 Kali				
701022030001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000	120,000,000	106,037,000	106,037,000
70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen				
70103203 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701032030001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	425,052,800	425,052,800	498,972,800	510,972,800
70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70104202 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
701042020001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	12 Laporan	100,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000
70105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70105201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan				
701052010001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	65 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
70101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen				
70101202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	227 Orang	227 Orang				
701012020001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	21,103,942,705	21,103,942,705	23,933,217,430	23,933,217,430
70101205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	227 Orang	227 Orang				
701012050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	4 Paket	200,000,000	200,000,000	513,460,875	513,460,875
701012050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	33 Orang	329,556,130	329,556,130	281,420,000	281,420,000
70101206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 Layanan	7 Layanan				
701012060001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	11,818,045	11,818,045

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	Target Perubahan 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
701012060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	45 Paket	400,000,000	400,000,000	638,786,861	638,786,861
701012060004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30,000,000	30,000,000	33,711,420	35,982,348
701012060005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10 Paket	65,000,000	65,000,000	109,379,543	109,464,966
701012060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen	7,000,000	7,000,000	1,680,000	1,680,000
701012060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	12 Laporan	450,000,000	450,000,000	670,650,000	684,294,000
70101207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
701012070002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	150,000,000	150,000,000	460,262,000	460,262,000
701012070010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	200,000,000	200,000,000	201,152,500	201,152,500
701012070011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	200,000,000	200,000,000	165,730,078	165,730,078
70101208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis				
701012080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	519,610,000	519,610,000	519,610,000	524,610,000
701012080004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4,741,018,620	4,741,018,620	7,041,855,552	7,041,855,552
70101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	5 Jenis	5 Jenis				
701012090001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	272,312,196	272,312,196	279,156,000	279,156,000
701012090002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	13 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
701012090006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	50,000,000	50,000,000	30,940,000	30,940,000
701012090010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	195,518,000	195,518,000
701012090011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	130,000,000	130,000,000	129,910,000	129,910,000
701000000280001 Kelurahan Guntung							
701 KECAMATAN							
70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen				
70103202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur				
701032020001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,801,063	14,801,063	14,801,063	14,801,063
701032020002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Usulan Pokir5 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	800,000,000	800,000,000	1,448,010,000	1,448,010,000
701032020003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	186,242,432	186,242,432	647,383,033	647,383,033
70103203 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701032030001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1,005,887,150	1,005,887,150	1,626,966,969	1,648,566,969
701032030004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	18 Laporan	18 Laporan	1,098,810,000	1,098,810,000	1,098,810,000	1,098,810,000
70103206 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	1 kelurahan	1 kelurahan				
701032060007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1229 Keluarga	1229 Keluarga	35,190,000	35,190,000	35,190,000	35,190,000
70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %				
70104201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701042010001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	12 Laporan	55,327,760	55,327,760	233,117,760	233,117,760
70105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %				
70105201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan				

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	Target Perubahan 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
701052010001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10 Orang	10 Orang	18,792,760	18,792,760	222,575,773	222,575,773
70101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen				
70101205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	227 Orang	227 Orang				
701012050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4 Paket	50,000,000	50,000,000	5,573,737	5,573,737
701012050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	29 Orang	250,000,000	250,000,000	649,137,895	649,137,895
70101206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 Layanan	7 Layanan				
701012060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45 Paket	380,000,000	380,000,000	570,949,355	570,949,355
701012060005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10 Paket	50,000,000	50,000,000	53,734,921	53,734,921
701012060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen	34,384,234	34,384,234	34,384,234	34,384,234
701012060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	150,000,000	150,000,000	555,901,230	555,901,230
70101207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
701012070010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	903,000,000	903,000,000	433,450,000	433,450,000
70101208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis				
701012080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	102,000,000	102,000,000	102,000,000	122,000,000
70101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	5 Jenis	5 Jenis				
701012090002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	11 Unit	68,000,000	68,000,000	108,571,250	90,571,250
701012090011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	17,425,670	17,425,670	484,294,900	484,294,900
701000000280002 Kelurahan Loktuan							
701 KECAMATAN							
70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen				
70103202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur				
701032020001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	15,805,440	15,805,440	28,650,536	28,650,536
701032020002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Usulan Pokir5 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	932,317,141	932,317,141	2,606,267,373	2,606,267,373
701032020003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	671,783,634	671,783,634	1,005,710,225	1,005,710,225
70103203 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701032030001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	1,537,296,000	1,537,296,000	1,613,851,032	1,676,251,032
701032030004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	52 Laporan	52 Laporan	3,149,227,500	3,149,227,500	3,275,008,720	3,275,008,720
70103206 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan				
701032060007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	4387 Keluarga	4387 Keluarga	126,772,500	126,772,500	164,349,700	164,349,700
70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %				
70104201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 Lembaga	3 Lembaga				

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	Target Perubahan 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
701042010001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12 Laporan	78,446,160	78,446,160	136,393,738	136,393,738
70105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70105201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan				
701052010001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10 Orang	45 Orang	15,435,000	15,435,000	530,224,995	530,224,995
70101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen				
70101205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	227 Orang	227 Orang				
701012050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3 Paket	50,000,000	50,000,000	34,878,328	34,878,328
701012050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	10 Orang	50,000,000	50,000,000	336,099,000	336,099,000
70101206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 Layanan	7 Layanan				
701012060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	34 Paket	180,000,000	180,000,000	261,181,743	261,181,743
701012060005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	49,455,054	49,455,054	25,614,327	25,614,327
701012060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3 Dokumen	184,704,000	184,704,000	185,714,000	185,714,000
701012060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	150,000,000	211,521,000	211,521,000
70101207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
701012070010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1,000,000	1,000,000	93,407,530	93,407,530
70101208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis				
701012080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	66,000,000	66,000,000	66,600,000	76,600,000
701012080004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	46,994,000	46,994,000	18,000,000	18,000,000
70101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	5 Jenis	5 Jenis				
701012090002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	9 Unit	154,000,000	154,000,000	156,131,250	104,124,850
701012090011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	28 Unit	17,630,000	17,630,000	101,380,000	101,380,000
701000000280003 Kelurahan Gunung Elai							
701 KECAMATAN							
70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen				
70103202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur				
701032020001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	23,402,880	23,402,880	17,060,723	17,060,723
701032020002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Usulan Pokir5 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	1,673,333,333	1,673,333,333	4,510,207,309	4,510,207,309
701032020003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	632,984,557	632,984,557	2,564,981,244	2,564,981,244
70103203 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701032030001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1,637,565,461	1,637,565,461	1,661,527,415	1,715,527,415
701032030004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan	2,789,797,500	2,789,797,500	3,591,054,760	3,591,054,760
70103206 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan				

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	Target Perubahan 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
701032060007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1575 Keluarga	1575 Keluarga	45,202,500	45,202,500	133,946,280	133,946,280
70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70104201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701042010001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	30,144,000	30,144,000	556,962,000	556,962,000
70105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70105201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan				
701052010001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	60,000,000	60,000,000	103,438,917	103,438,917
70101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen				
70101205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	227 Orang	227 Orang				
701012050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	50,000,000	50,000,000	86,920,000	86,920,000
701012050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	10 Orang	50,000,000	50,000,000	218,299,685	218,299,685
70101206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 Layanan	7 Layanan				
701012060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	380,000,000	380,000,000	501,741,523	501,741,523
701012060005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9 Paket	43,000,000	43,000,000	51,711,679	51,711,679
701012060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3 Dokumen	156,382,000	156,382,000	159,840,000	159,840,000
701012060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	12 Laporan	150,000,000	150,000,000	1,231,506,838	1,231,506,838
70101207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
701012070010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	240,000,000	240,000,000	228,599,250	228,599,250
70101208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis				
701012080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72,308,000	72,308,000	74,607,895	87,607,895
701012080004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
70101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	5 Jenis	5 Jenis				
701012090002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	12 Unit	88,917,400	88,917,400	89,164,343	51,904,344
701012090006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	10,000,000	10,000,000	24,360,000	24,360,000
701012090011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	1,107,421	1,107,421
701000000280004 Kelurahan Bontang Baru							
701 KECAMATAN							
70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen				
70103202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur				
701032020001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	15,291,675	15,291,675	14,948,491	14,948,491
701032020002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Usulan Pokir5 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	1,794,013,253	1,794,013,253	2,010,050,491	2,021,035,741
701032020003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	364,250,392	364,250,392	409,529,740	409,529,740
70103203 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3 Lembaga				

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	Target Perubahan 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
701032030001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	919,236,496	919,236,496	919,236,475	952,836,475
701032030004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	28 Laporan	28 Laporan	1,689,204,000	1,689,204,000	1,689,186,000	1,677,396,447
70103206 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan				
701032060007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2632 Keluarga	2632 Keluarga	74,796,000	74,796,000	156,345,147	156,345,147
70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70104201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701042010001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12 Laporan	104,033,232	104,033,232	158,561,450	158,561,450
70105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70105201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan				
701052010001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	577 Orang	17,000,000	17,000,000	16,820,340	16,820,340
70101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen				
70101205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	227 Orang	227 Orang				
701012050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3 Paket	50,000,000	50,000,000	266,668,648	268,558,648
701012050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	50,000,000	50,000,000	10,500,000	-
70101206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 Layanan	7 Layanan				
701012060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	380,000,000	380,000,000	303,722,266	303,722,266
701012060005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	55,000,000	55,000,000	56,452,724	57,241,034
701012060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	5,000,000	103,894,000	103,894,000
701012060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	12 Laporan	180,000,000	180,000,000	1,204,809,000	1,213,435,000
70101207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
701012070010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	401,000,000	401,000,000	202,854,300	202,854,300
70101208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis				
701012080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92,400,000	92,400,000	184,700,000	184,700,000
70101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	5 Jenis	5 Jenis				
701012090002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	7 Unit	152,624,500	152,624,500	357,570,200	329,567,800
701000000280005 Kelurahan Api-Api							
701 KECAMATAN							
70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen				
70103202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur				
701032020001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	18,645,480	18,645,480	18,916,090	18,916,090
701032020002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Usulan Pokir5 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	499,000,000	499,000,000	3,285,470,000	3,285,470,000
701032020003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	545,402,967	545,402,967	3,471,070,863	3,471,070,863

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	Target Perubahan 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
70103203 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701032030001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1,571,360,651	1,571,360,651	1,591,086,168	1,641,486,168
701032030004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	42 Laporan	5 Laporan	2,559,796,000	2,559,796,000	2,540,072,093	2,540,072,093
70103206 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan				
701032060007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3011 Keluarga	3011 Keluarga	86,204,000	86,204,000	86,177,831	86,177,831
70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70104201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701042010001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12 Laporan	67,994,600	67,994,600	696,800,775	696,800,775
70105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70105201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan				
701052010001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	50 Orang	14,000,000	14,000,000	13,482,588	13,482,588
70101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen				
70101205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	227 Orang	227 Orang				
701012050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4 Paket	50,000,000	50,000,000	59,078,305	59,078,305
701012050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	33 Orang	50,000,000	50,000,000	121,500,000	121,500,000
70101206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 Layanan	7 Layanan				
701012060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	180,000,000	180,000,000	309,425,477	309,425,477
701012060005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,458,491	50,458,491	50,030,957	50,030,957
701012060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen	145,908,000	145,908,000	145,908,000	145,908,000
701012060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	12 Laporan	150,000,000	150,000,000	553,565,000	553,565,000
70101207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
701012070010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	1,000,000	1,000,000	404,483,977	404,483,977
70101208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis				
701012080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	65,350,000	65,350,000	65,650,000	71,650,000
70101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	5 Jenis	5 Jenis				
701012090002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	11 Unit	142,933,550	142,933,550	142,335,400	100,335,400
701012090011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27 Unit	18,310,000	18,310,000	18,310,000	18,310,000
701000000280006 Kelurahan Bontang Kuala							
701 KECAMATAN							
70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen				
70103202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur				
701032020001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	13,042,000	13,042,000	16,265,000	16,265,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	Target Perubahan 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
701032020002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3 Usulan Pokir5 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	999,000,000	999,000,000	2,931,205,250	2,761,010,392
701032020003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	600,000,000	600,000,000	884,711,948	884,711,948
70103203 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701032030001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	630,960,000	630,960,000	641,966,000	665,966,000
701032030004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Usulan Aspirasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20 Laporan	20 Laporan	1,200,811,500	1,200,811,500	1,200,893,698	1,200,893,698
70103206 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan				
701032060007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2032 Keluarga	2032 Keluarga	59,188,500	59,188,500	60,153,372	60,153,372
70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70104201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 Lembaga	3 Lembaga				
701042010001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	37,673,000	37,673,000	66,616,343	66,616,343
70105 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 %	100 %				
70105201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan				
701052010001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	20 Orang	10,000,000	10,000,000	10,210,000	10,210,000
70101 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	B (87) ; 100 Persen 100 persen	B (87) ; 100 Persen 100 persen				
70101205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	227 Orang	227 Orang				
701012050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4 Paket	50,000,000	50,000,000	32,079,000	32,079,000
701012050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	33 Orang	50,000,000	50,000,000	22,535,058	22,535,058
70101206 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 Layanan	7 Layanan				
701012060002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	180,000,000	180,000,000	174,769,921	175,771,421
701012060005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	41,501,841	41,501,841	48,209,559	48,209,559
701012060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3 Dokumen	70,596,000	70,596,000	70,596,000	70,596,000
701012060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	12 Laporan	150,000,000	150,000,000	204,141,000	357,334,000
70101207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
701012070010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
70101208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis				
701012080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72,000,000	72,000,000	72,300,000	88,300,000
701012080004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25,200,000	25,200,000	-	-
70101209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	5 Jenis	5 Jenis				
701012090002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	7 Unit	71,907,500	71,907,500	91,787,840	72,203,840
TOTAL				68,450,628,008		102,864,869,879	102,996,017,080

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BONTANG SELATAN
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Bontang Selatan						
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP; Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	98 ; 98 Persen 98 Persen 98;98 Persen	98 ; 98 Persen 98 Persen 98;98 Persen			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi Jumlah Subjek Koordinasi	4 Subjek 4 Subjek	4 Subjek 4 Subjek			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	4 Laporan	521,830,879	837,695,417	837,695,417
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	13 Dokumen	76,575,000	492,053,177	492,053,177
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Jumlah Urusan	5 Urusan 5 Urusan	5 Urusan 5 Urusan			
7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1 Dokumen	50,600,000	50,413,046	50,413,046
7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	8 Laporan	139,991,000	533,377,155	533,377,155
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	27 Laporan	17,448,003	7,214,168,309	7,214,168,309
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Objek Koordinasi	6 objek 6 Objek	6 objek			
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	14,874,000	14,874,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100 persen 100 Persen 100 Persen	100 persen 100 Persen 100 Persen			
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga 3 Lembaga	3 Lembaga 3 Lembaga			
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	478,153,000	1,607,649,791	1,607,649,791
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang barat) Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang selatan) Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	2 Perda/Perkada 2 Perda/Perkada	2 Perda/Perkada 2 Perda/Perkada			
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	59,769,120	59,769,120
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang selatan) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	2 Kegiatan 2 Kegiatan			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Usulan Pokir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	850 Orang	30,000,000	283,280,216	283,280,216
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 persen 100 persen	100 Persen 100 persen 100 persen			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	201 Orang	100 Persen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	108 Orang/bulan	20,365,654,415	22,509,956,985	22,509,956,985
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	201 Orang	100 Persen			
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	4 Paket	100,000,000	105,532,450	105,532,450
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	61 Orang	49,500,000	274,500,000	274,500,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	8 Layanan	100 Persen			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14,997,298	15,015,643	15,015,643
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8 Paket	376,000,000	540,852,281	540,852,281
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	19,996,948	63,305,107	63,305,107
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	74,091,480	71,770,942	71,770,942
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2 Dokumen	11,325,600	11,325,600	11,325,600
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Usulan Pokir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	60 Laporan	1,012,866,000	535,072,000	535,072,000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	76,000,000	161,198,000	161,198,000
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7 Unit	250,000,000	661,920,474	661,920,474
7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9 Unit	50,000,000	197,006,390	225,016,990
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	3 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	374,000,000	374,300,000	396,289,400
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5,498,077,822	6,146,312,234	6,146,312,234
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	4 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	14 Unit	159,834,781	171,531,000	171,531,000
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10,229,500	9,883,500	9,883,500
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Usulan Pokir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	78,992,500	152,989,500	152,989,500
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	73 Unit	55,081,119	55,075,000	55,075,000
7.01.0.00.0.00.29.0001 Kelurahan Satimpo						
7.01 KECAMATAN						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 100 persen Persen	100 persen			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur			
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	25,000,000	25,000,000
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 21 Usulan Pokir15 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	2,386,082,800	5,191,096,146	5,191,096,146
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Usulan Pokir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	145,000,000	960,609,064	960,609,064
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga 3 Lembaga	3 Lembaga 3 Lembaga			
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	878,610,000	733,196,306	738,196,306
7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14 Laporan	14 Laporan	1,523,500,000	1,523,497,623	1,523,497,623
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	6 Kelurahan	6 Kelurahan			
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2 Usulan Pokir1 Usulan Aspirasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	475 Keluarga	475 Keluarga	276,500,000	265,702,416	265,702,416
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	-	100 Persen			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	1 Kegiatan 2 Perda/Perkada			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang selatan) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	2 Kegiatan 2 Kegiatan			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Usulan Pokir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	20 Orang	30,000,000	654,940,657	654,940,657
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 persen 100 persen	100 Persen 100 persen 100 persen			
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	201 Orang	100 Persen			
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	75,000,000	74,943,271	74,943,271
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25,000,000	339,750,000	339,750,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	8 Layanan	100 Persen			
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11 Paket	75,000,000	931,923,053	931,923,053
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40,000,000	43,180,304	43,180,304
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	88,880,000	88,880,000	88,880,000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Usulan Pokir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	124,000,000	730,839,000	730,839,000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	50,000,000	203,241,659	203,241,659
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	3 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	97,000,000	97,000,000	97,000,000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondidi Baik	-	100 Persen			
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	110,000,000	109,139,300	109,139,300
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	40,000,000	39,990,000	39,990,000
7.01.0.00.0.00.29.0002 Kelurahan Tanjung Laut						
7.01 KECAMATAN						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat. Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen 100 Persen 100 Persen	100 persen 100 Persen 100 Persen			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur			
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	33,918,839	33,918,839
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 21 Usulan Pokir15 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	2,206,329,233	3,506,333,310	3,506,333,310
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Usulan Pokir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	165,000,000	844,624,474	844,624,474
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga 3 Lembaga	3 Lembaga 3 Lembaga			
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1,205,287,200	1,209,639,600	1,217,239,600
7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14 Laporan	14 Laporan	2,364,000,000	2,715,909,983	2,715,909,983
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	6 Kelurahan	6 Kelurahan			
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2 Usulan Pokir1 Usulan Aspirasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	600 Keluarga	600 Keluarga	230,000,000	30,000,000	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang barat) Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang selatan) Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang selatan) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	2 Kegiatan 2 Kegiatan			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Usulan Pokir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	450 Orang	30,000,000	650,990,460	650,990,460
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 persen 100 persen	100 Persen 100 persen 100 persen			
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	201 Orang	100 Persen			
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	75,000,000	225,211,826	225,211,826
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25,000,000	125,000,000	125,000,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	8 Layanana	100 Persen			
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	80,000,000	159,722,597	159,722,597
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	45,000,000	43,230,000	43,230,000
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	134,397,600	134,397,600	134,397,600
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Usulan Pokir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	124,000,000	372,410,000	372,410,000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50,000,000	248,379,281	248,379,281
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	3 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50,400,000	53,100,000	53,100,000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	4 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	138,126,050	138,126,050	138,126,050
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	40,000,000	40,000,000	40,000,000
7.01.0.00.0.00.29.0003 Kelurahan Bontang Lestari						
7.01 KECAMATAN						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat. Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 persen 100 Persen	100 Persen 100 persen 100 Persen			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur			
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	25,000,000	25,000,000
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 21 Usulan Pokir15 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	780,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Usulan Pokir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	130,000,000	1,164,982,000	1,164,982,000
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga 3 Lembaga	3 Lembaga 3 Lembaga			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	676,143,600	926,519,800	930,319,800
7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	1,157,000,000	1,157,000,000	1,157,000,000
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	6 Kelurahan	6 Kelurahan			
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2 Usulan Pokir1 Usulan Aspirasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	350 Keluarga	350 Keluarga	40,000,000	40,000,000	40,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang barat) Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang selatan) Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan 2 Perda/Perkada			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang selatan) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	2 Kegiatan 2 Kegiatan			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Usulan Pokir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia	20 Orang	20 Orang	30,000,000	54,991,000	54,991,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 persen 100 persen	100 Persen 100 persen 100 persen			
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	201 Orang	100 Persen			
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	75,000,000	75,000,000	75,000,000
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	8 Layanan	100 Persen			
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	70,000,000	610,000,000	610,000,000
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35,000,000	35,000,000	35,000,000
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	66,028,800	66,028,800	66,028,800
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Usulan Pokir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	124,000,000	613,175,000	613,175,000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	3 Jenis	100 persen			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	63,600,000	63,600,000	63,600,000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	4 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	96,432,850	321,432,850	321,432,850
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	40,000,000	40,000,000	40,000,000
7.01.0.00.0.00.29.0004 Kelurahan Tanjung Laut Indah						
7.01 KECAMATAN						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat. Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 persen	100 Persen 100 Persen 100 persen			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	29,715,046	29,715,046
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 21 Usulan Pokir15 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	6 Unit	1,996,666,667	2,720,468,667	2,720,468,667
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Usulan Pokir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	155,000,000	1,005,581,809	1,005,581,809
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga 3 Lembaga	3 Lembaga 3 Lembaga			
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1,224,165,200	1,443,678,989	1,450,278,989
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	2,019,000,000	1,953,124,842	1,953,124,842
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	6 Kelurahan	6 Kelurahan			
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2 Usulan Pokir1 Usulan Aspirasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	585 Keluarga	585 Keluarga	60,000,000	125,875,158	125,875,158
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang barat) Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang selatan) Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang selatan)	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	2 Kegiatan 2 Kegiatan			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Usulan Pokir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	20 Orang	330,000,000	49,111,000	49,111,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 persen 100 persen	100 Persen 100 persen 100 persen			
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	201 Orang	100 Persen			
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	75,000,000	300,730,246	300,730,246
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	8 Layanan	100 Persen			
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	78,000,000	412,817,410	412,817,410
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	42,000,000	30,675,805	30,675,805
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	114,681,600	114,681,600	114,681,600
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Usulan Pokir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	124,000,000	742,726,000	742,726,000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen			
		2 Jenis				
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	50,000,000	319,474,896	319,474,896
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	-	100 Persen			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	87,600,000	87,600,000	87,600,000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	-	100 Persen			
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	126,597,650	126,897,650	126,897,650

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	40,000,000	133,900,000	133,900,000
7.01.0.00.0.00.29.0005 Kelurahan Berbas Tengah						
7.01 KECAMATAN						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 Persen	100 Persen			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur			
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	37,000,000	36,999,703	36,999,703
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 21 Usulan Pokir15 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	1,260,000,000	1,580,000,000	1,580,000,000
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Usulan Pokir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	190,000,000	789,982,018	789,982,018
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-			
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1,842,576,000	2,393,697,222	2,406,097,222
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan	3,749,623,200	3,657,814,165	3,657,814,165
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-			
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2 Usulan Pokir1 Usulan Aspirasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	878 Keluarga	878 Keluarga	156,376,800	246,655,778	246,655,778
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	-	100 Persen			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	1 Kegiatan 2 Perda/Perkada			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang selatan) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	2 Kegiatan 2 Kegiatan			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Usulan Pokir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	20 Orang	230,000,000	371,866,546	371,866,546
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 100 persen 100 persen	100 Persen 100 persen 100 persen			
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	-	100 Persen			
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	75,000,000	167,904,448	167,904,448
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25,000,000	40,000,000	40,000,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	8 Layanan	100 Persen			
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	635,000,000	1,644,966,067	1,644,966,067
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50,000,000	49,281,868	49,281,868
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	217,282,400	217,282,400	217,282,400
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Usulan Pokir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	124,000,000	329,522,850	329,522,850
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50,000,000	700,000,000	700,000,000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	3 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49,200,000	156,689,400	156,689,400
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	-	100 Persen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	177,000,000	176,999,835	176,999,835
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	40,000,000	570,370,000	570,370,000
7.01.0.00.0.00.29.0006 Kelurahan Berbas Pantai						
7.01 KECAMATAN						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 Persen	100 Persen			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur			
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	23,000,000	22,999,373	22,999,373
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 21 Usulan Pokir15 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	1,766,666,666	2,997,276,351	2,997,276,351
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Usulan Pokir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	442,000,000	1,164,350,592	1,164,350,592
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-			
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	818,865,600	819,295,470	824,095,470
7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	1,455,420,000	1,455,145,144	1,455,145,144
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-			
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2 Usulan Pokir1 Usulan Aspirasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	400 Keluarga	400 Keluarga	56,580,000	56,579,803	56,579,803
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	-	100 Persen			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	-	1 Kegiatan			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara) Cakupan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang selatan)	100 Persen 100 % 100 Persen 100 % 100 %	100 Persen 100 % 100 Persen 100 % 100 %			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan	2 Kegiatan 2 Kegiatan	2 Kegiatan 2 Kegiatan			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Usulan Pokir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	20 Orang	30,000,000	54,822,621	54,822,621
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 persen 100 persen	100 Persen 100 persen 100 persen			
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	201 Orang	100 Persen			
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	30,000,000	29,999,998	29,999,998
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25,000,000	200,500,000	200,500,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	8 Layanan	100 Persen			
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Usulan Pokir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	223,500,000	429,953,324	429,953,324
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40,000,000	39,271,331	39,271,331
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	83,404,800	83,404,800	83,404,800
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Usulan Pokir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	124,000,000	457,584,000	457,584,000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Usulan Pokir	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	95,000,000	103,800,000	103,800,000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	3 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70,800,000	74,400,000	74,400,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	4 Jenis	100 Persen			
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	99,000,000	98,975,378	98,975,378
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	40,000,000	39,910,000	39,910,000
TOTAL				67,479,570,061	104,316,839,209	104,407,039,209

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BONTANG BARAT
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Bontang Barat						
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen			
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	632,690,200	631,475,740	631,475,740
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	30,064,100	30,047,278	30,047,278
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen			
7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	48,005,700	48,005,517	48,005,517
7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	160,954,959	1,120,214,528	1,120,214,528
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	28,663,000	823,341,323	823,341,323
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terpenuhinya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 Persen	100 Persen			
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	37,895,000	113,105,000	167,474,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan kelurahan Terpenuhinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen			
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	85,000,000	84,995,438	84,995,438
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen undefined undefined 100 Persen	100 Persen undefined undefined 100 Persen			
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	266,005,280	339,819,178	339,819,178
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kec. Bontang Barat)	100 Persen	100 Persen			
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tingkat penerapan dan penegakan peraturan daerah	100 Persen	100 Persen			
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	62,831,140	62,782,165	62,782,165
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (Kec. Bontang Barat) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat)	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerinatahan umum sesuai penugasan kepala daerah Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	180 Orang	180 Orang	56,646,000	62,191,087	62,191,087
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	11,584,126,828	13,471,027,918	13,471,027,918
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	-	-	6,090
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	226,646,100	87,690,000	87,690,000
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	359,299,000	696,784,000	696,784,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15,242,300	13,552,300	13,552,300
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	243,470,108	225,185,280	225,185,280
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	56,819,153	56,830,062	56,830,062
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	55,373,436	52,830,185	52,830,185
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	1095 Dokumen	7,117,500	4,680,000	4,680,000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	56 Laporan	354,848,999	418,619,940	418,615,000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah umlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 Persen undefined undefined 100 Persen	100 Persen undefined undefined 100 Persen			
7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	41,771,545	63,804,132	91,040,749
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	287,728,925	366,000,000	366,000,000
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	4,414,499,488	4,877,789,974	4,907,802,814
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	emenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen			
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	236,508,050	236,508,000	236,508,000
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	8,720,500	8,740,500	8,740,500
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	50,511,677	352,260,000	263,340,633
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	54 Unit	97,286,725	99,817,500	107,130,000
7.01.0.00.0.00.30.0001 Kelurahan Kanaan						
7.01 KECAMATAN						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	3 Kegiatan 100 Persen	3 Kegiatan 100 Persen			
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	23,158,000	39,475,067	39,475,067
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 9 Usulan Pokir19 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	1,650,000,000	2,063,558,600	2,063,558,600
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	72,618,710	163,169,546	163,169,546
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen 2 Kegiatan	100 Persen 2 Kegiatan			
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	376,802,758	804,002,076	820,802,076
7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	761,400,000	947,607,667	933,207,667
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-			
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	29 Keluarga	29 Keluarga	1,000,000	23,984,398	23,984,398
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	24,000,000	227,364,683	227,364,683
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	15,000,000	55,888,523	55,888,523
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	A (88,31) ; 100 Persen 100 persen 100 persen	A (88,31) ; 100 Persen 100 persen 100 persen			
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1,000,000	1,000,000	1,000,000
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	55,010,000	487,570,000	487,570,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	79,767,275	201,409,893	201,409,893
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25,110,471	25,203,476	25,203,476
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	41,702,400	40,792,400	40,792,400
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	-	157,311,000	157,311,000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	80,000,000	79,010,000	79,010,000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	207,507,430	127,370,687	127,370,687
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	30,663,930	47,133,930	47,133,930
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,671,340	10,671,340
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1,000,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	150,000,000		
7.01.0.00.0.00.30.0002 Kelurahan Gunung Telihan						
7.01 KECAMATAN						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen	100 persen			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	3 Kegiatan 100 Persen	3 Kegiatan 100 Persen			
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15,003,157	14,960,157	14,960,157
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 9 Usulan Pokir19 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	950,000,000	1,138,590,297	1,138,590,297
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	127,960,858	372,528,315	372,528,315
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen 2 Kegiatan	100 Persen 2 Kegiatan			
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,192,463,768	1,373,006,110	1,409,006,110
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1,895,400,000	1,885,900,000	1,885,900,000
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-			
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	39 Keluarga	39 Keluarga	1,000,000	1,000,000	1,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang selatan) Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	100 % 100 %	100 % 100 %			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang selatan) Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara) [deleted]	100 Persen 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 % 100 % 100 %			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 Kegiatan 100 Persen	2 Kegiatan 100 Persen			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	19,987,805	47,511,328	47,511,328
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen A (88,31) ; 100 Persen 100 persen	100 persen A (88,31) ; 100 Persen 100 persen			
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	30,000,000	231,648,000	225,648,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	258,012,773	420,186,124	420,186,124
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	48,331,257	36,371,171	36,371,171
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	104,256,000	106,560,000	106,560,000
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	142,330,000	339,125,000	338,501,000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	98,900,000	102,100,000	102,100,000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	93,913,785	116,228,000	92,852,000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	21,007,000	21,007,000	21,007,000
7.01.0.00.0.00.30.0003 Kelurahan Belimbing						
7.01 KECAMATAN						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	3 Kegiatan 100 Persen	3 Kegiatan 100 Persen			
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	17,993,695	18,006,575	18,006,575
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 9 Usulan Pokir19 Usulan Aspirasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	2,096,790,500	3,191,966,659	2,547,896,334
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	283,982,137	484,019,137	482,424,137
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen 2 Kegiatan	100 Persen 2 Kegiatan			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1 Usulan Pokir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,733,267,280	2,489,919,200	2,796,719,200
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	3,218,400,000	3,218,428,000	3,218,428,000
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-			
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga	1,000,000	1,000,000	1,000,000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara) Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan 100 Persen	1 Kegiatan 100 Persen			
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	42,000,000	42,000,000	53,520,000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 Kegiatan 100 Persen	2 Kegiatan 100 Persen			
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	9,937,000	34,932,000	34,932,000
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	A (88,31) ; 100 Persen 100 persen 100 persen	A (88,31) ; 100 Persen 100 persen 100 persen			
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	20,000,000	207,000,000	207,000,000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	164,422,911	164,422,911	170,852,911
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	27,404,460	27,453,471	46,491,312
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	177,235,200	177,235,200	177,235,200
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	154,304,000	465,316,000	593,257,000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	14,999,792	14,999,792	212,183,536
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	59,000,000	59,000,000	73,500,000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	121,389,274	146,920,000	131,860,000
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	22,033,500	22,033,500	22,033,500
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	9,999,900	9,999,900	9,999,900
TOTAL				36,251,192,739	46,855,994,178	46,917,094,178

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKKOTA BONTANG
TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
8.01.0.00.0.00.31.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi	63 persen	63 persen			
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi	1200 orang	1200 orang			
8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	1 Dokumen	-	-	10,527,026,151
8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	1500 Orang	1,113,060,210		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	256 Orang	0 Orang	837,446,000		
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan	72 persen	72 persen			
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Eriak Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepal Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Kebijakan	2 Kebijakan			
8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	330 Orang	530 Orang	7,837,044,000	14,377,688,016	16,432,888,016
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase terhadap Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	86 persen	86 persen			
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah.	200 Laporan	200 Laporan			
8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Usulan Pokir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	200 Orang	2,545,138,794	4,735,512,383	4,735,512,383
8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	200 Orang	121,775,000	160,325,000	160,325,000
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	93 persen	93 persen			
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di daerah.	150 Orang	150 Orang			
8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	250 Orang	560,975,797	561,013,662	3,061,013,662
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik	100 persen	100 persen			
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	425 orang	425 orang			
8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	425 Orang	425 Orang	1,614,931,663	2,421,797,926	2,421,797,926
8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	6,837,000	6,837,000	6,837,000
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen			
8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen			
8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	18,406,350	18,406,350
8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35,550,249	14,087,176	14,087,176
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah tenaga adm keuangan PD yang terbayarkan	25 pegawai	25 pegawai			
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	5,643,755,580	6,558,404,281	6,558,404,281
8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	4,500,000	10,948,905	10,948,905
8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	10,948,905	10,948,905

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	target 2024	Target Perubahan 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai yang mendapat layanan adm. Kepegawaian Daerah	40 pegawai	40 pegawai			
8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	266,400,000	90,000,000	90,000,000
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis adm.umum yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis			
8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Paket	38 Paket	298,375,678	319,002,266	319,002,266
8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	106,334,863	80,377,475	80,377,475
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	34,951,237	31,487,600	31,487,600
8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	145 Laporan	1,101,582,198	929,375,000	929,375,000
8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemda	2 unit	2 unit			
8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2 Unit	-		600,000,000
8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	175,351,129	31,295,699	31,295,699
8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	275,975,440	248,994,000	248,994,000
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 jenis	3 jenis			
8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000
8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54,650,000	67,200,000	67,200,000
8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	16 Laporan	632,320,000	827,014,822	827,014,822
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	4 Jenis	4 Jenis			
8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	978,779,286	285,210,000	285,210,000
8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	18,095,000	18,077,000	18,077,000
TOTAL				24,298,329,124	31,809,003,466	47,491,229,617

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 semester I menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, dan perubahan lokasi kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan tersebut disusun sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bagian dari penjabaran pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, program dan kegiatan pembangunan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2024 dan Perubahannya merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Bontang. Oleh karena itu, keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang direncanakan, pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat bagi pembangunan Kota Bontang yang lebih baik.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG



KEPALA BAGIAN HUKUM,

Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE